

347.017

Sup

p

1997



**PENDAYAGUNAAN HAK BANTUAN HUKUM DALAM MENDUKUNG  
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SUPRIYANTA**

**PEMBIMBING**

**PROF. SOEHARDJO, Ss, S.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**1997**

**PENDAYAGUNAAN HAK BANTUAN HUKUM DALAM MENDUKUNG  
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

Disusun Oleh :

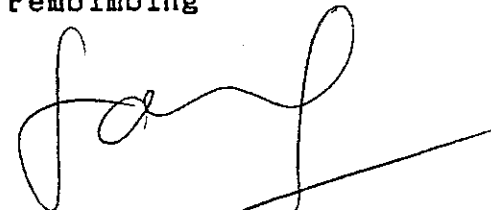
**SUPRIYANTA**

**NIM : B002950141**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal,

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Soehardjo, Ss., SH.

Semarang, Oktober 1997

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum

Prof. H. Purwahid Patrik, SH

NIP. 130.307.058

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini, penulis ingin memanjatkan puji syukur yang setulus-tulusnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan tesis ini akhirnya bisa diselesaikan.

Karya ini mengambil judul tentang "Pendayagunaan Hak Bantuan Hukum Dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu" dengan setitik harapan semoga karya yang sederhana ini bisa menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan persoalan bantuan hukum dalam perkara pidana. Masalah bantuan hukum ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan persoalan hak asasi manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk di dalamnya bidang peradilan pidana dewasa ini sedang menjadi sorotan dari berbagai pihak. Dengan melakukan pengkajian ulang terhadap sistem pengaturan bantuan hukum didalam hukum positif di Indonesia yang juga didukung oleh penelitian empiris, maka diharapkan bisa diperoleh suatu pemahaman dan kejelasan yang sebaik-baiknya mengenai model pengaturan hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa seperti yang diharapkan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya teristimewa kepada yang sangat saya hormati Bapak Prof. Soehardjo, Ss, SH baik selaku pribadi dan terutama adalah selaku pembimbing penelitian. Dengan ketekunan dan kesabaran, beliau selalu mendorong dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis, sehingga hasil penulisan ini setidaknya mendekati seperti yang diharapkan.

Selanjutnya ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada seluruh Staf Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, terutama juga kepada Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum serta Sekretaris Program Pascasarjana.

Tidak lupa dalam kesempatan ini juga ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian lapangan antara lain :

- a. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta.
- c. Bapak Kapolresta Surakarta.
- d. Bapak Kepala RUTAN Klas I Surakarta.
- e. Bapak Ketua IKADIN Cabang Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari para beliau mustahil tesis ini bisa diselesaikan.

Akhir kata segala saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan tesis ini akan diterima dengan senang hati.

Surakarta,      Oktober 1997

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
RINGKASAN .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Kerangka Pemikiran .....	15
G. Sistematika Uraian .....	16
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	 17
A. Pengertian Bantuan Hukum .....	18
1. Bantuan Hukum Dalam Perspektif Perkembangan Internasional Hak Asasi Manusia .....	  21
2. Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Hukum Positif di Indonesia .....	 30

B. Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan	
Pidana .....	47
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	47
2. Model-Model Penyelenggaraan Peradilan	
Pidana .....	51
C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	59
D. Arti Penting Bantuan Hukum Dalam Sistem	
Peradilan Pidana Terpadu .....	66

### BAB III. ANALISIS DAN PENEMUAN-PENEMUAN ..... 73

A. Analisis Ketentuan Bantuan Hukum Menurut	
KUHAP Dalam Kerangka Sistem Peradilan	
Pidana Terpadu .....	74
B. Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung	
Republik Indonesia Berkaitan Dengan	
Penegakan Hak Atas Bantuan Hukum .....	118
C. Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum Dalam Proses	
Peradilan Pidana di Kotamadya Surakarta ..	133
1. Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum di	
Tingkat Kepolisian .....	134
2. Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum di	
Tingkat Kejaksaan .....	142
3. Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum di	
Tingkat Pengadilan .....	144

BAB IV. PENUTUP .....	176
A. Kesimpulan .....	176
1. Umum .....	176
2. Khusus .....	180
B. Saran-Saran.....	184

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

## RINGKASAN

Secara historis, konsepsi bantuan hukum diyakini berasal dari negara-negara Barat, yang sejak awal dimaksudkan sebagai syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi dan integritas peradilan dengan baik serta merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan.

Secara internasional bantuan hukum ini juga telah mendapat pengakuan, hal ini tercermin baik di dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) maupun dalam instrumen internasional yang berupa Basic Principles on The Role of Lawyers yang telah diadopsi oleh Konggres Kejahatan kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai 7 September 1990.

Dalam UDHR tersebut pertama kali dunia internasional mengakui adanya "access to legal counsel" sebagai bagian dari hak asasi manusia dimana setiap orang yang dituntut dihadapan hukum berhak didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum. Sedangkan dalam ICCPR jaminan hak atas bantuan hukum tersebut antara lain tercantum dalam artikel 14 butir 3 huruf d yang menyebutkan bahwa : To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it.

Dalam Basic Principles on The Role of Lawyers antara lain dikemukakan bahwa program-program untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum dan pentingnya peran pembela di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Dikemukakan juga bahwa mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat memperjuangkan sendiri haknya dibantu untuk memperoleh bantuan hukum secukupnya.

Bantuan hukum di Indonesia dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap insan Indonesia. Hak ini dipandang sebagai hak asasi manusia sehingga program bantuan hukum di Indonesia pada dasarnya juga merupakan program penegakkan hak asasi manusia. Secara konstitusional hal ini mendapat legitimasi yang mantap sebagaimana tercermin didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (equality before the law).



Di dalam Kebijakanaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II) sebagaimana digariskan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bidang hukum telah memperoleh arah dan posisi yang lebih jelas, meliputi materi hukum, aparatur hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Dalam hubungan ini GBHN 1993 menggariskan bahwa pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh lapisan masyarakat. Ditekankan pula bahwa penataan kembali fungsi dan peranan organisasi, lembaga dan profesi hukum, demikian pula setiap peradilan dilaksanakan agar aparatur hukum secara terpadu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Penjabaran lebih lanjut dari asas persamaan di muka hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman baik dalam pasal-pasalnya (Pasal 35, 36, 37, 38) maupun dalam penjelasan umumnya. Secara lebih terperinci hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu pada Bab VII tentang Bantuan Hukum, Pasal 69-74. Bahkan lebih jauh ini juga terdapat dalam Bab V tentang Tersangka dan Terdakwa Pasal 54-57; Pasal 60-62 serta dalam Bab XIV tentang Penyidik yaitu Pasal 114 dan 115.

Mengamati perkembangan dunia peradilan di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan, bahwa tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam proses peradilan semakin meningkat, sehingga sempat memunculkan pendapat perlunya mendayagunakan bantuan hukum/peran penasihat hukum secara optimal dalam proses peradilan pidana. Hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa selama dalam proses peradilan pidana hanya bisa terealisasi secara optimal jika didukung oleh sistem pengaturan yang memadai yang memungkinkan komponen penasihat hukum bisa mengambil peran atau akses secara penuh demi kepentingan perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa. Ini berarti bahwa secara ideal keterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus juga mengikutsertakan komponen penasihat hukum di samping komponen yang lain seperti polisi, jaksa, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan.

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sistem pengaturan hak bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia khususnya yang ada didalam KUHP perlu dikaji dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman apakah sistem pengaturan yang ada selama ini telah memadai untuk menjamin perlindungan hukum dan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa selama dalam proses peradilan . Di samping itu dalam rangka mendapatkan deskripsi empiris mengenai pelaksanaan hak bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa

perlu juga dilakukan studi empiris dengan melihat pelaksanaannya di lapangan. Kedua hal inilah yang dicoba untuk diketengahkan sebagai permasalahan dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kebutuhan pengaturan bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia yang mampu mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.

Di samping itu juga untuk memperoleh pemahaman yang sebaik-baiknya tentang aktivitas penegakkan hukum dimana penasihat hukum sebagai salah satu pihak di dalamnya dan untuk menghimpun data mengenai pelaksanaan hak bantuan hukum dalam praktek peradilan pidana. Dari segi praktis manfaat yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah dapat disajikannya bahan-bahan keterangan yang menunjang usaha pembaharuan hukum acara pidana dan penegakkannya dalam rangka peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan manfaat ilmiah yang diharapkan adalah dapat dihipunkannya informasi empiris yang berhubungan dengan pelaksanaan hak bantuan hukum sebagai pembenaran terhadap arti pentingnya pendayagunaan hak bantuan hukum untuk mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif kualitatif yang dilengkapi dengan penelitian secara empiris sehingga diharapkan bisa diperoleh pemahaman dan kejelasan yang sebaik-baiknya atas permasalahan yang dikemukakan. Dalam rangka mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini dilakukan kegiatan pengumpulan data melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana. Disamping itu juga dilakukan pengamatan serta penyebaran kuisioner dalam rangka menjaring informasi yang diperlukan. Jenis-jenis data yang dikumpulkan secara purposif, berkaitan dengan data-data lain dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data secara normatif kualitatif dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hak bantuan hukum dalam KUHP, sebenarnya telah mencerminkan suatu keinginan untuk menempatkan komponen penasihat hukum sebagai pihak yang harus mendapat perhatian yang memadai. Secara sistematis ketentuan bantuan hukum dalam KUHP bisa dibedakan menjadi dua kategori yaitu :

- a. Kategori "hak" dan sekaligus "wajib" mendapat bantuan hukum, hal ini berlaku untuk tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana

yang dikualifikasi oleh Pasal 56 KUHP. Tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, 15 tahun atau lebih, dan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun dalam hal tersangka/terdakwa tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri.

- b. Kategori "hak" untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu untuk tindak pidana di luar kualifikasi yang ditentukan oleh Pasal 56 KUHP.

Dalam praktek penegakan hukum ketentuan Pasal 56 KUHP tersebut telah diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. : 501 K/Pid./1988 yang menegaskan bahwa pelaksanaan Pasal 56 KUHP bersifat "imperatif" tertuju pada semua pejabat, pada semua tingkat pemeriksaan. Ketentuan ini tidak tertuju kepada terdakwa yang masih mempunyai hak untuk "menolak" untuk didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk. Disamping itu khusus untuk tindak pidana korupsi terdapat yurisprudensi MARI No. 1565 K/Pid./1991 yang menegaskan bahwa pejabat pada semua tingkat pemeriksaan harus menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka sejak di awal penyidikan. Kelalaian atau pengabaian terhadap ketentuan ini akan berakibat semua hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa dinyatakan tidak sah. Dengan demikian disini tampak adanya sanksi proses yang dikembangkan melalui praktek peradilan pidana.

2. Pelaksanaan hak atas bantuan hukum dalam praktek peradilan pidana berdasarkan studi yang dilakukan di kotamadya Surakarta menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Di tingkat kepolisian

Terhadap tindak pidana yang dikualifikasi oleh Pasal 56 KUHP yang dalam praktek disebut sebagai tindak pidana berat, pihak kepolisian telah menjalin kerja sama dengan pihak IKADIN cabang Solo, meskipun tidak secara tertulis, tetapi dalam bentuk konsensus dan pengertian bersama. Oleh karena itu setiap kali terjadi tindak pidana berat dan menjadi perhatian masyarakat, maka tersangka/terdakwa selalu sudah tersedia penasihat hukum yang sanggup memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Sedangkan untuk tindak pidana yang tidak termasuk kualifikasi pasal 56 KUHP, artinya pejabat pada semua tingkat pemeriksaan oleh UU tidak diwajibkan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa, kerja sama antara kepolisian dan penasihat hukum masih dalam taraf antar personal yang didasarkan pada hubungan baik diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk menghadirkan penasihat hukum di

tingkat kepolisian tidak tersedia. Akibat lebih jauh dari hal ini adalah pihak kepolisian seringkali mengalami kesulitan untuk menghadirkan penasihat hukum bagi tersangka.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka di tingkat kepolisian pihak penasihat hukum tidak merasa kesulitan karena ada pengertian bersama antara keduanya, namun kehadirannya dalam mengikuti jalannya pemeriksaan tetap dibatasi hanya dalam bentuk melihat dan mendengar pemeriksaan. Dalam berhubungan dengan tersangka yang ditahan, penasihat hukum hanya diijinkan pada setiap jam kantor dan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut tetap dalam pengawasan. Di sini menjadi masalah dalam hal tersangka yang ditahan tersebut misalnya diperiksa pada malam hari, artinya di luar jam kerja kantor yang disediakan untuk penasihat hukum dalam mendampingi tersangka.

**b. Di tingkat kejaksaan**

Di tingkat kejaksaan penasihat hukum sudah tidak mendampingi tersangka secara fisik, sebab sejak berlakunya KUHP untuk tindak pidana umum yaitu tindak pidana yang diatur dalam KUHP, pihak kejaksaan tidak lagi melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap tersangka. Peranan penasihat hukum di tingkat kejaksaan ini adalah dalam hal mendapatkan surat dakwaan terhadap tersangka/terdakwa guna kepentingan pembelaan setelah perkaranya diperiksa di sidang pengadilan.

**c. Di tingkat pengadilan**

Di tingkat pengadilan ini, untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, kerja sama secara kelembagaan dilakukan dengan unsur Lembaga Bantuan Hukum setempat ( 6 LBH), tetapi hal inipun masih terbatas untuk golongan masyarakat yang kurang mampu juga dengan anggaran yang terbatas.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Menurut catatan sejarah, konsepsi bantuan hukum pada awalnya berasal dari negara-negara Barat. Menurut pendapat Mauro Cappaletti, program bantuan hukum ini sudah dikenal sejak jaman Romawi Kuno dan mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan pandangan moral, politik, dan filsafat hukum yang dianut pada masa itu.<sup>1</sup>

Di negara-negara Barat, program bantuan hukum mempunyai arti dan tujuan di samping sebagai syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi dan integritas peradilan dengan baik, juga merupakan tuntutan dari rasa perike-manusiaan. Kedua tujuan tersebut menurut Barry Metzger paralel dengan arti dan tujuan bantuan hukum di negara-negara berkembang pada umumnya.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang paling tidak juga memiliki program bantuan hukum yang menurut Adnan Buyung Nasution, arti dan tujuannya sudah tercantum dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum yaitu di samping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, juga mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya untuk menumbuhkan dan membina

---

<sup>1</sup>Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1981, hal. 5.

kesadaran hak-hak sebagai obyek hukum serta dapat turut mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.<sup>2</sup>

Bantuan hukum di Indonesia dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap insan Indonesia. Hak ini dipandang sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia sehingga program bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya adalah program untuk memperjuangkan penegakkan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka usaha untuk mewujudkan program bantuan hukum sebagai program penegakan hak-hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) bisa digunakan sebagai acuan dasarnya. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa " Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Dengan demikian program bantuan hukum di Indonesia secara yuridis konstitusional telah mendapat landasan yang mantap.

Selanjutnya di dalam kebijaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT-II) sebagaimana digariskan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bidang hukum telah memperoleh arah dan posisi yang lebih jelas, meliputi materi hukum,

---

<sup>2</sup>Ibid., hal. 6.

aparatur hukum, dan sarana dan prasarana hukum. Dalam hubungan ini GBHN 1993 menggariskan bahwa pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Ditekankan pula bahwa penataan kembali fungsi dan peranan organisasi, lembaga dan profesi hukum, demikian pula setiap peradilan dilaksanakan agar aparatur hukum secara terpadu mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mencermati amanat yang tertuang dalam GBHN tersebut bahwa pelayanan dan bantuan hukum perlu ditingkatkan maka dalam PJPT-II sekarang ini pelayanan dan bantuan hukum seharusnya merupakan "jalur utama" bagi rakyat pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian pendayagunaan hak bantuan hukum dalam rangka usaha pemerataan memperoleh keadilan telah mendapat legitimasi yang jelas, karena merupakan salah satu program pemerintah.

Dalam proses peradilan pidana, usaha pendayagunaan hak bantuan hukum ini lazimnya dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai penasihat hukum. Betapa pentingnya peran

penasihat hukum ini dalam membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental dari pencari keadilan, diakui juga oleh dunia internasional yang tercermin dalam " Basic principles on the Role of Lawyers" yang diadopsi oleh Konggres Kejahatan Kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990. Dalam kaitan ini antara lain dikemukakan bahwa program-program untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum dan pentingnya peran pembela di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat memperjuangkan sendiri haknya dibantu untuk memperoleh bantuan hukum secukupnya.<sup>3</sup>

Bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan usaha pencari keadilan (justisiabel) dalam memperoleh pemerataan keadilan. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai salah satu hak asasi manusia sangat didambakan oleh semua orang yang tersangkut suatu perkara. Dalam hukum positif di Indonesia ketentuan mengenai bantuan hukum ini bisa diketemukan antara lain dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam Pasal-pasal 35, 36 dan 37. Di samping itu juga terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu pasal-pasal sebagai berikut :

---

<sup>3</sup>Kunarto (penyadur), Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hal. 147.



Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa, Pasal 54-57; Pasal 60-62.

Bab VII tentang Bantuan Hukum, Pasal 69-74.

Bab XIV tentang Penyidikan, yaitu Pasal 114 dan 115.

Kedua undang-undang tersebut di atas bisa dikatakan sebagai perwujudan dan penjabaran lebih lanjut dari asas persamaan di muka hukum (equality before the law) seperti yang tersirat di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya perlu pula dikemukakan di sini, bahwa persoalan bantuan hukum ini sangat erat berkaitan dengan eksistensi " Negara Berdasarkan Atas Hukum " dimana Prinsip " Rule of Law " ditegakkan, sebab bantuan hukum ini hanya mungkin tumbuh dan berkembang secara wajar apabila hukum dijadikan sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan lembaganya.

Mengamati perkembangan dunia peradilan di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan, bahwa tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam proses peradilan pidana semakin meningkat. Berbagai kasus yang terjadi belakangan ini seperti kasus Marsinah, Tjetje, Udin dan sebagainya, semakin menambah besarnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut. Di sisi lain muncul juga pendapat tentang perlunya mendayagunakan peran penasihat hukum dalam proses peradilan pidana. Luhut M.P. Pangaribuan misalnya pernah mengajukan pendapat bahwa masalah penyiksaan dalam penyidikan sebenarnya bisa diku-

rangi seandainya akses tersangka kepada penasihat hukum di buka seluas-luasnya.<sup>4</sup>

Pemikiran untuk mendayagunakan hak bantuan hukum dalam proses peradilan pidana, tampaknya merupakan pemikiran yang realistis, sebab dalam praktek pemberian bantuan hukum ternyata masih ditemui banyak hambatan baik yang bersifat politis, sosial, ekonomis/finansial, psikologis dan sebagainya.<sup>5</sup>

Di samping apa yang telah diuraikan di atas urgensi perlunya pendayagunaan hak bantuan hukum dalam mendukung sistem peradilan pidana terpadu ini juga didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Secara substantif bantuan hukum seperti diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (UUPKK) maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dikonstruksikan sebagai suatu hak. Sebagai suatu hak, bantuan hukum ini dapat dituntut oleh setiap orang yang terlibat suatu perkara. Dengan demikian eksistensi hak bantuan hukum ini harus benar-benar mendapat dukungan dalam hukum positif dan dilaksanakan secara konsekwen. Kebutuhan akan bantuan hukum tersebut di samping demi kepentingan mereka yang terlibat suatu perkara (tersangka/terdakwa) juga untuk kepentingan sistem peradilan pidana itu

---

<sup>4</sup>Harian Republika, 3 Agustus 1994.

<sup>5</sup>Abdurrahman, Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia, Alumni Bandung, 1980, 125.

sendiri yaitu dalam rangka membantu mencari kebenaran materiil atas suatu perkara pidana. Mendapatkan kebenaran materiil adalah salah satu tujuan yang harus dicapai oleh hukum acara pidana, yang pelaksanaannya dilakukan dengan suatu sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana.

2. Apabila dilihat dari perangkat struktur, maka tampak bahwa kedudukan penasihat hukum dalam proses peradilan pidana masih belum mendapat tempat yang memadai. Secara akademis dan (praktis) ternyata masih ada perbedaan pandangan terhadap kedudukan penasihat hukum ini. Sebagian kalangan berpendirian bahwa komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini, terutama instansi atau badan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Sementara itu di pihak lain ada juga pendapat yang menyatakan bahwa para penasihat hukum juga bisa ditambahkan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Pandangan yang disebut terakhir ini misalnya dari Muladi yang menyatakan bahwa sebagai sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Pelbagai subsistem ini berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi. Mengingat peranannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat pula dikategorikan sebagai subsistem.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, B.P. UNDIP, 1995, hal. 119.

Penempatan penasihat hukum sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan subsistem yang lain (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (justisiabel), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekwensi logis dari pemikiran ini adalah para penasihat hukum harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana.

3. Sebagai alasan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan aspek kultural dalam praktek penegakan hukum pidana. Dalam hubungan ini penting untuk mendapat perhatian yaitu masih adanya pandangan sinis yang bersifat negatif terhadap para pemberi jasa bantuan hukum baik yang berasal dari kalangan penegak hukum sendiri maupun dari masyarakat.<sup>7</sup> Dari kalangan penegak hukum masih terdapat pandangan bahwa para pemberi bantuan hukum ini sebagai orang yang justru selalu mengganggu jalannya proses peradilan, sehingga muncul istilah " trouble makers ". Sementara itu dari kalangan masyarakat awam ada juga pandangan bahwa para pembela adalah penolong orang yang salah. Sikap-sikap dan pandangan-pandangan semacam ini adalah sisi lain yang menghambat usaha

---

<sup>7</sup>Abdurrahman, Loc. Cit.

pendayagunaan hak bantuan hukum dalam mendukung proses peradilan pidana.

4. Akhirnya sebagai alasan yang keempat ingin dikemukakan di sini bahwa keterlibatan penasihat hukum secara penuh dalam proses peradilan pidana sekaligus akan turut menjaga agar aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari prosedur hukum yang seharusnya, sehingga kapasitas penasihat hukum dalam hal ini benar-benar sebagai penjaga kewibawaan pengadilan.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia yang mampu mendukung sistem peradilan pidana terpadu ?
2. Apakah pelaksanaan hak bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa mampu mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu ?

Adapun yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana terpadu dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen penasihat hukum mampu akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Perkataan "terpadu" di sini dimaksudkan untuk memberi tekanan pada aspek koordinasi dan kerja sama antar komponen dalam sistem peradilan pidana

dimana komponen penasihat hukum terkait didalamnya.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Secara keseluruhan maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang kebutuhan pengaturan hukum terhadap bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia yang mampu mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu;
2. Untuk memperoleh pemahaman yang sebaik-baiknya tentang aktivitas penegakan hukum dimana penasihat hukum sebagai salah satu pihak di dalamnya. Disamping itu juga untuk menghimpun data mengenai pelaksanaan hak bantuan hukum dalam praktek peradilan pidana.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu manfaat praktis dan manfaat ilmiah. Manfaat praktis berhubungan dengan kenyataan bahwa masalah bantuan hukum adalah masalah praktis dan sekaligus merupakan masalah sosial. Sedangkan manfaat ilmiah berkaitan dengan usaha pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana serta hukum pidana pada khususnya.

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat disajikannya bahan-bahan keterangan yang menunjang usaha pembaharuan hukum acara pidana dan penegakannya dalam rangka peningkatan perlindungan hak-hak asasi

manusia. Sedangkan manfaat ilmiah yang diharapkan adalah dapat dihimpunnya informasi faktual yang berhubungan dengan pelaksanaan hak bantuan hukum sebagai justifikasi (pembenaran) terhadap arti pentingnya pendayagunaan hak bantuan hukum untuk mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Mengingat permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berhubungan dengan aspek normatif maupun praktis, maka dalam mendekati pokok permasalahannya juga dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kedua hal tersebut. Pendekatan yuridis dilakukan untuk menggali berbagai pandangan, asas-asas, doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang berhubungan dengan bantuan hukum dan sistem peradilan pidana. Dalam hubungan ini tipologi penelitian hukum yang dipilih berupa inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. Di samping itu juga dilengkapi dengan pendekatan komparatif dan sejarah hukum.

Penelitian hukum yang berupa inventarisasi hukum positif dilakukan untuk menggali dan memahami berbagai peraturan yang berhubungan dengan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian terhadap asas-asas

hukum dilakukan untuk mengetahui asas-asas yang ada dibelakang norma hukum positif yang mengatur tentang bantuan hukum dan sistem peradilan pidana. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal ditujukan untuk mengungkapkan kenyataan apakah ketentuan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia telah serasi secara vertikal maupun secara horisontal. Serasi secara vertikal artinya ketentuan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam rangka perlindungan HAM tidak bertentangan dengan kecenderungan Internasional mengenai HAM dan peradilan pidana, maupun dengan konstitusi negara. Serasi secara horisontal berarti berbagai peraturan yang mendukung bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia sudah tidak mengandung berbagai pertentangan.

Selanjutnya sepanjang menyangkut pelaksanaan hak bantuan hukum dalam praktek peradilan pidana, maka digunakan pendekatan secara sosiologis dengan berpijak pada data empiris yang diperoleh dari lapangan. Dalam hubungan ini ingin diketahui apakah pelaksanaan hak bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa dalam praktek peradilan pidana telah mendayagunakan peran penasihat hukum melalui kerja sama secara terpadu dengan subsistem lain dalam sistem peradilan pidana dalam rangka realisasi hak bantuan hukum seperti telah dijamin oleh hukum positif.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berupa data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder yang dijadikan sebagai bahan penelitian



meliputi beberapa peraturan hukum yang berhubungan dengan bantuan hukum dan sistem peradilan pidana, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya, serta pendapat para ahli hukum. Di samping itu juga dikumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan hak bantuan hukum melalui studi dokumen.

Mengingat dalam penelitian ini juga akan dikaji bagaimana pelaksanaan hak bantuan hukum dalam praktek peradilan pidana, maka dibutuhkan juga data empiris yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara
2. Pengamatan
3. Daftar pertanyaan (kuisisioner)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu<sup>9</sup>. Dalam hal ini wawancara (Interview) dilakukan secara bebas terpimpin dengan terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Aktivitas pengamatan ditujukan terhadap praktek peradilan pidana dengan sasaran terutama pada mekanisme penyelesaian perkara pidana di pengadilan baik untuk perkara pidana yang didampingi oleh penasihat hukum maupun yang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Sedangkan daftar pertanyaan diperlukan juga dalam penelitian ini dalam rangka untuk memperoleh

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung , 1988, hal. 135

pengetahuan yang mendalam tentang pelaksanaan hak bantuan hukum dalam praktek peradilan pidana. Mengenai kegunaan dari kuisisioner ini Ronny Hanitijo Soemitro<sup>10</sup>, mengemukakan bahwa dengan memperoleh suatu gambaran melalui penggunaan kuisisioner, peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai suatu gejala, mampu untuk menjelaskan mengenai gejala tersebut bahkan dapat membuat prediksi-prediksi.

Segala informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak bantuan hukum dalam praktek peradilan pidana digali dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses peradilan pidana, yaitu : Polisi, Jaksa , Hakim, Penasihat Hukum, serta tersangka/terdakwa/terpidana. Besarnya jumlah responden tidak terlalu dipermasalahkan, yang penting bisa diperoleh data yang dianggap cukup bagi peneliti.

Studi yang menyangkut pelaksanaan hak bantuan hukum dalam rangka mendukung sistem peradilan pidana terpadu ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta guna mendapatkan gambaran apakah proses peradilan pidana sudah dilakukan dengan memanfaatkan kerjasama secara terpadu antara penasihat hukum dengan sub-subsistem lain dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>10</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 62.

### 3. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dititikberatkan pada analisis secara kualitatif. Namun demikian tidak menutup kemungkinan disajikannya data kuantitatif sejauh hal itu diperlukan guna mendukung analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif analitis yang diperdalam dengan analisis historis dan komparatif.

### F. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam konsep penegakan hukum, telah berkembang kesepakatan-kesepakatan dan penegasan-penegasan yang antara lain perlu dikembangkannya sistem peradilan pidana yang terpadu sebagai model sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana terpadu tersebut mencakup sub-subsistem kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi. Di samping itu mengingat peranannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat pula dimasukkan sebagai subsistem.<sup>8</sup> Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem peradilan yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Menempatkan penasihat hukum sebagai subsistem dalam

---

<sup>8</sup>Muladi, Op.Cit.

sistem peradilan pidana sejajar dengan sub-subsistem yang lain memiliki arti yang sangat penting yaitu di samping untuk kepentingan perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa selama dalam proses pemeriksaan juga untuk membantu kelancaran proses peradilan pidana itu sendiri. Hal ini dimungkinkan jika hak untuk memperoleh bantuan hukum tersebut diberikan pengaturan yang memadai dan dapat difungsionalisasikan secara optimal dengan berlandaskan pada kerjasama secara terpadu antara penasihat hukum dengan sub-subsistem lain dalam sistem peradilan pidana.

#### G. Sistematika Uraian

Keseluruhan tesis ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Bab I merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika uraian.

Bab II mengemukakan tinjauan pustaka dan terdiri dari pengertian bantuan hukum, pengertian dan konsep sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia, dan arti penting bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam Bab III dikemukakan mengenai analisis dan penemuan-penemuan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam bagian ini dibagi menjadi tiga sub

bab yaitu analisis ketentuan bantuan hukum menurut KUHP dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan penegakkan hak bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa, serta pelaksanaan hak bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Uraian mengenai pelaksanaan hak bantuan hukum dalam proses peradilan pidana ini didasarkan pada penelitian lapangan, sehingga dalam hal ini dikemukakan mengenai pelaksanaan hak bantuan hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun di tingkat pengadilan.

Bab IV yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian penulisan tesis ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dikemukakan baik kesimpulan umum maupun kesimpulan khusus dan selanjutnya saran yang diajukan didasarkan pada keseluruhan analisis yang telah dikemukakan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dapat dikatakan masih merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Seperti telah dikatakan di muka bahwa konsep bantuan hukum pada awalnya berasal dari negara-negara Barat. Di negara-negara maju istilah bantuan hukum dipergunakan dalam dua arti yaitu "legal aid" dan "legal assistances". Di samping kedua istilah tersebut dikenal juga istilah " legal services ".<sup>1</sup>

Terminologi legal aid dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam makna yang sempit yaitu berupa jasa bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara. Dalam konsep legal aid ini motivasi utamanya adalah menegakan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum. Konsep legal asistances mengandung arti yang lebih luas daripada legal aid, sebab di samping memberi jasa bantuan hukum kepada rakyat miskin secara cuma-cuma, juga memberi jasa bantuan hukum kepada mereka yang mampu membayar prestasi. Sementara itu konsep legal

---

<sup>1</sup>Dikutip dari Abdurrahman, Op. Cit. hal. 116.

services mempunyai makna pemberian bantuan hukum yang mencakup usaha-usaha seperti bantuan hukum untuk menjaga agar hak-hak yang telah diakui oleh hukum tetap dihormati, usaha agar kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan orang miskin dapat dilaksanakan secara lebih positif sehingga dapat mengeliminasi kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan hukum, usaha-usaha untuk mendayagunakan cara-cara penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian dan sebagainya.

Sebagai perbandingan, berikut ini dikutipkan beberapa rumusan tentang bantuan hukum antara lain :

#### 1. The International Legal Aid

" The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the Courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources ".<sup>2</sup>

#### 2. The Legal Aid Act Inggris 1974

" It gives persons of moderate desposable income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceedings before justices and also legal aid and advice in non litigations matters ".<sup>3</sup>

#### 3. Roberto Conception

" Legal aid is the expression commonly used to refer to any form of legal service offered or rendered. It may consist of information imparted or opinion given on the rights, duties, and responsibilities of a party under the law, in respect of a particular situation, dispute, litigation or proceeding, which may be judicial, quasi judicial, administrative or otherwise."<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ibid. halaman 116-117.

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup>Ibid.

#### 4. Clerence/Dies

" Legal aid adalah meliputi segala bentuk pemberian pelayanan oleh profesi hukum kepada warga masyarakat dengan maksud untuk memberikan jaminan agar tidak seorangpun dalam masyarakat yang akan diperkosa haknya untuk memperoleh nasehat dan bantuan hukum yang diperlukannya atau kalau perlu juga untuk mendapatkan seorang kuasa yang akan membela kepentingannya di muka pengadilan hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup ".<sup>5</sup>

#### 5. Rancangan Undang-Undang tentang Pemberi Bantuan Hukum

" Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasihat hukum di luar pengadilan ".<sup>6</sup>

Jadi menurut RUU tentang Pemberi Bantuan Hukum tersebut, pengertian bantuan hukum meliputi :

1. Memberi nasihat hukum di luar pengadilan;
2. Mewakili dan atau mendampingi seseorang di muka pengadilan dalam perkara perdata;
3. Membela seseorang dalam perkara pidana.

Demikianlah beberapa rumusan mengenai bantuan hukum (legal aid) yang sengaja dikutipkan sebagai bahan perbandingan. Memperhatikan beberapa rumusan di atas, maka tampak istilah bantuan hukum ternyata bisa memiliki arti yang beragam. Namun demikian apapun perumusannya, bantuan hukum tersebut pada dasarnya ditujukan kepada usaha untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

---

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Pasal 1 huruf a RUU tentang Pemberi Bantuan Hukum yang diajukan ke Sekkab. Tgl. 12-02-1979.



## 1. Bantuan Hukum Dalam Perspektif Perkembangan Internasional Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia secara internasional telah mendapat perhatian yang memadai sejak dikukuhkannya UN Universal Declaration of Human Rights (UDHR) di Paris pada tahun 1948.

Dalam UDHR inilah, dunia internasional pertama kali memberikan jaminan adanya access to legal counsel sebagai bagian dari hak asasi manusia dimana setiap orang yang dituntut dihadapan hukum berhak didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum. Dalam hal terjadi perselisihan antara seorang yang mampu dan yang tidak mampu maka si miskin dapat memperoleh keadilan melalui pembelaan dari seorang pembela umum (public defender) melawan si kaya yang dibela advokat profesional.<sup>7</sup>

Eksistensi institusi bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, di mana prinsip "rule of law" ditegakkan. Pene-gasan tentang prinsip persamaan di depan hukum juga telah dijamin dalam Pasal 6 Universal Declaration of Human Rights yang menyebutkan :

" Everyone has the right to recognition every where as a person before the law ".

---

<sup>7</sup>Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 29.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, disebutkan bahwa :

" All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination ".<sup>8</sup>

Sering dikatakan bahwa UDHR ini bukanlah suatu "treaty" (perjanjian internasional) karena tidak dimaksudkan untuk mengikat secara hukum (legally binding obligations) negara-negara anggota PBB. Kewajiban negara anggota mentaati UDHR hanya bersifat moral (moral obligations), Oleh karena itu kemudian PBB berusaha mencari beberapa landasan yuridis, dengan maksud agar naskah tersebut dapat mengikat seluruh negara di dunia. Delapan belas tahun kemudian lahirlah dua Covenant yaitu Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Perjanjian Internasional mengenai Hak Asasi Manusia di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Covenant on Civil and Political Rights (Perjanjian Internasional mengenai Hak Asasi Manusia di Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara). Khusus terhadap Covenant yang disebut terakhir ini telah dilengkapi dengan sebuah Optional Protocol untuk mengatur proses penegakan dan pelaporannya melalui the Human Rights Committee PBB.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ibid. hal. 30.

<sup>9</sup>Saafroedin Bahar, Hak Asasi Manusia (Analisis Komnas HAM dan Jajaran HANKAM/ABRI). Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996. hal. 8.

Seperti diketahui bahwa di samping memiliki lembaga-lembaga utama seperti Sidang Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Dewan Ekonomi dan Sosial yang juga menangani masalah HAM ini, PBB juga membentuk badan-badan khusus untuk memantau dan melindungi HAM, seperti :

- a. The Human Rights Commission (Komisi Hak Asasi Manusia) yang dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial;
- b. The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Komisi Penghapusan Diskriminasi Rasial);
- c. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita);
- d. The Committee on Economic Social and Cultural Rights (Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- e. The Committee against Torture (Komisi menentang Penyiksaan).
- f. The High Level Commission on Sustainable Development (Komisi Tingkat Tinggi Tentang Pembangunan Berkelanjutan).<sup>10</sup>

Seluruh komisi tersebut bekerja secara purna waktu untuk menerima, mengolah, dan jika perlu memantau kondisi perlindungan HAM secara umum maupun pada setiap negara. Dalam menunaikan tugasnya pendekatan utama yang dipergunakan oleh badan-badan tersebut adalah pendekatan persuasif,

---

<sup>10</sup>Ibid. hal. 21.

sebab badan-badan tersebut tidak mungkin dapat memaksa pemerintahan dari negara-negara yang berdaulat untuk mengubah kebijaksanaannya. Kekuatan komisi-komisi ini sesungguhnya terletak pada aspek moral serta dukungan pendapat umum sedunia, yang disiarkan secara terbuka melalui media massa.<sup>11</sup>

Substansi yang diatur dalam kedua Kovenan tersebut di atas merupakan penjabaran lebih lanjut dari UDHR yang disertai dengan perumusan tentang kewajiban bagi negara-negara peserta (state party) untuk mentaati perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan isi dari Optional Protocol adalah memberi peluang kepada Human Right Committe untuk menerima dan memeriksa pengaduan dari individu terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Covenant on Civil and Political Rights.

Negara yang menjadi peserta dalam perjanjian ini wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangnya dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan tersebut atau membuat perundang-undangan baru jika belum ada pengaturannya. Pemenuhan kewajiban ini bersifat mutlak dan segera (absolut dan immediate).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid. hal. 22.

<sup>12</sup>Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku ketiga), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga kriminologi UI, 1994. hal-6.

Keempat dokumen HAM yang telah disebutkan di atas yaitu Universal Declaration of Human Rights ; Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Covenant on Civil and Political Rights serta Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights" disebut sebagai "The International Declaration of Human Rights" yang berisi asas-asas pokok mengenai bentuk kehidupan yang disepakati dan dicita-citakan bersama oleh bangsa-bangsa beradab di dunia.

Dalam Covenant on Civil and Political Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara) tercantum mengenai jaminan terhadap hak-hak manusia perseorang-an, baik pria maupun wanita, dewasa maupun anak-anak, masyarakat, bangsa, serta kelompok-kelompok minoritas etnis, agama, ataupun bahasa yang antara lain mencakup "jaminan terhadap penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan hak atas perlindungan hukum". Dengan demikian hak atas perlindungan hukum dan jaminan terhadap penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia telah ditetapkan sebagai hak-hak dasar yang harus dilindungi.

Mengenai hak tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum, artikel 14 butir 3 huruf d dari Kovenan tersebut menegaskan bahwa :

" To be tried in his presence, and to defend him self in person or through legal assistance of his own choosing;

to be informed, if he does not have legal assistance, of his right; and to have assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it. "<sup>13</sup>

Dalam Kovenan tersebut juga tercantum prinsip "praduga tak bersalah" (presumption of innocent) seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi :

" Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law ".

Sebagai realisasi lebih lanjut dari asas-asas yang tercantum dalam "The International Declaration of Human Rights", Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selalu berusaha untuk merumuskan pelbagai instrumen internasional antara lain di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Instrumen internasional pertama yang menandai usaha PBB tersebut dihasilkan oleh Konggres I tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku tahun 1955, yang menerima dan menyetujui Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoner (ECOSOC Resolution 663 C XXIV). Instrumen ini kemudian disusul dengan instrumen-instrumen lain, baik yang merupakan pedoman-pedoman (guidelines), standar-standar maupun model treaties, yang mencakup substansi yang luas seperti kerjasama internasional, pembinaan narapidana, peradilan dan penegakan hukum, pembinaan remaja, perlindungan korban, pemidanaan, hak-hak asasi manusia dan sebagainya.

---

<sup>13</sup>. A Compilation of International Instrument Vol. I (First Part), United Nations, New York, 1993, hal 25-26.

Khusus mengenai bantuan hukum ini telah ada sebuah instrumen internasional yaitu Basic Principles on The Role of Lawyers, yang diadopsi oleh Konggres Kejahatan Kedelapan di Havana tgl. 27 Agustus sampai 7 September 1990 yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai peranan para penasihat hukum.

Prinsip dasar yang penting untuk dikemukakan dalam hal ini adalah bahwa setiap orang berhak meminta bantuan pembela yang dipilihnya untuk melindungi, menjaga hak, dan membela dirinya dalam setiap tingkatan peradilan. Pemerintah menjamin adanya prosedur yang efisien dan mekanisme yang efektif dan mempercepat akses kepada semua pembela yang bernilai sama bagi semua orang di wilayahnya tanpa perbedaan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Program-program untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam hukum dan pentingnya peran pembela di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat memperjuangkan sendiri haknya dibantu untuk memperoleh bantuan hukum secukupnya.

Dikemukakan juga bahwa orang harus segera diberitahu haknya untuk dibantu oleh pengacara yang dipilihnya untuk setiap kali penahanan atau jika telah dituduh melakukan kejahatan. Setiap orang berhak mendapatkan pembela yang handal dan sepadan dengan kasus yang dihadapinya secara cuma-cuma apabila ia tidak mampu membayar.

Dalam waktu 48 jam, seseorang yang ditahan atau dikucilkan harus sudah memiliki akses kepada pengacara. Orang-orang yang ditahan, dikucilkan, dan dipenjarakan dijamin memiliki kesempatan, waktu dan fasilitas yang cukup untuk dikunjungi, berkomunikasi dan berkonsultasi ke pengacara tanpa hambatan, penyelaan atau sensor secara rahasia. Konsultasi tersebut bisa diawasi oleh petugas penegak hukum tetapi petugas tidak boleh turut mendengarkan konsultasi tersebut.

Berkenaan dengan kualifikasi seorang pengacara disebutkan bahwa pengacara harus cukup berpendidikan, terlatih, tahu kewajiban, etika dan idealisme pengacara, serta cukup mampu menghayati hak-hak asasi serta kebebasan-kebebasan fundamental yang diakui oleh negara dan hukum internasional.

Di samping itu diatur juga mengenai jaminan fungsional bagi pengacara yang diantaranya adalah pengacara kebal terhadap hukum perdata dan hukum pidana pada waktu mengeluarkan pernyataan lisan ataupun tertulis atau dalam hal kiprahnya di pengadilan atau pemeriksaan klien. Pihak berwenang menjamin pengacara memiliki akses yang cukup kepada informasi, file, atau dokumen yang disimpannya agar dapat bekerja dengan baik.

Pengacara memiliki hak kebebasan mengeluarkan ekspresi berasosiasi dan berkumpul. Mereka juga berhak untuk berkumpul dan membentuk organisasi baik nasional maupun internasional serta menghadiri pertemuan-pertemuan



tanpa pembatasan-pembatasan profesional. Di dalam menggunakan haknya tersebut, pengacara harus berpegang pada hukum dan standar-standar profesi yang ada.

Disebutkan juga bahwa pengacara berhak membentuk asosiasi profesional yang mandiri untuk memperjuangkan kepentingannya, melanjutkan pendidikan dan training profesional mereka, serta melindungi integritas untuk menjamin akses yang efektif dan tidak memihak terhadap fasilitas penegakkan hukum apapun serta tanpa campur tangan pihak lain dalam menjalankan konsultasi dan memberi bantuan kepada kliennya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia ternyata telah mendapat dukungan internasional yang mantap. Kenyataan tersebut tercermin baik dalam UDHR, International Covenant Civil and Political Rights dan dalam instrumen internasional yang berupa Basic Principles On The Role of Lawyers. Bagi Indonesia meskipun istilah bantuan hukum tersebut masih relatif baru, namun prinsip-prinsip dasar yang melandasi eksistensi bantuan hukum tersebut secara yuridis konstitusional sudah tidak diragukan lagi. Hal ini bisa dibaca dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ini selaras dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 6 UDHR seperti telah dikutip di atas. Sedangkan prinsip praduga tidak bersalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Covenant on Civil and Political Rights, dalam hukum positif di Indonesia telah tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang UUPKK yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Beberapa prinsip dasar yang terdapat dalam Basic Principles on The Role of Lawyers seperti yang telah dipaparkan di atas sebagian juga sudah tercantum di dalam UUPKK maupun KUHP sebagai penjabarannya. Dengan demikian apabila dilihat dari segi asas-asas hukum yang melandasi pentingnya mendayagunakan bantuan hukum sebagai bagian dari HAM, maka baik dalam konstitusi maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia sudah tidak mengandung pertentangan dengan kecenderungan internasional selama ini.

## 2. Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, telah dikenal dua tahap perkembangan bantuan hukum dalam perkara pidana. Tahap pertama adalah bantuan hukum yang diatur dalam HIR

yang masih bersifat terbatas karena hanya memperkenalkan bantuan hukum kepada terdakwa di depan pengadilan. Demikian juga kewajiban bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasihat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam hukuman mati. Kedua adalah masa Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam UUPKK ini ketentuan mengenai bantuan hukum diatur secara lebih luas jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam HIR. Di dalam UUPKK ini dijumpai suatu bab khusus yang memuat ketentuan mengenai bantuan hukum yaitu dalam Bab VII, yang terdiri dari pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Bunyi selengkapnya dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 35 : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Penjelasan dari Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Merupakan suatu asas yang penting bahwa seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena wajib diberi perlindungan sewajarnya.

Perlu diingat juga ketentuan dalam pasal 8, dimana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Karena kepentingannya maka supaya diadakan Undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum.

Sebagai catatan bahwa Undang-undang tentang bantuan hukum yang dimaksud oleh pasal di atas sampai sekarang belum juga terwujud.

Pasal 36 : Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasihat Hukum.

Penjelasan dari Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Sesuai dengan sila Perikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah.

Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasihat hukumnya terutama sejak ia ditangkap / ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan.

Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Pasal 37 : Dalam memberikan bantuan hukum tersebut pada pasal 36 tersebut, penasihat hukum membantu kelancaran penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, Hukum dan Keadilan.

Penjelasan Pasal 37 : cukup jelas.

Pasal 38 : Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 38 : cukup jelas.

Berdasarkan beberapa ketentuan mengenai bantuan hukum yang telah diatur dalam UU No. 14

Tahun 1970 tersebut, Yahya Harahap<sup>14</sup> menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal. 365

1. UU No. 14 Tahun 1970 telah menetapkan hak bagi setiap orang yang terkena urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum.

Ketentuan ini memperlihatkan asas bantuan hukum memang telah diakui sebagai hal yang penting, seperti yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 35. Namun UU No. 14 Tahun 1970 belum juga sampai kepada taraf yang meletakkan asas wajib memperoleh bantuan hukum. Masih berharap asas "hak" mendapatkan bantuan hukum.

2. Namun sekalipun asas memperoleh bantuan hukum bagi orang yang tersangkut perkara baru merupakan hak, akan tetapi hak memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana :

- Telah dibenarkan memperoleh bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.
- Tetapi sifat hak memperoleh bantuan hukum pada taraf penangkapan atau penahanan, baru bersifat "hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum".
- Bagaimana cara menghubungi dan cara meminta bantuan penasihat hukum, UU No. 14 Tahun 1970 belum mengaturnya.

Menurut penjelasan Pasal 36 sebagaimana dikutip di atas tampak bahwa substansi yang tersurat, hanyalah mengatur tentang hal yang sifatnya umum saja dan belum menjangkau tentang tata cara hubungan dan permintaan bantuan penasihat hukum. Dari penjelasan Pasal 36 di atas, terutama pada alinea terakhir ditegaskan bahwa hubungan dan pengawasan antara tersangka/ terdakwa dengan penasihat hukum

akan diatur lebih lanjut dalam hukum acara pidana. Hal ini dipertegas dengan Pasal 38 seperti yang telah dikutip di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa ketentuan mengenai bantuan hukum yang tercantum dalam BAB VII Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, baru merupakan landasan dan asas umum, dan belum mengatur tentang tata cara pelaksanaannya.

Namun dengan adanya aturan umum yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1970 tersebut, dalam praktek telah memberikan rangsangan-rangsangan khususnya bagi kalangan profesi hukum dan kalangan lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan lembaga-lembaga bantuan hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan hukum dengan menitik beratkan pada konsep dan program bantuan hukum kearah :

- Pelayanan hukum bagi rakyat miskin dengan jalan memberi bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis.
- Menyadarkan hak-hak asasi manusia khususnya bagi mereka yang buta hukum, dalam rangka penegakan hukum yang mempunyai komitmen pada perlindungan hak-hak asasi manusia dan harkat martabat manusia sebagai sendi utama penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ibid. hal. 366.

Memperhatikan beberapa ketentuan mengenai bantuan hukum yang ada dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka hal terpenting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa bantuan hukum sudah dapat diperoleh oleh tersangka sejak adanya penangkapan atau penahanan. Dengan demikian jika dibandingkan dengan HIR, hal ini sudah merupakan suatu perkembangan kearah kemajuan, dipandang dari sudut perkembangan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kenyataannya keadaan tersebut terus berkembang dan berpuncak pada diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

Jaminan perlindungan hak asasi seseorang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 diberikan secara lebih luas dan secara implisit terdapat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Bab V tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat;

Bab VII tentang Bantuan Hukum;

Bab X tentang Praperadilan;

Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Dalam hubungannya dengan masalah bantuan hukum dan akses penasihat hukum dalam proses peradilan pidana, di samping diatur dalam ketentuan mengenai bantuan hukum, juga ditentukan dalam beberapa pasal dalam bab VI

tentang Tersangka dan Terdakwa; Bab XIV tentang Penyidikan. Berikut ini dikutipkan secara lengkap bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

Bab V. Tentang Tersangka dan Terdakwa ; mulai dari Pasal 54-57; dan Pasal 60-62.

Pasal 54 KUHAP berbunyi :

Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 54 KUHAP : Cukup jelas.

Pasal 55 KUHAP berbunyi :

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Penjelasan Pasal 55 KUHAP : Cukup jelas.

Pasal 56 KUHAP berbunyi :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Penjelasan dari Pasal 56 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21



ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukkan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

(2) Cukup jelas.

Pasal 57 KUHAP berbunyi :

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Penjelasan Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 60 KUHAP berbunyi :

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Penjelasan Pasal 60 menyatakan cukup jelas.

Pasal 61 KUHAP berbunyi :

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya meng- hubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Penjelasan Pasal 61 : cukup jelas.

Pasal 62 KUHAP berbunyi :

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

Penjelasan Pasal 62 ini juga menyatakan cukup jelas.

Bab VII. Tentang Bantuan Hukum ; mulai dari Pasal 69 sampai dengan 74.

Pasal 69 KUHAP berbunyi :

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 69 : Cukup jelas.

Pasal 70 KUHAP berbunyi :

- (1) Penasihat hukum yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.

Penjelasan Pasal 70 : Cukup jelas.

Pasal 71 KUHAP berbunyi :

- (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Penjelasan Pasal 71 : Cukup jelas.

Pasal 72 KUHAP berbunyi :

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberi turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Penjelasan Pasal 72 KUHAP adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pembelaannya" ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan "turunan" ialah dapat berupa foto copy.

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka.

Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim.

Pasal 73 KUHAP berbunyi :

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Penjelasan Pasal 72 KUHAP adalah sebagai berikut :

Apabila terbukti ada penyalahgunaan dalam pasal ini diberlakukan ketentuan pasal 70 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 74 KUHAP berbunyi :

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum sebagai tersebut pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Penjelasan Pasal 72 KUHAP : Cukup jelas.

Bab XIV. Tentang Penyidikan, yaitu pasal 114 dan 115

Pasal 114 KUHAP berbunyi :

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagai dimaksud pasal 56.

Penjelasan Pasal 72 KUHAP adalah sebagai berikut :

Untuk menjunjung tinggi hak asasi, maka sejak dalam tarafpenyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi Penasihat Hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 115 KUHAP berbunyi :

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Penjelasan Pasal 115 ayat (1) menyatakan bahwa penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. Sedangkan penjelasan ayat (2) menyatakan cukup jelas.

Mengamati beberapa ketentuan mengenai bantuan hukum baik yang terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, beberapa hal penting bisa dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, bahwa hak bantuan hukum sudah dijamin oleh Undang-undang sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Jadi sejak dimulainya pemeriksaan pendahuluan, dan bukan hanya di depan persidangan seperti pada masa berlakunya HIR.

Kedua, sebelum penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, ia harus memberitahukan adanya hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

Ketiga, pejabat penegak hukum, pada semua tingkat pemeriksaan, wajib menunjuk penasihat hukum, dalam hal seseorang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, lima belas tahun atau lebih. Kewajiban menunjuk penasihat hukum juga ditujukan kepada tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, apabila mereka dalam keadaan tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri. Pengacara yang ditunjuk dalam hal ini harus memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Keempat, terdapat hubungan pengawasan atau kontrol terhadap penasihat hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam UUPKK dan KUHP telah terdapat isyarat-isyarat yang mengharuskan dilakukannya hubungan kerjasama secara terpadu khususnya antara penasihat hukum dengan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam rangka menjamin terealisasinya hak menghubungi dan meminta bantuan hukum yang dimiliki oleh tersangka.

Selanjutnya perlu pula diketahui siapa-siapa yang berhak memberikan bantuan hukum di Indonesia dewasa ini. Secara singkat bisa dikatakan bahwa yang melakukan bantuan hukum di Indonesia dewasa ini adalah mereka yang berprofesi sebagai penasihat hukum. Istilah penasihat hukum ini merupakan istilah baru, akan tetapi telah dibakukan sebagai istilah resmi. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1 angka 13 KUHAP dan juga sesuai dengan penjelasan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa sesudah berakhirnya masa peralihan KUHAP tanggal 31 Desember 1983, sebutan resmi dalam persidangan pidana bagi pengacara, advokat, pokrol adalah penasihat hukum.<sup>16</sup>

Sebelum istilah penasihat hukum dibakukan sebagai istilah resmi, telah dikenal berbagai istilah untuk menyebut mereka yang melakukan pekerjaan memberikan bantuan hukum ini, seperti pembela, advokat, procureur (Pokrol) dan pengacara. Istilah pembela dipakai sebagai istilah sehari-hari bagi semua yang melakukan bantuan hukum dalam proses peradilan, termasuk advokat procureur dan pengacara.

Pengangkatan advokat didasarkan pada Reglement op de Rechthterlijke Organisatie en het beleid der Justitie disingkat RO (Stlb. 1848 Nomor 57). Menurut Pasal 186 RO tersebut advokat yang merangkap procureur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal, yang mestinya menurut

---

<sup>16</sup>H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Sinar Grafika, Jakarta, 1991 hal. 134.

Andi Hamzah sekarang dibaca "Presiden", yang prakteknya dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman. Adapun persyaratan pengangkatan itu adalah warga "Hindia Belanda" yang menurut Andi Hamzah mestinya sekarang dibaca warga negara Indonesia dan berijazah Sarjana Hukum (dahulu Meester in de rechten) atau doktor dalam ilmu hukum. Disebut juga di sini procureur yang umumnya sama saja dengan advokat, hanya saja procureur ini dimaksudkan agar beracara dalam bidang perdata, karena pada umumnya yang berperkara bukan ahli hukum, sehingga perlu diwakili oleh orang yang ahli di bidang hukum.

Dalam hal ini Subekti menyimpulkan perbedaan antara advokat dan procureur, yaitu bahwa seorang advokat adalah seorang pembela dan penasihat hukum, sedangkan seorang procureur adalah seorang ahli dalam hukum acara perdata, yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara kepada pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.<sup>17</sup>

Selanjutnya perlu pula disebut istilah pengacara yang diwaktu-waktu yang lalu dilakukan oleh orang yang bukan berijazah sarjana hukum. Mereka ini sering menyebut diri pengacara, pembela, atau pokrol meminjam istilah procureur. Mereka ini sering mendapat nama ejekan "pokrol bambu" (Bush Lawyers)<sup>18</sup>.

---

17. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1982, hal. 13.

18. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia Untuk Fakultas Hukum, PT. Arikha Media Cipta, Jakarta, 1996, hal. 106.

Perlu pula dikemukakan di sini bahwa meskipun istilah penasihat hukum adalah istilah resmi dan baku, namun dalam praktek masih juga dikenal istilah advokat, pengacara praktek, pengacara yang sedikit banyak bagi orang awam hal itu sangat membingungkan. Dalam perundang-undangan ternyata juga digunakan istilah yang beraneka ragam itu. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menggunakan istilah penasihat hukum, Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara praktek, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI Nomor. KMA/005/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum, menggunakan istilah penasihat hukum, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menggunakan istilah penasihat hukum, IKADIN dan AAI menggunakan istilah Advokat, sedangkan IPHI menggunakan istilah penasihat hukum. Demikian juga Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menggunakan istilah penasihat hukum. Istilah mana yang dianggap paling tepat, dalam praktek hal itu ternyata tidak terlalu dirisaukan, mungkin karena masing-masing istilah tersebut memang memiliki dasar hukum.

Dalam praktek untuk bisa memiliki surat izin beraacara di pengadilan harus melalui seleksi yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi setempat. Oleh karena itu dalam praktek yang lebih dikenal adalah istilah yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi yaitu Advokat dan Pengacara Praktek.



Kedua istilah tersebut bukan sekedar berbeda istilah, tetapi juga memiliki perbedaan dalam hal pengangkatannya. Advokat diangkat berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia, sedangkan untuk pengacara praktek diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat dan mempunyai wilayah kerja di daerah hukum Pengadilan Tinggi dimana Pengacara Praktek yang bersangkutan diangkat.

Mengenai persyaratan untuk menjadi Advokat atau Pengacara Praktek disamping harus memenuhi persyaratan administrasi, juga melalui suatu seleksi yang berupa ujian tertulis. Di samping itu sebelumnya harus terlebih dahulu lulus ujian kode etik yang juga diadakan oleh Pengadilan Tinggi. Menurut Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 160/Td. TUN/IX/1994, Kepada : Ketua pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, mengenai : Pengangkatan penasihat hukum (Pengacara dan Pengacara Praktek) tanggal 17 September 1994 pada pokoknya dinyatakan bahwa seorang Advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Pengacara Praktek diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi setelah mereka lulus ujian yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi setempat. Adapun mata ujian tersebut meliputi :

- a. Hukum perdata tertulis meliputi hukum dagang;
- b. Hukum pidana meliputi hukum pidana militer;
- c. Hukum adat meliputi hukum waris dan hukum agraria;
- d. Hukum perkawinan Islam, waris, dan wakaf.
- e. Asas-asas hukum tata usaha negara;

- f. Hukum acara perdata;
- g. Hukum acara pidana meliputi hukum acara pidana militer;
- h. Hukum acara peradilan agama;
- i. Hukum acara peradilan tata usaha negara.

Pengacara praktek diusulkan oleh ketua pengadilan tinggi setempat atas permohonan yang bersangkutan kepada Menteri Kehakiman untuk diangkat menjadi pengacara (Advokat). Untuk menjalankan praktek di pengadilan-pengadilan baik Advokat maupun pengacara praktek diwajibkan oleh Pengadilan Tinggi setempat memiliki surat tanda wajib praktek yang berlaku selama dua tahun, yang setiap kali dapat diperpanjang dengan membayar biaya administrasi.

Demikian sebagai gambaran tentang profesi penasihat hukum (Advokat dan Pengacara Praktek) yang ada di Indonesia sampai saat ini. Adapun mekanisme pengawasan terhadap para penasihat hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah seperti diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 36 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris. Sedangkan mekanisme pengawasannya diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/005/SKB/VII/1987 tentang Tata cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum.

Dalam SKB tersebut antara lain diatur bahwa pengawasan sehari-hari atas para penasihat hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman (Pasal 2 ayat 1). Sedangkan bentuk tindakan yang dapat dikenakan terhadap para penasihat hukum adalah berupa : teguran dengan lisan atau tertulis, peringatan keras dengan suara, pemberhentian sementara dari jabatannya selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, pemberhentian sementara lebih dari 6 (enam) bulan, dan pemberhentian dari jabatannya sebagai penasihat hukum (Pasal 4 SKB).

## **B. Pengertian Dan Konsep Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Proses yang bekerja secara berurutan itu pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan sub sistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara

satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau sub sistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey bahwa :

" Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships between Police and Prosecution, Police and Court Prosecution and Corections, Corections and Law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and in effectiveness."<sup>19</sup>

Jadi fragmentasi dalam arti masing-masing subsistem bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan antar hubungan diantara sub-subsistem yang ada harus dihindari bilamana diinginkan suatu sistem peradilan pidana yang efektif. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan konsep "Integrated Approach" dari Hiroshi Ishikawa<sup>20</sup>, yang antara lain menegaskan bahwa komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (diversity), tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (unity) yang saling mengikat. Hiroshi Ishikawa dalam hal ini menyatakan bahwa :

---

<sup>19</sup>.Alan Coffey, An Introduction To The Criminal Justice and Process, dikutip dari M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991. hal 25.

<sup>20</sup>.Hiroshi Ishikawa, An Integrated Approach to more effective Administration of Criminal Justice, dikutip dari M. Faal, Ibid hal 26.

" Criminal justice agencies including the police prosecution, judiciary institutional and non institutional correction should be compared with a chain of gears, and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other. "

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "criminal justice science" di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (system approach) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama "Criminal Justice System". Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh The President's Crime Commission.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme), Bina Cipta, Bandung, 1996. hal 8.

Diagram skematik "Criminal Justice System" telah disusun oleh The Commission's Task Force on Science and Technology di bawah pimpinan Alfred Blumstein. Sebagai ahli manajemen, Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu, dalam penanganan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.<sup>22</sup>

Menurut Kadish, pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen, dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan ketiganya saling mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.<sup>23</sup> Sementara itu Geoffrey Hazard Jr. juga mengemukakan adanya tiga pendekatan dalam sistem peradilan pidana yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Ibid. hal. 9.

<sup>23</sup>Ibid. hal. 16.

<sup>24</sup>Ibid. hal. 17-18.

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

## 2. Model-Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana

Di Amerika Serikat, berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. Perlu dijelaskan di sini bahwa penggunaan model ini bukanlah sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut oleh suatu negara, akan tetapi merupakan suatu sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek

peradilan pidana di berbagai negara. Pemahaman tentang model penyelenggaraan peradilan pidana, khususnya di Amerika Serikat, diperkenalkan oleh Herbert. L. Packer. Berdasarkan pengamatannya, dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (two models of the criminal process), yaitu Due Process Model dan Crime Control Model.<sup>25</sup>

Kedua model di atas dilandasi oleh pemikiran adversary model (model perlawanan) yang berintikan sebagai berikut :

- a. Prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu "disputes" atau "combative proceeding" antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan.
- b. Judge as umpire, dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam "pertempuran" (fight) dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar aturan permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum ;

---

<sup>25</sup>Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanction, California, Stanford University Press, 1968, hal. 153.



- c. Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan terjadinya kejahatan;
- d. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan. Peranan terdakwa adalah menolak atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Terdakwa bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut.

The Crime Control Model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (criminal conduct), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (public order) dan efisiensi.<sup>26</sup> Proses kriminal pada hakikatnya merupakan perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Di sini berlakulah apa yang disebut sebagai "presumption of guilt" dan "sarana cepat" dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya

---

<sup>26</sup>John Griffith, Ideology in Criminal Procedure or A Third "Models of the Criminal Process, dikutip dari Ansorie Sabuan dkk, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 6.

terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi. Oleh karena itu muncullah model yang kedua yang disebut Due Process Model.

Di dalam Due Process Model ini muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan, yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlaku prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).

Kedua model yang diperkenalkan oleh Packer di atas, didasarkan pada pemikiran mengenai hubungan antara negara dan individu dalam proses kriminal yang menempatkan pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat (*enemy of the society*), sedangkan tujuan utama dari pemidanaan adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat (*exile function of punishment*). Menurut John Griffiths kedua model tersebut secara filosofis berlandaskan pada model peperangan (*Battle Model*) serta pertentangan antara negara dan individu yang tidak dapat dipertemukan kembali (*irreconcilable disharmony of interest*) sehingga jika terjadi kejahatan, maka terhadap si pelaku harus segera diproses dengan menempatkannya sebagai obyek di dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai reaksi terhadap kedua model yang diajukan oleh Packer tersebut, kemudian Griffiths memperkenalkan model yang ketiga yang oleh Griffiths disebut sebagai Family Model atau model kekeluargaan.

Menurut Family Model ini, tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa diselaraskan. Filsafat yang mendasari model ini adalah kasih sayang sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (mutually supportive and a state of love).

Selanjutnya dikatakan oleh Griffiths, bahwa setiap kehidupan dalam masyarakat hendaknya selalu dilandasi oleh kasih sayang yang berlanjut sebagaimana yang ada pada keluarga kecil. Di dalam keluarga misalnya bila terjadi kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak, kita tidak boleh menyebut si anak tersebut adalah jahat. Sanksi pidana dalam hal ini tidak berfungsi untuk mengasingkan, tetapi untuk pengembalian kapasitas pengendalian diri (capacity for self-control).

Salah satu negara yang disebut-sebut menganut Family Model ini adalah negeri Belanda.<sup>27</sup> Hal ini dibuktikan dengan kurang ditonjolkannya pidana perampasan kemerdekaan, tetapi yang lebih dipentingkan adalah sarana non institutional. Bukti lain yang dikemukakan di sini adalah bahwa di negara Belanda telah berkembang secara meluas lembaga

---

<sup>27</sup>Hulsman, The Dutch Criminal Justice System From Comparative Legal Perspective, dikutip dari Ansorie Sabuan dkk. Ibid. hal. 7.

pelayanan sosial, yang tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga yang bersifat non finansial, berkembangnya pusat-pusat kegiatan remaja yang dibina secara baik oleh pemerintah dan swasta, banyaknya pekerja sosial yang terlibat di dalam lembaga sosial, mass media yang mendukung secara positif model kekeluargaan tersebut dan memberitakan secara selektif segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan pidana dan sebagainya.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan model-model sistem peradilan pidana yang dikemukakan di atas, Muladi mengemukakan pandangannya sebagai berikut :

Crime Control Model : tidak cocok karena model ini berpandangan bahwa tindakan yang bersifat represif sebagai yang terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana;

Due Process Model : tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat "anti-authoritarian values";

Model Family atau "Family Model" dari John Griffiths : kurang memadai karena terlalu "offender oriented" karena masih terdapat korban (victim) yang juga memerlukan perhatian serius.

---

<sup>28</sup>Lihat Ansorie Sabuan dkk. Ibid. hal. 8.

Di samping ketiga model sistem peradilan pidana yang telah diuraikan di atas, dalam perkembangannya sekarang ini terdapat berbagai usaha untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Menurut Muladi<sup>29</sup>, makna integrated criminal justice system ini adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

1. Sinkronisasi struktural (structural synchronization)
2. Sinkronisasi substansial (substantial synchronization)
3. Sinkronisasi kultural (cultural synchronization)

Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka antar-lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dalam model sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerja sama dan terikat pada satu tujuan yang sama.

---

<sup>29</sup>Muladi Op. Cit. hal. 1-2.

Hal ini bisa terjadi jika didukung dengan perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif. Pengaturan hukum yang tidak memberikan jaminan hubungan antara subsistem seperti disebutkan di atas, akan menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum dan mengarah pada "instansi-sentris" yang sangat tidak memungkinkan bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu.

Model terpadu (integrated model) dalam penyelenggaraan peradilan pidana dapat dikaji dalam sistem peradilan pidana di Jepang yang memiliki karakteristik : (a) adanya sistem pendidikan yang memadai dari para penegak hukum yang memungkinkan mereka memiliki pandangan yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Seleksi untuk menjadi hakim, jaksa, dan pengacara dalam penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan oleh organisasi pengacara di Jepang dan setelah mereka lulus, kemudian masuk dalam pendidikan yang sama yang dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung Jepang; (b) para penegak hukum profesional yang dicapai melalui pelatihan yang baik dengan disiplin yang tinggi, serta terorganisir dengan baik; (c) tujuan yang ingin dicapai adalah apa yang disebut sebagai "precise justice" atau keadilan yang pas (tepat). Konsep precise justice ini tampaknya merupakan kritik orang Jepang terhadap model peradilan di Amerika Serikat yang menurutnya hanya mengejar apa yang disebut sebagai layman justice (keadilan orang-orang awam); (d) adanya partisipasi masyarakat yang tinggi sebagai akibat

tingkat profesionalisasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Jepang.

### C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dari berbagai model penyelenggaraan peradilan Pidana seperti diuraikan di atas, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa di Indonesia ada kecenderungan menganut gabungan dari model-model tersebut diatas. Di pihak lain ada juga pendapat bahwa di Indonesia menganut apa yang disebut sebagai integrated model. Pendapat yang menyatakan bahwa di Indonesia menganut sistem gabungan didasarkan pada pengamatan misalnya dalam proses pemeriksaan perkara, dimana pada tahap pendahuluan, kadang-kadang ditonjolkan efisiensi yang tercermin dalam praktek seringnya polisi "memaksa" tersangka untuk mengakui perbuatannya. Demikian juga dalam persidangan di pengadilan yang bercirikan accusatoir dimana terlihat adanya fight atau battle antara kedua belah pihak yaitu jaksa selaku penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Penonjolan efisiensi dalam penyelenggaraan peradilan pidana mengingatkan pada Crime Control Model, juga adanya fight antara penuntut umum dan terdakwa, dalam proses peradilan di pengadilan. Hanya saja dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peranan aktif dari hakim tampak sangat menonjol, sedangkan dalam Due Process Model, hakim betul-betul pasif karena ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar kedua belah pihak (jaksa/penuntut umum dan terdakwa) tidak melanggar

aturan-aturan yang ada dalam pengungkapan kebenaran atas suatu perkara.

Mengenai model ketiga yaitu model kekeluargaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia tampak antara lain dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lebih jelas lagi adalah apa yang tertuang di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985, tentang petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yang antara lain berisi "metode yang digunakan dalam pengawasan dan pengamatan adalah metode persuasif yang ditunjang dengan asas kekeluargaan. Di samping itu di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikatakan bahwa, didalam bidang penyidikan, sistem peradilan pidana mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan tersangka secara layak, kewajiban memberikan perlindungan, pengayoman bagi tersangka yang tidak mampu dan tidak memiliki penasihat hukum.

Selanjutnya mengenai integrated model, apabila mengacu dari pendapat Muladi yang menyatakan bahwa makna "integrated" adalah keserampakan dan keselarasan baik yang menyangkut substansi, struktur, maupun kultur, maka realita proses peradilan pidana di Indonesia tampak belum sepenuhnya mengarah pada makna integrated tersebut. Apabila dilihat dari aspek substansi yaitu perundang-undangan yang digunakan untuk mendukung berlakunya sistem peradilan pidana baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, maka tampak juga adanya kecenderungan untuk menganut Family Model (Model Kekelu-



gaan). Dalam hukum pidana substantif, hal ini terlihat misalnya dengan dicantumkannya jenis pidana non custodial (di luar lembaga) seperti pidana kerja sosial (Community Service Order) dalam Konsep KUHP, dan sebagainya.

Sepanjang menyangkut hukum pidana formil, maka sejak diundangkannya KUHP, maka ada kecenderungan untuk menganut integrated model dalam arti bahwa dalam KUHP telah diletakkan kerangka landasan untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu. Hal ini tampak dalam pengaturan mengenai hal-hal yang antara lain sebagai berikut :

# 1. Hubungan Penyidik POLRI Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu

- a. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) ;
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 Ayat (1));
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu melakukan tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri (Pasal 107 Ayat (2));
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 Ayat (3));

- e. Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 Ayat (3)).

## 2. Hubungan Penyidik POLRI Dengan Penuntut Umum

- a. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8, Pasal 14 Huruf a, Pasal 110 Ayat (1)).
- b. Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik (Pasal 14 huruf c, Pasal 24 Ayat (2)).
- c. Dalam hal penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan penyidikan tambahan (Pasal 14 huruf b, Pasal 110 Ayat (2) dan Ayat (3)).
- d. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan / pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (Pasal 109 Ayat (1)).
- e. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (Pasal 109 Ayat (2)), sebaliknya dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberikan turunan surat ketetapan kepada penyidik (Pasal 140 Ayat (2) huruf c).
- f. Penuntut umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik : (Pasal 143 Ayat (4)), demikian pula dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik (Pasal 144 Ayat (3)).

- g. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa saksi / ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang pengadilan.
- h. Konsekuensi dari huruf g di atas, penyidik memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (Pasal 207) Ayat (1) dan menyampaikan amar putusan kepada terpidana (Pasal 214 Ayat (3)).

### 3. Hubungan Penyidik dan Hakim / Pengadilan

- a. Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atas permintaan penyidik.
- b. Atas permintaan penyidik, Ketua Pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah atau penyitaan dan atau surat izin khusus pemeriksaan surat (Pasal 33 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (1) ).
- c. Penyidik wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2).
- d. Penyidik memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana (Pasal 214 Ayat (3) ).
- e. Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa (Pasal 214 Ayat (7) ).

#### 4. Hubungan Antara Pengadilan dan Jaksa di Satu Pihak dan Lembaga Pemasyarakatan di Lain Pihak

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya dalam Ayat (2), yang mengatur tentang pengawasan-pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk jelasnya kami kutip pasal yang bersangkutan sebagai berikut :

Pasal 33 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Ayat (1) .....

Ayat (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan ... oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (2) di atas adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang pengaturannya terdapat di dalam Bab XX, Pasal 277 - 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan semestinya.

Di samping itu untuk lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan lembaga kejaksaan tapi juga dengan pemasyarakatan. Pengawasan tersebut, menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan olehnya.

Di samping itu untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang terpadu, oleh Mahkamah Agung dikeluarkan SEMA No. 10 Tahun 1983 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan jangan sampai terlambat disampaikan kepada penuntut Umum. Dalam SEMA dikatakan bahwa, mengingat sering terjadinya Penetapan/Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan, di mana salinannya sering terlambat sampai di tangan penuntut umum (yang meminta permohonan perpanjangan penahanan), sehingga ketika mau dilaksanakan oleh penuntut umum ternyata terdakwa sudah dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan demi hukum. Untuk tidak mengulangi hal itu, maka ditentukanlah bahwa, paling lambat 10 hari sebelum habisnya masa penahanan pengadilan negeri sudah harus mengeluarkan penetapan perpanjangannya dan pada hari itu juga (hari penandatanganan surat penetapan itu) salinan surat tersebut sudah harus disampaikan kepada penuntut Umum dengan surat pengantar yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan di mana tempat terdakwa ditahan.

Sepanjang yang berhubungan dengan penasihat hukum bisa dikemukakan di sini bahwa berdasarkan KUHPA unsur penasihat hukum ini selalu terkait di dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Dengan demikian hubungan kerjasama antara penasihat hukum dengan pejabat peradilan pada semua tingkat pemeriksaan dalam rangka penanganan suatu perkara sebenarnya telah mendapat pengaturan yang cukup. Sayangnya dalam KUHPA tidak dilengkapi dengan ketentuan yang bisa

menjamin ditegakkannya hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa sehingga bantuan hukum tersebut bisa dinikmati secara riil dalam proses peradilan pidana.

#### D. Arti Penting Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Perkataan "terpadu" yang ditambahkan dalam istilah "sistem peradilan pidana", mengandung makna agar integrasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pidana lebih diperhatikan, sebab dalam istilah "sistem" itu sendiri sebenarnya sudah mencakup pengertian integrasi dan koordinasi. Suatu pendekatan sistem adalah pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terkait di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum, unsur-unsur tersebut lazimnya adalah : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam perkembangannya akhir-akhir ini, telah muncul suatu pemikiran pentingnya mendayagunakan peran penasihat hukum sebagai salah satu unsur yang perlu mendapat perhatian dan penggarapan yang serius.

Romli Atmasasmita<sup>30</sup> memerinci beberapa pertimbangan tentang pentingnya melibatkan komponen penasihat hukum dalam sistem peradilan terpadu sebagai berikut :

---

<sup>30</sup>Romli Atmasasmita, Op.Cit., hal. 25-26

1. Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana, dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditujukan kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima;
2. Penempatan komponen penasihat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik bagi para pencari keadilan, maupun terhadap mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan demikian membahayakan kewibawaan penegak hukum. Kode etik dan tanggung jawab profesi penasihat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat, dan sederhana;
3. Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.

Bagi pencari keadilan (tersangka atau terdakwa) hadirnya penasihat hukum yang baik dan benar akan menghindarkan kemungkinan terjadinya kekeliruan-kekeliruan dalam pemeriksaan, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekerasan-kekerasan dalam pemeriksaan, menjamin kebebasan bagi tersangka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan serta mampu

membudayakan praktek-praktek pemeriksaan yang manusiawi. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan peradilan pidana terpadu, maka kehadiran penasihat hukum adalah sebagai lembaga yang bisa menjamin agar penanganan terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana selalu dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang seharusnya dengan tetap bertumpu pada perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam hubungan ini perlu juga dikutip pendapat dari Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa terhadap pengacara dipercayakan tugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum di pengadilan tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan yang merugikan hak-hak warga negara.<sup>31</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, usaha pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum dalam proses peradilan pidana akan sangat menunjang usaha pembaharuan hukum. Hal ini dimungkinkan bilamana akses pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana dibuka seluas-luasnya dan sekaligus terdapat respek atau penghargaan yang tinggi dari komponen-komponen aparat penegak hukum yang lain. Terciptanya putusan-putusan hakim yang berbobot salah satunya bisa datang dari risalah-risalah yang berkualitas tinggi yang dibuat oleh penasihat hukum, dalam rangka penanganan suatu perkara. Seperti

---

<sup>31</sup>.Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Penerbit Alumni, Bandung, 1976, hal. 106



diketahui bahwa yurisprudensi adalah salah satu materi pembaharuan hukum yang cukup penting.

Kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu telah diletakkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Dalam KUHP telah diatur berbagai komponen yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana tersebut, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersebut masing-masing aparaturnya yang terkait di dalamnya harus selalu menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sistem yang terkait pada tujuan yang sama. Oleh karena itu keterpaduan dalam arti semangat kebersamaan dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta ini, harus benar-benar mendapat perhatian yang memadai. Di sinilah sekali lagi bisa dilihat peran dari penasihat hukum, karena penasihat hukum selalu terkait dalam setiap tahapan proses peradilan pidana tersebut. Kehadiran penasihat hukum dalam setiap tahapan proses peradilan, hemat penulis mempunyai beberapa keuntungan khususnya untuk kepentingan penyelenggaraan peradilan terpadu yaitu sebagai berikut :

- a. Penasihat hukum tersebut dapat didayagunakan sebagai pihak yang turut menjaga agar jalinan hubungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kehadiran penasihat hukum diharapkan dapat mempengaruhi penggunaan kewenangan oleh aparaturnya penegak hukum dengan sebaik-baiknya.

- b. Dalam proses peradilan pidana, unsur penasihat hukum, dapat difungsikan untuk membantu mengambil keputusan yang sebaik-baiknya atas suatu perkara pidana yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Hal ini cukup rasional mengingat dalam perspektif sistem, administrasi peradilan pidana tidak lain adalah serangkaian keputusan mengenai suatu kasus kriminal dari petugas yang berwenang dalam suatu kerangka interelasi antar aparaturnya penegak hukum.
- c. Kehadiran penasihat hukum akan mampu meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Hal ini bisa terjadi bilamana dua hal yang disebutkan di atas bisa dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka design procedure yang ditata oleh hukum acara pidana hendaknya juga diarahkan atau diorientasikan pada usaha agar semangat kebersamaan dalam menegakan hukum dan keadilan tetap terjaga. Dalam konteks Indonesia, penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro<sup>32</sup> yang mengemukakan bahwa "desain prosedur" (procedural design) sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHP terbagi menjadi tiga tahap yaitu : (a) tahap pra-ajudikasi (pra-ajudication), (b) tahap adjudikasi (ajudication), dan

---

<sup>32</sup>Mardjono Reksodiputro, Op cit. hal. 33

(c) tahap purna adjudikasi (post adjudication). Dikemukakan selanjutnya bahwa dipandang dari sudut tersangka atau terdakwa adalah penting untuk mengetahui bagaimana pembuat Undang-undang telah mendesain seluruh proses peradilan pidana ini. Urutan di atas adalah jelas, tetapi yang sering tidak jelas (tidak transparan) adalah tahap mana dari ketiga tahap tersebut yang dominan. Menurut Mardjono Rekso-diputro, suatu desain prosedur yang memberikan dominasi kepada tahap pra-ajudikasi tidak menguntungkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, sebab jika sidang pengadilan (ajudikasi) mendasarkan diri terutama pada data dan bukti yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra-ajudikasi), maka pengadilan akan sangat tergantung pada apa yang di sampaikan oleh polisi dan jaksa tentang perkara pidana tersebut. Terdakwa dan pembelanya akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bukti-bukti baru, kesaksian a de charge dan setiap pendapat terdakwa terhadap setiap peristiwa atau fakta dalam perkaranya, selalu akan dinilai oleh hakim dengan memperbandingkannya terhadap pandangan jaksa atau penuntut umum (berdasarkan pemeriksaan oleh kepolisian). Jelas kiranya menurut Mardjono, bahwa kesempatan pembelaan dalam sidang pengadilan akan sangat berkurang, apalagi pengadilan ingin melaksanakan peradilan yang "cepat dan sederhana". Kedudukan yang lemah dari terdakwa ini akan lebih terlihat lagi apabila ia tidak dibantu oleh penasihat hukum dalam sidang pengadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Mardjono Reksodiputro, Ibid. hal. 34

Perlu pula ditambahkan di sini, bahwa secara kelembagaan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki struktur organisasi sendiri-sendiri dan tanggung jawab sendiri-sendiri sesuai dengan tuntutan organisasi yang bersangkutan. Dalam kondisi yang demikian ini, maka disamping koordinasi lebih sulit juga tidak mustahil terjadi perbenturan kepentingan antar organisasi penegak hukum itu sendiri, karena masing-masing memiliki target sendiri-sendiri. Situasi ini akan lebih parah lagi bilamana para pejabat penegak hukum tersebut tidak memiliki kesadaran yang mendalam baik secara individu maupun secara kelembagaan untuk bisa memahami dan menghormati posisi dan tugas masing-masing.

Kondisi sistem peradilan pidana yang ada sekarang ini menuntut adanya semangat kebersamaan dari setiap aparat penegak hukum di dalam menunaikan tugasnya sebagai pengemban keadilan dan kebenaran. Di sinilah kemudian terkait apa yang disebut sebagai aspek kultur dalam sistem peradilan pidana, yaitu sikap-sikap dan pandangan-pandangan serta nilai-nilai yang secara keseluruhan mendasari berlakunya sistem peradilan pidana di Indonesia.

### BAB III

#### ANALISIS DAN PENEMUAN-PENEMUAN

Dalam bagian ini dibahas mengenai permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini. Ada dua hal yang dikemukakan yaitu pertama, mengenai ketentuan bantuan hukum dalam KUHP dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu. Dalam hal ini dilakukan analisis secara sistematis terhadap ketentuan bantuan hukum dalam KUHP guna mendapatkan pemahaman apakah ketentuan bantuan hukum tersebut telah memadai untuk menjamin akses penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan permasalahan kedua mengenai pelaksanaan hak bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa dalam praktek peradilan pidana yang dalam hal ini mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum kotamadya Surakarta. Dalam hal ini dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui apakah pelaksanaan hak bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa tersebut mampu mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.

Adapun yang dijadikan tolok ukur atau kriteria seberapa jauh pelaksanaan hak bantuan hukum telah mampu menunjang sistem peradilan pidana terpadu adalah bilamana hak-hak penasihat hukum dalam proses peradilan pidana bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kriteria ini didasarkan pada asumsi bahwa tanpa adanya kerjasama secara terpadu antara penasihat hukum dengan aparat penegak hukum yang lain mustahil hak-hak penasihat hukum tersebut dapat terealisasi dengan baik.

## A. Analisis Ketentuan Bantuan Hukum Menurut KUHAP Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sejak diundangkannya Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Stbl. 1941 No. 44, maka di Indonesia menganut konsepsi "integrated criminal justice system". Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP ini menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi, sebab KUHAP pada dasarnya menganut asas "diferensiasi fungsional" yang berarti ada penegasan pembagian tugas dan wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Menurut Yahya Harahap<sup>1</sup>, adanya asas diferensiasi fungsional tersebut, berarti KUHAP meletakkan asas "penjer-nihan" (clarification) dan "modifikasi" (modification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum, akan tetapi tetap dimungkinkan adanya saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakkan hukum yang saling ber-kaitan dan berkelanjutan.

Prinsip koordinasi tersebut tidak hanya berlaku diantara aparat penegak hukum (polisi, jaksa/penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat) dalam kapasitasnya selaku pejabat penegak hukum (law enforcement official),

---

<sup>1</sup>.Yahya Harahap, Op.cit. hal.43

tetapi juga dengan komponen penasihat hukum yang meskipun bukan merupakan law enforcement official, tetapi mereka bersama-sama dengan polisi, jaksa, hakim merupakan penegak hukum.<sup>2</sup>

Dalam KUHAP, komponen penasihat hukum telah diberi tempat untuk akses dalam setiap tahapan proses peradilan yaitu sejak di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian keterpaduan dalam sistem peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP secara ideal berarti juga ikut sertanya komponen penasihat hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana tersebut.

Namun mengenai hal di atas, pengaturan yang ada dalam KUHAP ternyata masih bersifat terbatas, sebab dalam KUHAP, baru diletakkan asas "hak" untuk mendapatkan bantuan hukum. Sedangkan asas "hak" dan "wajib" bantuan hukum hanya ditujukan untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Mengenai hal ini bisa disimak ketentuan Pasal 56 KUHAP yang menegaskan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

---

<sup>2</sup> Sukardjo Adidjojo, Profesi Advokat, dalam Bulletin Informasi BAHANA No.3 Tahun 1985, Hal 84.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

" Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukkan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu."

Sedangkan penjelasan ayat (2) menyatakan cukup jelas.

Pasal 56 KUHAP seperti dikutip di atas mengatur mengenai perkara pidana yang wajib mendapat bantuan hukum yaitu :

- a. Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih; dan
- b. Perkara yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Ketentuan seperti di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa tersangka dalam perkara semacam ini dapat dikenakan penahanan. Pertimbangan ini cukup logis, mengingat tersangka yang berada dalam tahanan memiliki kemungkinan menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia lebih besar dibanding dengan tersangka yang tidak dikenai penahanan. Namun disayangkan ketentuan dalam ayat (2) tersebut tidak tegas menyatakan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk itu wajib memberi bantuan hukum yang diminta.



Terhadap rumusan Pasal 56 KUHAP tersebut Bambang Widjojanto dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

" Terdapat dua hal yang menjadi dasar kelemahan dari pasal tersebut yaitu pertama, mengenai kemampuan seseorang untuk menaksir apakah dirinya mampu menyediakan penasihat hukum dan kedua tidak adanya konsekuensi atas pengabaian ketentuan ini ".<sup>3</sup>

Bila diperhatikan, bunyi Pasal 56 KUHAP tersebut memang tidak memuat sanksi apa yang bisa dikenakan, jika petugas penegak hukum dalam praktek ternyata mengabaikan ketentuan tersebut. Dibanding dengan HIR, ketentuan bantuan hukum seperti yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP di atas, sudah merupakan kemajuan, sebab menurut HIR, kemungkinan penyediaan penasihat hukum oleh negara terbatas pada perkara yang diancam hukuman mati dan kesediaan penasihat hukum yang ditunjuk. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 250 ayat (5) HIR yang menegaskan ;

Bila si terdakwa diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati dan dituduh baik dalam pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal 83 h, baik kemudian hari menyatakan kehendaknya supaya ia pada waktu persidangan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau seorang ahli hukum yang lain yang menyatakan bersedia melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan itu masih dapat juga dilakukan dengan surat keputusan yang terasing selama pemeriksaan dalam sidang belum selesai, jika tersangka menyatakan kehendak yang demikian itu juga. Akan tetapi penunjukkan telah terjadi bila pada Pengadilan Negeri itu tidak ada pegawai sarjana hukum atau ahli hukum yang diperbantukan pada ketua atau tidak ada sarjana hukum atau ahli hukum yang lain bersedia.

---

<sup>3</sup>. Bambang Widjojanto, Perlunya Revisi Atas Hak Bantuan Hukum Dalam KUHAP (Telaah Kritis Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana), Makalah Pada Seminar Nasional Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana, UMS, 9 Juni, 1997. hal. 5.

Untuk memperjelas, berikut ini juga dikutip Pasal 83 h ayat (6) sebagaimana disebut oleh Pasal 250 ayat (5) tersebut. Pasal 83 h ayat (6) HIR menegaskan.

Jika seseorang dituduh melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati maka jaksa menanyakan kepadanya apakah ia berkehendak pada sidang pengadilan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau ahli hukum.

Pasal 250 HIR secara khusus mengatur hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang miskin yang terkena perkara pidana dengan ancaman hukuman mati, sepanjang tersedia penasihat hukum yang rela untuk memberikan jasanya. Penunjukkan penasihat hukum itu dilakukan oleh hakim.

Kembali pada ketentuan yang ada dalam Pasal 56 KUHP, menurut ketentuan tersebut, maka kewajiban untuk menunjuk pensihat hukum tersebut tidak hanya terbatas untuk perkara yang diancam pidana mati, tetapi juga meliputi perkara pidana yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih serta perkara pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi dibawah lima belas tahun, dalam hal tersangka/terdakwa tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri. Kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum tersebut juga tidak terbatas pada hakim, tetapi berlaku juga untuk semua pejabat dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Sebagai bahan perbandingan baik untuk dikemukakan di sini mengenai ketentuan serupa yang ada di Amerika Serikat. Sebelumnya perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa

dengan mengemukakan apa yang ada di negara lain tidak berarti di Indonesia harus mengikuti seperti yang ada di negara yang bersangkutan, meskipun menurut penulis mengambil alih sesuatu ketentuan dari manapun ia berasal bukanlah suatu persoalan sepanjang hal itu demi tegaknya hukum dan keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Di Amerika Serikat terdapat suatu ketentuan yang mengharuskan setiap pejabat yang melakukan penangkapan untuk memberitahukan hak-hak tersangka sebelum ia diinterogasi. Ketentuan yang disebut sebagai "Miranda Rule" tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dan sekaligus sebagai pedoman bagi pejabat penegak hukum untuk menghindari melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan (The miranda rule both to protect individual rights and to give law enforcement officials guidelines to avoid coercive interrogation).

Dalam Black's Law Dictionary<sup>4</sup>, hak-hak yang harus diberitahukan tersebut :

- (i) Ia berhak diam (that he has a right to remain silent)
- (ii) Setiap pernyataan atau ucapan dapat digunakan sebagai bukti terhadapnya (that any statement he does make may be used as evidence against him)
- (iii) Ia berhak didampingi oleh pembela (that he has a right to the presence of an attorney)
- (iv) Jika ia tidak mampu, akan ditunjuk seorang pembela baginya sebelum ia diinterogasi (that if he cannot afford an attorney one will be appointed for him prior any questioning if he so desires)

---

<sup>4</sup>. Black's Law Dictionary, Fifth Edition, hal. 900.

Apabila petugas mengabaikan ketentuan ini, akibat hukumnya adalah : " No evidence obtained in the interrogation may be used against the accused," kecuali bisa dibuktikan di sidang bahwa peringatan-peringatan itu sudah disampaikan.<sup>5</sup>

Jadi jelaslah, bahwa menurut ketentuan Miranda tersebut seorang penasihat hukum memiliki arti yang sangat besar bukan hanya dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa, tetapi juga memegang peranan penting bagi keseluruhan rangkaian proses penyelesaian perkara pidana.

Khusus mengenai penunjukan penasihat hukum untuk perkara pidana yang tersangka/terdakwanya tidak mampu, rumusan Pasal 56 KUHP agak berbeda dengan yang ada di Jepang. Ketentuan mengenai bantuan hukum dalam hukum acara pidana di Jepang memberi pengaturan yang lebih luas terhadap tersangka/terdakwa yang tidak mampu secara ekonomis, karena tidak dibedakan berdasarkan kriteria ancaman pidana. Ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

Pasal 30 ditetapkan sebagai berikut :

The accused or the suspect may appoint a counsel at any time.

Pasal 36 menyatakan sebagai berikut :

In case the accused is unable to appoint a counsel because of poverty or any other reason, the court shall appoint a counsel for the accused upon request :

---

<sup>5</sup>•Dikutip dari Ifdhal Kasim, Perdebatan di Sekitar Pembahasan KUHP (Bernas, 11 April 1994).

Provided, that nothing here in shall apply when there is a counsel appointed by person other than the accused.<sup>6</sup>

Lebih dari itu, dalam hukum acara pidana di Jepang juga diatur secara lebih terperinci mengenai penunjukan penasihat hukum bagi yang cacat fisik. Hal tersebut terdapat dalam pasal 37 yang menegaskan sebagai berikut :

The court may appoint a counsel upon its own authority when there is counsel for the accused in the case as mentioned here under :

- (1) When the accused is a minor;
- (2) When the accused is a seventy years old or more;
- (3) When the accused is deaf or mute;
- (4) When it is doubtful that the accused is mentally deranged or weak-minded person;
- (5) When it is deemed necessary for other reason.<sup>7</sup>

Ketentuan seperti Pasal 37 yang dikutip di atas tidak ada pengaturannya dalam KUHAP.

Selanjutnya di bawah ini akan ditinjau mengenai sistem pengaturan hak bantuan hukum dalam setiap tahap proses peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP.

#### 1. Tahap Penyidikan

Sebelum dikemukakan mengenai keterkaitan penasihat hukum dalam tahap penyidikan, perlu diketahui bahwa KUHAP dengan jelas membedakan istilah "penyidikan" dan "penye-

---

<sup>6</sup>·Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996, hal. 93.

<sup>7</sup>·Ibid.

lidikan". Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHP). Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 KUHP). Berbeda dengan penyidik yang terdiri dari pejabat polisi negara RI dan PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, maka penyidik ini merupakan wewenang pejabat polisi negara saja. Jadi perbedaan antara penyidik dan penyidik terletak pada personalianya.

Pada tahap penyelidikan, pembentuk undang-undang belum menganggap perlu hadirnya seorang penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Dalam hal ini ada pendapat bahwa pada tahap ini sebenarnya kehadiran seorang penasihat hukum sudah diperlukan. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh penyidik seperti tercantum dalam Pasal 5 KUHP yang dianggap sudah menyentuh hak asasi manusia. Kewenangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Karena kewajibannya, penyelidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan "tindakan lain" menurut Penjelasan Resmi KUHAP adalah tindakan penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) sub b. memperluas kewenangan pejabat polisi RI meliputi :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

Bunyi ketentuan pasal 5 ayat 1 sub. b di atas sesungguhnya merupakan proses lanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya kewenangan yang ada pada pejabat polisi RI, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) sub. a.

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Romli Atmasasmita<sup>8</sup>, mengajukan pendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh penyelidik sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) sub a. dan b., terutama kewenangan penyelidik untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri serta mengadakan tindakan lain menurut hukum sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Resmi KUHAP, maka jelas kedua macam kewenangan penyelidik tersebut sudah mulai menyentuh kemerdekaan pribadi seseorang. Selanjutnya diemukakan bahwa dalam KUHAP baik dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa maupun Bab VII tentang Bantuan Hukum, tidak tampak sama sekali hak seorang tersangka untuk menolak atau membela kepentingannya, misalnya menolak menjawab pertanyaan pejabat penyelidik sebelum didampingi pembela atau penasihat hukum, atau hak yang dimiliki tersangka dalam menghadapi kewenangan seorang penyelidik seperti tersebut di atas.

---

<sup>8</sup>. Romli Atmasasmita, Ibid. hal. 34.



Penulis kurang sependapat dengan Romli Atmasasmita, khususnya mengenai kemungkinan dapat hadirnya penasihat hukum pada tahap penyelidikan ini, sebab meskipun penyelidikan telah dilengkapi dengan kewenangan yang dalam praktek bisa merupakan suatu intervensi terhadap kemerdekaan pribadi seseorang, akan tetapi langkah tersebut sebenarnya adalah dalam rangka tindakan preventif. Lebih dari itu menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikatakan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Latar belakang, motivasi dan urgensi diintroduksinya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi yang dikaitkan dengan kenyataan bahwa tidak setiap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menampilkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Oleh karena itu sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan tindakan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa

peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Lebih lanjut ingin dikemukakan di sini bahwa pada tahap penyelidikan ini, seorang yang dicurigai sebagai tersangka belumlah dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang bersifat yuridis, apalagi dalam tahap ini belum dilakukan upaya paksa seperti penangkapan dan atau penahanan.

Berbeda dengan yang diuraikan di atas adalah pada tahap penyidikan yang biasanya telah didahului dengan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan atau penahanan. Dalam tahap ini jelas bahwa kemerdekaan pribadi tersangka sudah secara nyata dibatasi dan ia telah berhadapan dengan aparat penegak hukum yang berstatus militer, sehingga secara yuridis tidak ada keseimbangan kedudukan antara pihak tersangka dengan penyidik. Di sinilah urgensi perlunya penasihat hukum mendampingi tersangka.

Selanjutnya mengenai keterkaitan penasihat hukum pada tahap penyidikan ini akan diuraikan di bawah ini.

Apabila diteliti ketentuan yang ada dalam KUHAP, maka terdapat dua ketentuan yang menurut penulis layak untuk dicermati bersama. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 114 dan 115 KUHAP.

Pasal 114 KUHAP

" Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ".

Selanjutnya penjelasan pasal 114 KUHP menyatakan sebagai berikut :

" Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan ".

Terhadap ketentuan Pasal 114 KUHP tersebut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan<sup>9</sup> memberi komentar dengan menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 56, karena pasal ini mengatur bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik diwajibkan untuk memberitahukan kepada tersangka akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum. Dikemukakan selanjutnya bahwa dalam pasal 56 kewajiban penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Penulis kurang sependapat dengan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tersebut di atas, sebab pasal 114 KUHP tersebut pada dasarnya memuat ketentuan yang memang tidak

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hal. 98.

sama dengan ketentuan Pasal 56 KUHP. Dalam ketentuan pasal 114 KUHP kewajiban penyidik adalah untuk memberitahukan kepada tersangka bahwa ia berhak untuk mendapat bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan ketentuan dalam pasal 56 KUHP mengatur kewajiban bagi penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka jika perkaranya termasuk kualifikasi pasal 56 KUHP. Istilah "memberitahukan" jelas berbeda jauh dengan "menunjuk". Istilah yang disebut pertama mempunyai konotasi bahwa setelah diberitahukan, untuk selanjutnya terserah kepada tersangka untuk menggunakan haknya itu atau tidak. Sedangkan istilah yang disebut kedua mengandung makna agar penyidik secara riil menghadirkan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka tentu saja sepanjang tersangka tersebut tidak menyatakan menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik, sebab pada dasarnya setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHP).

Kewajiban memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 114 KUHP dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan pemenuhan secara riil atas hak-hak tersangka yang lain selama dalam proses penyidikan. Menurut penulis hak tersangka yang relevan untuk dilaksanakan secara simultan adalah hak tersangka untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa

apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai dengan maksud di atas. Dalam KUHAP hak ini dijamin oleh Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP. Kedua pasal tersebut untuk jelasnya akan dikutip dibawah ini :  
Pasal 59 KUHAP berbunyi :

" Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. "

Penjelasan Pasal 59 KUHAP menyatakan cukup jelas.  
Pasal 60 KUHAP berbunyi :

" Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. "

Penjelasan Pasal 60 KUHAP menyatakan cukup jelas.

Kedua ketentuan seperti telah dikutip di atas pada dasarnya mengatur akses tersangka/terdakwa kepada keluarga dan orang-orang lain yang tentu saja mengenal tersangka/terdakwa untuk kepentingan memperoleh bantuan hukum atau untuk kepentingan penangguhan penahanan jika ia menghendaki adanya penangguhan penahanan. Kedua pasal tersebut dalam pelaksanaannya tidak boleh terpisah dengan ketentuan pasal 114 KUHAP. Bilamana pelaksanaan Pasal 114 KUHAP tersebut tidak diikuti dengan penerapan Pasal 59 dan 60 KUHAP secara konsisten, maka ketentuan Pasal 114 KUHAP tidak akan memiliki makna seperti yang diharapkan.

Bagi tersangka, pemberitahuan oleh penyidik mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak berarti jika misalnya dalam praktek ia sendiri kesulitan untuk bisa akses kepada keluarganya dan handai taulannya, karena justru dari keluarga atau handai taulannya inilah diharapkan adanya informasi mengenai bantuan hukum yang dianggap paling baik bagi tersangka.

Akses penasihat hukum dalam tahap penyidikan ini juga dijamin oleh Pasal 115 KUHP yang menegaskan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Penjelasan Pasal 115 ayat (1) menyatakan bahwa penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. Sedangkan penjelasan ayat (2) menyatakan cukup jelas.

Jadi jelas sekali menurut ketentuan dalam penjelasan pasal tersebut, maka komponen penasihat hukum ditempatkan dalam sikap pasif.

Sikap yang pasif dari penasihat hukum tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dengan peran ia selanjutnya yaitu dalam sidang pengadilan, sebab dalam tahap pra-ajudikasi ini sifatnya masih berupa melakukan tindakan persiapan untuk pembelaan di sidang pengadilan.

Namun perumusan pasal tersebut, ternyata juga sempat menimbulkan suatu kritik keras dari sebagian ahli hukum di Indonesia ketika itu. RO Tambunan menilai ketentuan pasal ini sebagai salah satu cacat, karena belum memberikan dan meletakkan landasan persamaan derajat dan kedudukan antara penyidik dan penasihat hukum. Adnan Buyung Nasution bahkan menilai bahwa pasal tersebut belum bisa dikatakan sebagai hak penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dalam pemeriksaan penyidikan. Ketentuan Pasal 115 KUHAP masih bersifat fakultatif. Sekurang-kurangnya Pasal 115 belum memberi "hak yang utuh" bagi penasihat hukum. Pasal 115 telah menganulir pasal-pasal sebelumnya, demikian ditegaskan oleh Adnan Buyung Nasution.<sup>10</sup>

Kiranya perlu diperhatikan berbagai kritik dan analisis yang dilontarkan oleh para ahli hukum tersebut, yang notabene banyak berkecimpung dalam praktek. Secara teoritis ketentuan Pasal 115 KUHAP tersebut patut dicermati bersama. KUHAP haruslah dilihat sebagai bangunan besar yang harus menjadi patokan atau pedoman baik bagi petugas penegak hukum maupun bagi pencari keadilan khususnya adalah tersangka/terdakwa. Petugas penegak hukum harus sarat dengan semangat/spirit yang tinggi di dalam mengemban tugasnya sebagai penegak keadilan. Di sisi lain juga harus diingat bahwa para pencari keadilan (tersangka/terdakwa) memiliki hak untuk dipertahankan dengan sebaik-baiknya sebagai warga negara yang mempunyai harkat dan martabat.

---

<sup>10</sup>•Dikutip dari Yahya Harahap, Op. cit, hal. 132.

KUHAP telah dilengkapi dengan berbagai landasan baik filosofis maupun konstitusional yang mengakui dan mengagungkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus diperlakukan berdasarkan perikemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih dari itu KUHAP juga memuat landasan asas atau prinsip hukum seperti rule of law atau legalitas yang mempersamakan manusia dihadapan hukum atau equality before the law dan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent yang telah mendapat pengakuan secara universal. Oleh karena itu jika landasan filosofis, konstitusional maupun asas hukum yang tertuang didalam KUHAP tersebut, justru dijabarkan secara tidak proporsional, berarti kerangka landasan tersebut hanya akan bermakna sebatas jargon belaka.

Ketentuan Pasal 115 KUHAP seperti telah dikutip di atas pada dasarnya telah menempatkan kedudukan penasihat hukum sebagai subordinat penyidik. Hal ini tampak dari perumusan yang berbunyi "Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan ". Kata "dapat" dalam rumusan tersebut secara harfiah mengandung makna adanya "persetujuan" dari penyidik apabila penasihat hukum tersebut berkeinginan untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Dengan demikian di sini jelas bahwa akses penasihat hukum tersebut sangat tergantung pada kemurahan hati pihak penyidik.



Pasal 115 KUHAP seperti dikutip di atas pada dasarnya mengatur mengenai hubungan segitiga antara tersangka yang sedang diperiksa oleh polisi dan penasihat hukum. Pasal 115 KUHAP ini memuat dua ketentuan yaitu pertama, suatu asas yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersangka oleh polisi, dihadiri oleh penasihat hukum. Sedangkan yang kedua adalah yang tercantum dalam ayat (2) yang mengemukakan tentang adanya perkecualian dan penyimpangan dari asas tersebut dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara. Pasal ini memuat asas "within sight and within hearing" yang berlaku bagi penasihat hukum yang dapat menghadiri dan dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.

Menurut Oemar Senoadji, asas within sight and within hearing dalam Pasal 115 KUHAP ini berkaitan dengan "the right relation with the investigation" yang dapat dikatakan belum merupakan ketentuan internasional.<sup>11</sup> Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketentuan seperti Pasal 115 tersebut merupakan ketentuan yang khas Indonesia. Adanya perkecualian bahwa terhadap delik keamanan negara pihak penasihat hukum hanya boleh melihat tetapi tidak boleh mendengar pemeriksaan, jadi within sight, not within hearing menurut kesimpulan Andi Hamzah, KUHAP menganut sistem Accusatoir yang terbatas (Gematigd Accusatoir).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>.Oemar Senoadji, Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 1991. hal. 41.

<sup>12</sup>.Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Arikha Media Cipta, Jakarta, 1996, hal. 80

Kehadiran penasihat hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan bersifat pasif dan dimaksudkan agar penasihat hukum tersebut mencatat segala sesuatu yang ia lihat dan ia dengar sendiri sesuai dengan prinsip *within sight and within hearing*, yang kesemuanya itu dimuarakan demi kepentingan pembelaan setelah perkara yang bersangkutan dilimpahkan ke persidangan pengadilan.

Hadirnya penasihat hukum juga bisa dipahami sebagai realisasi dari pemikiran perlunya keseimbangan hak dan kewajiban di satu pihak yaitu pihak tersangka dan bantuan hukum dan hak-hak serta kewajiban dari penyidik dalam melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain dan penuntut umum yang kemudian mengajukan ke persidangan pengadilan sebagai pihak ketiga yang obyektif dan menghargai posisi yang obyektif pula. Di sinilah kemudian muncul apa yang disebut sebagai asas "*Equal Arms*" yang didasarkan pada pemikiran yang terutama ditujukan kepada dan terhadap tersangka/terdakwa dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum dan yang hendak membagikan suatu persamaan setidak-tidaknya persamaan derajat antara tersangka/terdakwa dan pembelanya di satu pihak dan khususnya penyidik dan penuntut umum di pihak lain.<sup>13</sup>

Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran diatas, maka penasihat hukum harus dilengkapi dengan seperangkat hak-hak, agar ia memiliki akses yang cukup kepada tersangka.

---

13. Ibid. hal. 42

Disamping hak untuk mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dengan segala kelemahannya seperti telah dikemukakan diatas, hak penasihat hukum pada tingkat penyidikan ini juga meliputi hak untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 KUHAP), hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 KUHAP), hak untuk memperoleh turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelanya. Turunan ini dapat berupa foto copy dan penasihat hukum wajib menyimpan berita acara tersebut untuk diri sendiri.

Adapun berita acara pemeriksaan yang dapat diperoleh turunannya itu adalah, pada tingkat penyidikan hanya pemeriksaan tersangka, pada tingkat penuntutan semua berkas perkara termasuk surat dakwaan, dan pada tingkat pemeriksaan pengadilan, seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim (Pasal 72 KUHAP beserta penjelasannya). Selanjutnya hak penasihat hukum yang lain adalah hak untuk mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73 KUHAP) serta hak untuk meminta pemeriksaan praperadilan (Pasal 77-83 KUHAP).

Sekedar untuk mengetahui apakah seperangkat hak penasihat hukum tersebut telah selaras dengan kecenderungan internasional selama ini, maka ada baiknya juga untuk dilihat beberapa substansi yang telah diatur dalam instrumen internasional yang terkait disini yaitu Basic Princi-

ples On The Role of Lawyers yang telah diadopsi oleh Konggres Kejahatan kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai 7 September 1990.

Dalam instrumen internasional tersebut antara lain dikemukakan bahwa dalam waktu 48 jam, seseorang yang ditahan atau dikucilkan harus sudah memiliki akses kepada pengacara. Dalam KUHAP pada pasal 69 telah ditentukan bahwa seorang penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. KUHAP mengatur jangka waktu penangkapan ini adalah selama 24 jam. Ini berarti bahwa lebih dari 24 jam sudah termasuk dalam kategori penahanan. Jadi menurut KUHAP akses penasihat hukum kepada tersangka sudah dijamin dalam waktu 24 jam. Dengan demikian ditinjau dari segi waktu kapan seseorang sudah bisa akses kepada penasihat hukum, kiranya KUHAP tidak bertentangan dengan instrumen internasional tersebut.

Instrumen internasional ini juga menentukan bahwa orang-orang yang ditahan, dikucilkan, dan dipenjarakan dijamin memiliki kesempatan waktu dan fasilitas yang cukup untuk dikunjungi, berkomunikasi, dan berkonsultasi ke pengacara tanpa hambatan, penyelaan atau sensor rahasia. Konsultasi tersebut bisa diawasi oleh petugas penegak hukum, tetapi petugas tidak turut mendengarkan konsultasi tersebut.

Mengenai hal tersebut dalam KUHAP tampaknya juga sudah memberi hak kepada penasihat hukum untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada semua tingkat pemerik-

saan dan setiap waktu demi kepentingan pembelaan perkaranya. Pengawasan terhadap penasihat hukum dalam berhubungan dengan tersangka diatur dalam Pasal 71 KUHP yang menetapkan bahwa penasihat hukum dalam berhubungan dengan tersangka (right of communication) diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan, tanpa mendengar isi pembicaraan. Jadi disini bentuk komunikasi bersifat "within sight, not within hearing", dapat dilihat, tanpa dapat didengar. Hal ini memang penting setidaknya untuk menghindari alat-alat bukti dihilangkan atau orang tersebut melarikan diri. Sedangkan pembicaraan antara penasihat hukum dengan tersangka yang menjadi kliennya tersebut pada dasarnya bersifat rahasia dan konfidensial.

Sayang sekali Pasal 71 KUHP ini juga memuat suatu perkecualian sebagaimana tercantum dalam ayat (2) yang menentukan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, Polisi, Jaksa, dan Petugas Pemasyarakatan tersebut dapat mendengar isi pembicaraan, jadi dalam bentuk "within sight, within hearing". Menjadi pertanyaan apakah ketentuan tersebut tidak berarti mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka. Sungguh tidak cukup untuk menegaskan bahwa suatu ketentuan adalah perkecualian tanpa dasar pemikiran yang bisa dipahami secara logika. Ketentuan semacam ini disisi lain bisa dipahami sebagai ketentuan yang menggerogoti hak-hak penasihat hukum sebagai seorang pengemban profesi dan sekali lagi hal ini berarti juga suatu usaha meminggirkan peran penasihat hukum dalam kancah proses peradilan.

Lebih jauh lagi hal itu bertentangan dengan rahasia jabatan seorang penasihat hukum dimana ia harus menyimpan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Meskipun hal ini tidak secara tegas diatur dalam suatu perundang-undangan, tetapi Ilmu Hukum dan Yurisprudensi telah mengakui advokat (Penasihat hukum, pen.) memiliki *verschoningsrecht* dan mengkualifisir advokat sebagai pejabat yang wajib menyimpan rahasia yang dipercayakan.<sup>14</sup>

Hal lain yang juga dicantumkan dalam instrumen internasional tersebut adalah bahwa pihak berwenang menjamin pengacara-pengacara memiliki akses yang cukup kepada informasi, file, atau dokumen yang disimpannya agar dapat bekerja dengan baik. Dalam konteks penegakan hukum pidana, yang dimaksud dengan pejabat berwenang ini tentu saja meliputi polisi, Jaksa, Hakim, maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap penyidikan KUHAP telah memberi hak kepada penasihat hukum untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka, pada tahap penuntutan semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Sedangkan pada tahap adjudikasi (pemeriksaan di sidang pengadilan), penasihat hukum memiliki hak untuk mendapatkan turunan dari seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim (Pasal 72 KUHAP beserta penjelasannya).

---

<sup>14</sup>.Oemar Senoadji, Profesi Dokter, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 2

Dengan demikian sebelum suatu perkara disidangkan di pengadilan, KUHAP telah menjamin bahwa penasihat hukum tersebut sudah berhak mendapatkan semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Ketentuan ini sangat menunjang tugas penasihat hukum yang harus melakukan persiapan pembe-  
laan, di sidang pengadilan. Namun harus segera ditambahkan di sini bahwa ketentuan tersebut setidaknya belum menyentuh pada aspek substansi, misalnya saja bolehkah seorang penasihat hukum melihat barang bukti yang disimpan oleh Polisi atau Jaksa. Akses penasihat hukum kepada barang bukti ini juga penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya rekayasa barang bukti yang dalam praktek bisa saja terjadi.

Demikianlah seperangkat hak-hak yang dimiliki oleh penasihat hukum yang diatur dalam KUHAP khususnya pada tahap penyidikan. Namun harus segera ditambahkan di sini bahwa pengaturan dalam suatu undang-undang bukan akhir dari segalanya. Ia masih membutuhkan evaluasi dan masukan-masukan dari dunia praktek demi kesempurnaan ketentuan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan hal itulah, menarik untuk dikemukakan pendapat Bambang Widjojanto dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mengemukakan bahwa posisi penasihat hukum yang pasif dalam tahap penyidikan menyebabkan fungsi bantuan hukum dalam mengontrol proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka menjadi tidak optimal. Dikemukakan bahwa dalam banyak kasus, penasihat hukum tidak bisa melakukan tindakan apapun, kendati ia mengetahui bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap

kliennya bertentangan dengan ketentuan prosedural. Sebagai contoh dikemukakan oleh beliau bahwa pertanyaan dari penyidik yang bersifat menjebak, sugestif dan tidak memberikan keleluasaan pada orang yang disidik untuk memberikan jawaban. Berdasarkan hal di atas, maka diusulkan agar penasihat hukum diberi hak untuk bisa memberikan suatu pendapat atau nasihat secara langsung kepada tersangka tentang adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap prosedur penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik.<sup>15</sup>

Penulis setuju dengan pendapat di atas, yaitu agar dalam KUHPA khususnya ketentuan mengenai hak bantuan hukum dalam tingkat penyidikan ini sebaiknya dilengkapi dengan hak penasihat hukum untuk bisa memberikan nasihat-nasihat yuridis kepada tersangka, sebab seorang tersangka yang awam bukan mustahil mengalami kesulitan yang bersifat yuridis. Dengan demikian posisi penasihat hukum disini adalah sebagai juridis adviseur, atau legal adviser yang berarti sebagai pemberi nasihat hukum.<sup>16</sup>

## 2. Tahap Penuntutan

Penuntutan merupakan langkah penting dalam proses peradilan pidana karena penuntutan itu menghubungkan penyidikan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh

---

<sup>15</sup>. Bambang Widjojanto, Op.cit., hal. 6.

<sup>16</sup>. Martiman Prodjohamidjojo, Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982. hal. 16.



karena itu kerjasama dan koordinasi yang harmonis antara penuntut umum dan penyidik harus dijalin dengan sebaik-baiknya. Wewenang untuk melakukan penuntutan ini ada pada kekuasaan Republik Indonesia. KUHP membedakan dengan jelas istilah "jaksa" dan "penuntut umum. Menurut Pasal 1 angka 6 KUHP ditegaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Batasan yang diberikan oleh KUHP tersebut menegaskan bahwa pengertian "jaksa" dihubungkan dengan aspek jabatan, sedangkan pengertian "penuntut umum" berhubungan dengan aspek fungsi dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan pengadilan.

Sesudah berlakunya KUHP, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan atau lanjutan, kecuali untuk tindak pidana khusus. Ini berarti untuk tindak pidana umum jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Keadaan seperti diuraikan di atas agak berbeda jika kita melihat di negara-negara lain. Di Amerika Serikat sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah dan R.M. Surachman, dalam perkara-perkara yang berat sekali seperti pembunuhan,

jaksa bisa memimpin penyelidikan sendiri atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian perkara.<sup>17</sup>

Demikian juga di Jepang seperti diatur dalam Pasal 191 (1) dari The Code of Criminal Procedure of Japan yang menegaskan bahwa :

" A public prosecutor may, if he deems necessary, investigate offence him self " (1).

" A public prosecutor's assistant officer shall investigate an offence under the instruction of a public prosecutor " (2).<sup>18</sup>

Jadi di Jepang seorang penuntut umum dapat, jika perlu menyidik sendiri sesuatu delik (1), dan seorang pembantu umum penuntut umum menyidik suatu delik di bawah petunjuk seorang penuntut umum (2).

Demikian juga di Swedia, penuntut umum boleh mengambil alih suatu penyidikan yang telah dimulai oleh Polisi, bilamana masalahnya tidak mudah seperti dikemukakan oleh Andi Hamzah dengan mengutip Swedish Code of Judicial Procedure yang menyatakan sebagai berikut :

" The preliminary investigation is initiated either by a police authority or by the prosecutor, if the investigation is initiated by a police authority and the matter is not of simple nature, the prosecutor shall take over the conduct as soon as someone reasonably can be suspected of the offence for special cause, the prosecutor shall also take over the direction of the investigation in other situations ".<sup>19</sup>

17. R.M. Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya), Sinar Grafika Jakarta, 1994. hal. 5.

18. Andi Hamzah, Op.cit, hal. 88

19. Andi Hamzah, Ibid.

Jadi menurut berbagai ketentuan mengenai wewenang penuntut umum yang dikutip dari ketentuan di berbagai negeri tersebut bisa disimpulkan bahwa disamping melakukan tugas pokoknya sebagai penuntut umum mereka dapat pula langsung mengadakan penyidikan dalam keadaan-keadaan tertentu.

Menurut sistem yang dianut KUHAP, wewenang untuk melakukan penyidikan ada di tangan pejabat polisi negara Republik Indonesia, sebagai "instansi penyidik tunggal".<sup>20</sup> POLRI melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyidikan (Pasal 7 ayat 2 KUHAP) dan secara administratif organisatoris berada dalam suatu kesatuan dan tidak terpecah-pecah di bawah pimpinan KAPOLRI. Dengan demikian kelancaran, keter-tiban dalam penyidikan dan penyelidikan kejahatan sampai pembuatan berita acara dengan semua alat-alat pembuktian ada di tangan kepolisian, artinya semuanya harus dikerjakan oleh dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari kepolisian. Bilamana proses pemeriksaan di tingkat penyidikan berjalan lancar, maka segala pujian dan kehormatan adalah untuk kepolisian, sebaliknya segala celaan juga untuk kepolisian jika ternyata ada kekurangan-kekurangan dan keluhan-keluhan mengenai tindakan penyidikan tersebut. Tugas kepolisian seperti diuraikan tersebut adalah tugas kepolisian di bidang represif yaitu polisi yustisial atau polisi kehakiman.

---

<sup>20</sup>.S. Tanusubroto, Peranan Pra-Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung. 1983 hal. 15.

Dalam kenyataannya tugas kepolisian tersebut ternyata tidak hanya di bidang yustisial, tetapi juga sebagai polisi preventif atau yang disebut dengan kamtibmas dan polisi administratif. Sebagai polisi administratif instansi kepolisian terlibat didalam berbagai tugas yang menyangkut masalah perijinan dan pengawasannya. Lebih jauh berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, maka kedudukan dan peranan Polri juga sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang berfungsi sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan sosial politik. Melihat kompleksnya tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri dan mengingat status Polri sebagai salah satu unsur ABRI sampai-sampai ada pendapat yang menyatakan bahwa tugas Polri tersebut merupakan suatu "mission impossible" kalau memang hendak dilaksanakan dengan baik dan benar.<sup>21</sup>

Ketika hukum acara pidana di Indonesia masih mendasarkan diri pada HIR, keadaannya tidak seperti yang diuraikan di atas. Menurut sistem HIR, maka pejabat-pejabat kepolisian yang melakukan penyidikan bertindak dalam kedudukan sebagai pembantu jaksa (Hulpmagistraat) (Pasal 53 HIR), sehingga jika polisi dan jaksa berbarengan mengusut suatu perkara, maka polisi menghentikan kegiatannya, dan menyerahkan kepada jaksa. Hal ini diatur dalam Pasal 54

---

<sup>21</sup>. Soehardjo Ss., RUU Kepolisian Republik Indonesia Terutama Ditinjau dari Aspek Ketatanegaraan, Makalah Seminar, UNDIP, Semarang, 1997 hal. 3.

HIR. Jadi menurut sistem HIR polisi mempunyai kekuasaan penyidikan yang bersifat derivatif semacam pendelegasian kekuasaan dari jaksa/penuntut umum.<sup>22</sup>

Menurut sistem HIR, jaksa mempunyai kedudukan yang boleh dikatakan "centralfigur" dan mencakup kegiatan yang berupa penyidikan (opsporing), penyidikan lanjutan (nasporing), dan penuntutan. Dengan demikian menurut sistem HIR, jaksa bisa campur tangan dalam segala tindakan penyelesaian perkara sejak awal perkara itu diungkap dan hal itu pada dasarnya dilakukan demi kesempurnaan pemeriksaan perkara secara keseluruhan.

Pada saat sekarang, dengan berlakunya KUHP, maka wewenang penuntut umum diatur secara eksplisit dalam pasal 14 KUHP yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status penahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

---

22-S. Tanusubroto, Op.cit. hal. 13

- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan wewenang penuntut umum yang diatur dalam Pasal 14 KUHAP seperti disebutkan di atas, Andi Hamzah<sup>23</sup> menyimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.

Pendapat di atas tidak disetujui oleh Lilik Mulyadi<sup>24</sup> dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

" Menurut penulis sebenarnya Indonesia tidak menganut secara murni sistem tertutup. Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Dalam praktek peradilan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP berserta penjelasannya serta Pasal 32 huruf b. Undang-Undang No.5 Tahun 1991 (LNRI 1991-1959; TLNRI 3451) tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka terhadap perkara-perkara khususnya Tindak Pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh kejaksaan ".

---

23. Andi Hamzah, Op.cit. hal. 86-87.

24. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996. hal. 25.

Dalam hubungan ini penulis berpendapat bahwa pada prinsipnya wewenang penyidikan memang ada di tangan pejabat polisi negara Republik Indonesia, sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia yang meskipun masih dimungkinkan untuk melakukan tindakan penyidikan untuk tindak pidana khusus, pada hakikatnya hal tersebut adalah bersifat perkecualian. Konstruksi pemikiran ini didasarkan pada suatu pemahaman bahwa mengenai pembedaan fungsional antara Kejaksaan dan Kepolisian telah diatur secara tegas dalam KUHAP sebagai induk hukum acara pidana di Indonesia. Sistem pengaturan demikian adalah penyempurnaan dari aturan sebelumnya yang ada dalam HIR, yang memungkinkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dan telah menempatkan kedudukan polisi sebagai subordinat jaksa. Lebih dari itu di dalam KUHAP juga masih dimungkinkan bagi jaksa untuk terlibat didalam aktivitas penyidikan yang telah dilakukan oleh Kepolisian, meskipun bukan keterlibatan secara fisik, tetapi secara yuridis.

Mengenai keterkaitan Kejaksaan pada aktivitas penyidikan yang diatur oleh KUHAP dapat dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

Pasal 109 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

- " Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" (1).
- " Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" (2).

" Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum" (3).

Dalam Pasal 109 ayat (1) seperti dikutip di atas hanya disebut dengan kata-kata "penyidik memberitahukan ... " dan tidak ada kata "wajib " memberitahukan kepada penuntut umum. Rumusan demikian dianggap oleh Andi Hamzah sebagai suatu kekurangan, karena seandainya hal itu tidak dilakukan oleh penyidik hal ini tidak ada sanksinya yang bisa diterapkan kepada penyidik. Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Andi Hamzah tersebut, namun sekiranya ada pengertian bersama antara penyidik dan penuntut umum sesuai yang dikehendaki oleh KUHAP, maka kekurangan itu sebenarnya bisa diatasi.

Keterkaitan kejaksan pada kegiatan penyidikan juga bisa dilihat dari ketentuan Pasal 110 KUHAP yang menegaskan sebagai berikut :

- " Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum " (1)
- " Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi " (2)
- " Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum " (3)
- " Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum " (4).



Ketentuan Pasal 110 KUHP di atas tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUHP dan Pasal 138 ayat (2) KUHP. Di bawah ini dikutip kedua ketentuan tersebut.

Pasal 8 ayat (3) KUHP berbunyi :

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;

Pasal 138 ayat (2) KUHP berbunyi :

" Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum."

Persoalan yang muncul dari berbagai ketentuan yang disebutkan di atas adalah tidak ditentukannya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik atau penuntut umum atau sebaliknya. Hal ini memungkinkan berkas perkara bisa mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum dan sebaliknya, misalnya saja kalau penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan yang dilakukan penyidik masih dinyatakan belum lengkap.

Namun mengenai hal diatas Rakergab. Makehjabol I Tahun 1984 Jo. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006/J.A/7/1986 tanggal 15 Juli 1986 tentang Petunjuk Pelak-

sanaan Administrasi Teknis Yustisial Perkara Pidana Umum, ditetapkan bahwa dalam hal penyidik telah menyatakan bahwa hasil penyidikan telah optimal, antara lain terlihat dengan adanya bolak-balik berkas perkara lebih dari tiga kali, maka berkas perkara hasil penyidikan tersebut diterima untuk dihentikan penuntutannya sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 KUHP.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa sesudah berlakunya KUHP, pemeriksaan pada tahap penuntutan ini bukan pemeriksaan secara fisik terhadap tersangka, melainkan pemeriksaan terhadap berkas perkara tersangka yang secara keseluruhan disusun oleh penyidik polisi negara RI. Hal ini disebabkan wewenang jaksa atau penuntut umum untuk melakukan penyidikan tambahan sudah tidak dikenal lagi di dalam KUHP. Penyidikan tambahan menurut sistem KUHP tetap ada di tangan penyidik Polri meskipun dalam pelaksanaannya atas perintah dari penuntut umum.

Jika disimak dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka di dalamnya disebut-sebut adanya kewenangan dari Jaksa untuk melakukan penyidikan tambahan, namun hal itu ternyata juga tidak boleh dilakukan terhadap tersangka. Ketentuan selengkapnya mengenai hal ini akan dikutip di bawah ini.

---

<sup>25</sup> Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHP, Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Sinar Grafika, Jakarta, 1991. hal. 42. Penulis menambahkan bahwa Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-006/JA/7/1986 telah diganti dengan Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf d. dari Undang-Undang dimaksud dikatakan bahwa :

" Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah bagaimana KUHAP mengatur posisi bantuan hukum pada tahap penuntutan ini, dan selanjutnya berhubung kejaksaan tidak lagi melakukan pemeriksaan secara fisik kepada tersangka, apakah relevansinya bantuan hukum pada tahap penuntutan ini. Jika diteliti di dalam ketentuan KUHAP, ada beberapa pasal yang mencoba menyinggung keterkaitan bantuan hukum/penasihat hukum dalam tahap penuntutan ini. Mengenai hal ini akan dikutip di bawah ini :

Pasal 140 ayat (2) KUHP berbunyi :

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim.

Pasal 143 ayat (4) KUHP berbunyi :

- " Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri".

Pasal 144 ayat (3) KUHP berbunyi :

- " Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik ".

Adapun yang dimaksud dengan surat "pelimpahan perkara" menurut penjelasan Pasal 143 KUHP adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Dari beberapa pasal yang dikutip di atas bisa disimpulkan bahwa pada tahap penuntutan ini, penasihat hukum mempunyai hak untuk :

1. Memperoleh surat ketetapan penghentian penuntutan atas nama tersangka;
2. Memperoleh surat pelimpahan perkara yang berisi surat pelimpahan perkara itu sendiri, surat dakwaan, dan berkas perkara;
3. Turunan perubahan surat dakwaan.

Namun pada hemat penulis, karena dalam tahap penuntutan ini tersangka juga masih bisa dikenai penahanan selama menunggu perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, maka hak penasihat hukum untuk berhubungan dengan tersangka harus tetap terjamin.

Mengenai hak penasihat hukum untuk mendapat turunan surat ketetapan penghentian penuntutan atas nama tersangka, hal itu akan merupakan kepastian bagi tersangka, sedangkan surat pelimpahan perkara beserta kelengkapannya akan sangat bermanfaat untuk kepentingan pembelaannya setelah perkara yang bersangkutan diperiksa di persidangan pengadilan, demikian halnya mengenai turunan perubahan surat dakwaan.

### 3. Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Pada tahap adjudikasi atau pemeriksaan di sidang pengadilan, peran penasihat hukum bersifat aktif. Dalam hal ini penasihat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti hak untuk mengajukan pembuktian seperti saksi a de charge, surat-surat dan sebagainya, hak untuk mengajukan pembelaan atau yang dikenal dengan pledooi.

Di bawah ini dikutip beberapa pasal yang berhubungan dengan peran penasihat hukum dalam tahap persidangan pengadilan ini.

Pasal 148 KUHP berbunyi :

- (1) " Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadi-

linya dengan surat penetapan yang memuat alasan-nya".

- (2) " Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- (3) " Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik".

Pasal 156 KUHAP berbunyi :

- (1) " Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ".

Pasal 160 ayat (1) huruf c. KUHAP berbunyi :

- " Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut ".

Pasal 165 ayat (2) KUHAP berbunyi :

- " Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ".

Pasal 172 ayat (1) KUHAP berbunyi :

- " Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut ".

Pasal 182 KUHAP berbunyi :

- (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atau pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Penjelasan Pasal 182 ayat (1) huruf c., menyatakan bahwa apabila terdakwa tidak dapat menulis, panitera mencatat pembelaannya.

Itulah beberapa ketentuan yang berhubungan dengan hak penasihat hukum pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Hak penasihat hukum pada tahap adjudikasi ini bisa dikatakan setara dengan hak dari jaksa penuntut umum. Atas dasar pemikiran ini, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, KUHAP menganut sistem accusatoir.

Namun menurut Sudarto, dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini juga masih tetap inquisitoir mengingat pemeriksaan di sidang pengadilan hakimnya masih aktif.<sup>26</sup>

KUHAP yang sudah merupakan hukum nasional memang masih menempatkan posisi hakim dalam keadaan aktif. Hal ini berbeda dengan yang berlaku di negara-negara dengan sistem common law.

Di negara yang menganut Common Law System, sistem peradilan pidana mendasarkan pada adversary model, sehingga apa yang disebut sebagai kebenaran ditentukan

---

<sup>26</sup>.Dikutip dari Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 107.

oleh kontes antara Jaksa dan penasihat hukum. Dalam sistem peradilan ini ditentukan secara jelas alokasi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan dalam persidangan. Pengungkapan fakta-fakta diserahkan kepada Jaksa dan penasihat hukum, penentuan kesalahan diserahkan kepada orang-orang awam yang lebih dikenal dengan juri, sedangkan tugas Hakim adalah menetapkan tentang hukum dan hukuman. Jadi dalam sistem peradilan yang dianut oleh negara-negara dengan common law system ini, boleh dikatakan lebih memberi tempat kepada penasihat hukum untuk berperan aktif, dan lebih dari itu mampu memberi warna pada upaya penyelesaian perkara dengan sebaik-baiknya.

Keadaan seperti diuraikan di atas, agak berbeda dengan sistem peradilan yang dianut oleh negara-negara yang mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental seperti negara Indonesia. Secara jujur harus dikatakan bahwa sistem peradilan yang berasal dari warisan kolonial, telah menempatkan Hakim dalam posisi aktif. Sikap hakim yang aktif dalam proses peradilan ini disisi lain telah membawa konsekuensi-konsekuensi tersendiri, yang diantaranya adalah meminggirkan fungsi-fungsi lain dalam persidangan. Fungsi-fungsi lain dalam persidangan yaitu peran Jaksa dan juga penasihat hukum menjadi lebih bersifat komplementer belaka. Proses pendengaran dan pemeriksaan bukti-bukti sentral penentuannya terletak pada Hakim. Konkritnya, kalau Jaksa dan atau Penasihat



hukum hendak bertanya (cross/direct examination) harus melalui perantaraan Hakim. Demikian juga seleksi saksi-saksi yang diajukan dapat dilakukan hakim, termasuk di dalamnya pengajuan seorang ahli sepenuhnya sangat tergantung dan ditentukan oleh hakim. Dengan demikian, peranan hakim dengan sistem yang ada sekarang dapat dikatakan sentral. Lebih jauh dapat juga dikatakan "monopolistik" atas seluruh aspek-aspek dari pemeriksaan suatu perkara di persidangan.<sup>27</sup>

Kedadaan seperti diuraikan di atas membawa konsekuensi lebih jauh bahwa pengajuan dan pengujian fakta-fakta, penentuan kesalahan, dan penentuan hukum dan pemidanaan menjadi monopoli dari hakim. Mekanisme pengawasan atas perjalanan fungsi dan peran hakim ini hanyalah melalui upaya hukum. Artinya bagi para pencari keadilan hanya bisa melakukan koreksi melalui upaya hukum saja. Dalam kondisi yang demikian ini peranan penasihat hukum dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana sangat tergantung pada sikap obyektif hakim di persidangan.

---

<sup>27</sup>·Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court (Satu proses di Dewan Kehormatan Profesi), Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 18.

## B. Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkaitan Dengan Penegakan Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa

Sepanjang penelitian penulis, sudah terdapat dua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan hak atas bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa. Putusan MARI ini juga mempunyai makna yang sangat dalam bagi upaya pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia, utamanya dalam kaitannya dengan upaya untuk lebih meningkatkan perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa selama dalam proses peradilan pidana. Secara garis besar posisi kasus dan pendirian MARI tersebut akan dikutip di bawah ini.

### 1. Putusan MARI No. 510/K/Pid./1988<sup>28</sup>

#### KASUS POSISI :

Dalam persidangan Pengadilan, terdakwa, Hasan Jalil, 17 th, pelajar, oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan pidana dengan materi kela-kuan yang intinya sebagai berikut : pada Juli 1987 di desa Biuku Tanjung, Bangko, dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain atau sengaja menganiaya yang mengakibatkan matinya orang lain, dengan cara: sewaktu terjadi pertengkaran mulut dengan kawannya, korban, terdakwa telah dipukul dengan tongkat, akan tetapi dapat dielakkan. Terdakwa emosi dan kemudian pulang mengambil parang milik orang tuanya. Terdakwa keluar mencari saksi korban dan bertemu pada saat korban tengah bercakap-cakap dengan kawan pelajar lainnya. Saat itulah, terdakwa mengayunkan parangnya ke arah kepala dan muka korban sehingga korban terjatuh. Karena luka parah yang dideritanya, korban kemudian meninggal dunia.

Dalam persidangan ini, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa selama dalam proses.

---

<sup>28</sup>. Dikutip dari Majalah Hukum "Varia Peradilan", Tahun III. Nomor 36 September 1988, hal. 43-45.

Hakim pertama setelah memeriksa kasus ini, baik keterangan para saksi maupun barang bukti serta visum et repertum, berkesimpulan, bahwa argumentasi penasihat hukum bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini, karena adanya noodweer exces, ex pasal 49 (2) K.U.H.Pidana, tidak dapat diterima oleh Hakim, karena bukti dalam sidang tidak membuktikan kearah adanya keadaan darurat tersebut. Sebaliknya Majelis Hakim, berpendirian bahwa berdasar bukti, terdakwa telah terbukti secara syah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, ex pasal 338 K.U.H. Pidana. Setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankannya, majelis hakim memberikan pidana penjara selama sepuluh tahun penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Atas putusan Hakim Pertama ini, pihak Penasehat Hukum terdakwa, menyatakan tidak menerima putusan dan memohon pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi. Panitera mencatat permohonan banding ini.

#### PENGADILAN TINGGI

Hakim Banding setelah memeriksa kasus pidana yang dimohon pemeriksaan banding ini, memberikan putusan yang intinya: Menyatakan bahwa permohonan Pemeriksaan Banding yang diajukan oleh Penasehat hukum dinyatakan tidak dapat diterima. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Putusan Majelis Hakim Banding di atas, didasari oleh alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Hakim Pertama.
- Bahwa pasal 56 K.U.H.A.P. menentukan, bahwa untuk perkara pidana dengan Dakwaan tertentu, maka Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi terdakwa.
- Bahwa ketentuan ini mengandung arti, bahwa kewajiban untuk menunjuk penasehat Hukum oleh Pejabat yang bersangkutan, baru mulai timbul setelah perkara yang bersangkutan berada di tangan Pejabat yang menunjuk dan akan berakhir sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pejabat yang menunjuk.
- Bahwa pendapat ini mengandung konsekwensi, bahwa Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pejabat mempunyai kewenangan memberikan nasehat hukum hanya sepanjang Pejabat Penunjuk tersebut melakukan pemeriksaan proses peradilan dalam tingkat pemeriksaan Pejabat itu sendiri.
- Bahwa dalam kasus ini telah terjadi, Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Pertama, telah mengajukan permohonan banding, sebelum ia ditunjuk oleh Hakim Banding. Tambahan lagi, ia tidak ternyata mendapat "Surat Kuasa Khusus " dari terdakwa untuk maksud tersebut.

- Bahwa dengan alasan ini, maka Hakim Banding berpendirian, bahwa Penasehat Hukum dari terdakwa dalam kasus ini, tidak memenuhi syarat untuk mengajukan banding, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sejalan dengan ketentuan pasal 56 (2) K.U.H.A.P.

#### MAHKAMAH AGUNG R.I. :

- Atas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi di atas, terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI dengan alasan kasasi yang intinya: bahwa Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Pertama adalah juga berlaku untuk mengajukan permohonan banding ini, seandainya hal tersebut tidak berlaku, maka Panitera Pengadilan Negeri, tidak akan menerima permohonan banding tersebut, ex pasal 233 dari K.U.H.A.P.
- Setelah majelis Mahkamah Agung memeriksa kasus ini, pada akhirnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karena dinilai salah menerapkan hukum dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri kasus ini, dengan amar putusan berupa: Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di Jambi untuk memeriksa dan memutus Perkara tersebut. Menanggungkan beaya perkara sampai putusan pokok perkara.
- Putusan majelis Mahkamah Agung tersebut di atas, didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa istilah "wajib" menunjuk Penasehat Hukum, seperti yang disebut dalam pasal 56 (1) K.U.H.A.P. tersebut adalah bersifat: "imperatif". Ketentuan ini tertuju kepada "Pejabat" pada semua tingkat Pemeriksaan. Ketentuan ini tidak tertuju kepada terdakwa yang masih mempunyai hak untuk "menolak" penunjukkan tersebut atau bahkan boleh menolak untuk didampingi oleh seorang Penasehat hukum yang ditunjuk.
- Bahwa bertitik tolak pada dasar pemikiran ini, maka meskipun ada kata "wajib", terdakwa masih mempunyai hak kebebasan untuk menentukan sendiri sikapnya mengenai "mau" ataukah "tidak mau" didampingi seorang Penasehat Hukum.
- Bahwa meskipun terdakwa menyatakan "tidak mau", ia terdakwa masih dapat menunjuk Penasehat Hukum pilihannya sendiri, oleh karena itu meskipun terdakwa dalam tahap ini tidak harus membuat "Surat Kuasa", akan tetapi Pernyataan Kehendaknya terdakwa harus nampak ada dan hal tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

- Bahwa kebebasan kehendak untuk menentukan sikap mengenai pengajuan permohonan pemeriksaan banding juga harus ada pada terdakwa, begitu pula mengenai siapa yang akan menanda tangani permohonan banding itu.
- Bahwa apabila yang menandatangani permohonan banding itu adalah seorang Penasehat Hukum, maka Pengadilan Tinggi harus meyakinkan dirinya bahwa terdakwa telah memberikan persetujuannya, dalam bentuk Surat Kuasa Khusus.
- Bahwa oleh karena itu, menurut majelis Mahkamah Agung, pendapat Pengadilan Tinggi yang menyatakan untuk mengajukan permohonan banding ini, masih belum dilakukan penunjukan Penasehat Hukum oleh Pejabat yang bersangkutan.
- Bahwa akan tetapi, khusus dalam kasus ini, Mahkamah Agung RI ingin membantu terdakwa yang telah dirugikan karena adanya suatu kesalahan yang tidak diperbuat olehnya. Mahkamah Agung RI No. 131.K/Kr/1977 tanggal 14 Maret 1979 yakni Pengajuan Banding dari Penasehat Hukum yang tanpa disertai Surat Kuasa, adalah di luar kesalahan dan kemampuan terdakwa, karena terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk mengajukan permohonan banding harus dilakukan penunjukan kuasa lagi dari terdakwa atau disertai "Surat Kuasa Khusus" dari terdakwa, sebab, baik Hakim yang memutus perkara ini, maupun Panitera yang telah menerima pernyataan permohonan banding, ternyata tidak memberitahu tentang hal tersebut, apalagi dalam pemeriksaan kasasi kasus ini dapat diketahui bahwa permohonan kasasi yaitu terdakwa sendiri memang menghendaki pemeriksaan banding tersebut.
- Bahwa dengan dasar pemikiran yang demikian itu, maka Hakim Banding seharusnya menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut.
- Dengan inti pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Mahkamah Agung, setelah membatalkan putusan judex-facti, selanjutnya mengadili sendiri kasus ini dengan memberikan perintah kepada Hakim Banding untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding.

Demikianlah sebuah yuriprudensi yang berkaitan dengan kewajiban penunjukan penasihat hukum untuk perkara-perkara tertentu seperti dikualifikasi oleh Pasal 56 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP yang diperkuat oleh Yurisprudensi dari Mahkamah Agung tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penasihat hukum telah memiliki dasar

legitimasi yuridis yang jelas dan kuat untuk akses dalam proses peradilan pidana, meskipun belum terhadap semua perkara. Jelasnya untuk perkara-perkara yang tidak termasuk kualifikasi Pasal 56 KUHP, kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa tidak ada. Alhasil terhadap tersangka yang demikian ini, meskipun dirinya dikenakan penahanan, ia tidak wajib dihadirkan seorang penasihat hukum, meskipun ada kewajiban bagi penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 114 KUHP).

## 2. Putusan MARI Nomor 1565/K/Pid./1991<sup>29</sup>

### KASUS POSISI :

- \* Ketua K.U.D. Koperasi Unit Desa Ariesta, Bangodua Indramayu (Wanda), pada Januari 1989 dipanggil dan disidik oleh Kejaksaan Indramayu karena ada sangkaan/dugaan melakukan penyelewengan uang negara yaitu Kredit Usaha Tani yang berjumlah ratusan juta rupiah.
- \* Hasil pemeriksaan penyidik terhadap Ketua K.U.D. Ariesta pada Januari 1989 tersebut berhasil diungkapkan fakta bahwa Kredit Usaha Tani yang seharusnya disalurkan kepada para petani yang membutuhkan dalam rangka usaha meningkatkan produksi beras, ternyata kredit tersebut diberikan kepada mereka yang bukan petani untuk kepentingan lain yang bukan kepentingan peningkatan produksi pangan nasional.
- \* Jumlah uang Kredit Usaha Tani tersebut yang dipergunakan untuk keperluan lain, antara lain :

- Gaji karyawan	- Rp 18.000.000,-
- Honor Ketua Kelompok	- Rp 12.533.123,-
- Membuat bangunan penggilingan K.U.D. Ariesta	- Rp 2.500.000,-

---

<sup>29</sup> Dikutip dari Majalah Hukum "Varia Peradilan", Tahun IX. Nomor 103, April 1994, hal. 5-9.

- Untuk Ketua KUD sendiri - Rp 42.559.072,-  
Seluruhnya berjumlah - Rp 75.632.195,-
- Dipinjamkan kepada pihak ketiga yang bukan petani, yaitu : kepada Tasam - Suroto - Along - Nurdin - Tanimah - Basir - Saduki - Kalimin - Tamum - Nurcahya - Cs berjumlah Rp 76.121.243,58
- \* Perbuatan Ketua K.U.D. Ariesta ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 151.753.438,58.

#### KEJAKSAAN NEGERI :

- \* Ketua K.U.D. Ariesta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa ke Pengadilan Negeri, didakwa melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :
- \* Dakwaan Primair :  
ex pasal 1 (1) sub "a" jo 28 U.U. No. 3/1971.
- \* Dakwaan Subsidiar :  
ex pasal 1 (1) sub "b" jo 28 U.U. No. 3/1971
- \* Dakwaan Lebih Subsidiar :  
ex pasal 415 K.U.H.P. jo pasal 1 (1) sub "c" jo 28 U.U. No. 3/1971.

#### PENGADILAN NEGERI :

- \* Ketua K.U.D. Ariesta dalam persidangan Pengadilan Negeri melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) ex pasal 156 (1) (2) Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.) yang pada pokoknya mengemukakan bahwa penyidikan Terdakwa dalam perkara ini adlaah tidak sah, sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah tersebut menjadi tidak sah pula.
- \* Sehubungan dengan adanya keberatan (eksepsi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya itu, maka Hakim Pertama memeriksa dan meneliti keberatan (eksepsi) tersebut sebelum memasuki materi pokok perkaranya.
- \* Dalam "Putusan Sela" yang diberikan oleh Hakim Pertama memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- \* Berdasar atas ancaman pidana terhadap perbuatan yang disangkakan kepada tersangka dihubungkan dengan maksud ex pasal 56 K.U.H.A.P., maka pengadilan berpendapat : bahwa pada semua tingkat pemeriksaan (termasuk tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan) bagi tersangka tersebut, adalah wajib ditunjuk Penasehat Hukum.

- \* Pasal 56 K.U.H.A.P. ini harus ditafsirkan, bahwa yang dimaksud pejabat pada semua tingkat pemeriksaan adalah pejabat yang wajib menunjuk Penasehat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan yaitu : Penyidik - Penuntut Umum - Hakim.
- \* Pasal 56 K.U.H.A.P. bukan bermaksud menunjuk tentang kebebasan memilih waktu untuk kapan menunjuk Penasehat hukum, seperti yang dikemukakan oleh Jaksa dalam tanggapannya, melainkan adalah untuk menentukan pejabat dari masing-masing tingkat pemeriksaan yang diwajibkan menunjuk Penasehat Hukum tersebut.
- \* Penunjukan Penasehat Hukum bagi tersangka adalah merupakan Hak Asasi dari Tersangka yang dijunjung tinggi dalam K.U.H.A.P.
- \* Dalam kasus ini, menurut Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara, ternyata tersangka telah disidik dan diperiksa oleh Penyidik pada tahun 1989, sedangkan penunjukan Penasehat Hukum bagi tersangka baru dilakukan tanggal 10 Januari 1990.
- \* Dari fakta ini, maka Penyidik ternyata tidak melaksanakan ketentuan undang-undang secara sempurna dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka dalam perkara ini, yaitu Jaksa melakukan tindakan Penyidikan terhadap tersangka tanpa menunjuk atau didampingi oleh Penasehat Hukum, ex pasal 56 K.U.H.A.P.
- \* Dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Hakim Pertama berkesimpulan, bahwa dengan tidak diterapkannya ex pasal 56 K.U.H.A.P. oleh Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka atas perkara ini, maka penyidikan yang telah dilakukan oleh Jaksa dalam perkara ini adalah tidak sah menurut undang-undang.
- \* Di samping itu, Penyidik juga melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka, sebelum pemeriksaan terhadap para saksi.  
Para saksi diperiksa tanggal 9 Januari 1990. Tersangka diperiksa tanggal 19 Januari 1990.  
  
Penyidikan yang demikian ini adalah bertentangan dengan maksud ex pasal 1 ayat (2) K.U.H.A.P.
- \* Oleh karena hasil penyidikan dalam perkara ini dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun atas hasil penyidikan yang tidak sah ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima.



- \* Dengan mengingat pasal 1 ayat (2) dan pasal 56 K.U.H.A.P., akhirnya Hakim Pertama memberikan putusan (sela) yang amarnya menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

#### PENGADILAN TINGGI :

- \* Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Hakim Pertama tersebut di atas dan mengajukan verzet (perlawanan) terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung.
- \* Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai di dalam putusannya adalah benar dan diambil alih oleh Pengadilan Negeri sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini.
- \* Berdasar alasan ini, maka Pengadilan Tinggi memberikan putusan menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri.

#### MAHKAMAH AGUNG RI :

- \* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut di atas ditolak Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan keberatan (alasan) kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut :
- \* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah sah menerapkan hukum :
  1. Ex pasal 449 (2) K.U.H.A.P.
  2. Ex pasal 56 - 109 - 156 (1) dan 160 K.U.H.A.P.
- \* Pengadilan Tinggi tidak melakukan pemeriksaan terhadap "Memorie Verzet".
- \* Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa terdakwa tanpa menghadirkan Penuntut Umum. Mengadili perkara verzet ini tidak dalam proporsi aturan undang-undang yang benar. Hal ini nampak dari kata-kata :
 

" Serta keterangan Terdakwa sendiri menunjukkan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini telah memanggil dan memeriksa terdakwa dan cara demikian itu jelas melanggar ex pasal 149 (2) K.U.H.A.P.
- \* Andaikan proses pemeriksaan/meminta keterangan Terdakwa tersebut karena kesalahan penafsiran Pengadilan Tinggi yang menafsirkan perkara dalam tahap Verzet menjadi perkara Banding, tentunya harus memperhatikan pasal 238 (4) K.U.H.A.P.

- \* Mahkamah Agung RI setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga semua keberatan yang diajukan oleh Jaksa (Pemohon Kasasi) tidak dapat dibenarkan.
- \* Pendirian Mahkamah Agung tersebut dilandasi oleh alasan juridis yang intisarinnya sebagai berikut :
- \* Syarat-syarat penuntutan terhadap Terdakwa ternyata tidak dipenuhi oleh Penyidik (Jaksa), karena Penyidik sewaktu memeriksa (melakukan penyidikan) terhadap tersangka tidak menunjuk Penasehat Hukum bagi tersangka sejak di awal penyidikannya. Karena tidak dipenuhi syarat ini oleh Penyidik, maka Tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun dalam pasal 156 ayat (1) K.U.H.A.P. dirumuskan (disebut):  
" Dakwaan tidak dapat diterima ".
- \* Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan "Putusan Sela" Pengadilan Negeri, perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi seperti tertera di bawah ini.
- \* Akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan :

**MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi JAKSA PENUNTUT UMUM.
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi, dst.
- MENYATAKAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM, TIDAK DAPAT DITERIMA.

Demikian sebuah yurisprudensi Mahkamah Agung khususnya mengenai perkara korupsi dalam kaitannya dengan penegakkan hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa. Putusan MARI ini dilihat dari segi perkembangan hukum, memiliki arti yang sangat penting terutama dalam kaitannya dengan masalah perlindungan hak asasi manusia. Ini merupakan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia, dimana aparat penegak hukum didorong untuk bersikap hati-hati dan memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa khususnya adalah hak untuk didampingi

oleh penasihat hukum. Dalam yurisprudensi inilah, hemat penulis, eksistensi penasihat hukum telah mendapatkan tempat yang sewajarnya dalam proses peradilan pidana, meskipun ini masih terbatas untuk tindak pidana korupsi.

Sebagai bahan perbandingan, ada baiknya dilihat bagaimana penegakkan hak atas bantuan hukum sebagaimana yang ada di Amerika Serikat. Studi perbandingan ini penting dilakukan setidaknya untuk memberikan suatu wawasan sehingga bisa diambil hikmahnya, tentu saja semuanya demi kepentingan hukum dan keadilan. Sudah pasti tidak semua hal yang ada di negara lain bisa begitu saja diambil untuk diterapkan di negara kita, tetapi mengetahui apa yang ada di negara lain, hemat penulis tidak kurang manfaatnya.

#### **Kasus Gideon V Wainwright di Amerika Serikat**

Sejarah hukum acara pidana di Amerika Serikat telah mencatat perkembangan yang cukup menakjubkan dalam kaitannya dengan perkembangan hak atas bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu. Hal ini tercermin dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (United States Supreme Court) terhadap perkara Gideon V Wainwright pada tahun 1963. Secara singkat posisi dari kasus tersebut dapat diuraikan di bawah ini.

Gideon yang memiliki nama lengkap Clarence Earl Gideon adalah seorang narapidana yang ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan Florida Raiford, Florida. Gideon dihukum 5 tahun penjara atas tuduhan telah melakukan pembongkaran pada gudang Bay Harbor Poolroom di Panama City, Florida dengan maksud untuk mencuri uang. Ketika berada di lembaga Pemasyarakatan tersebut Gideon mencoba mengajukan suatu petisi kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat yang intinya bahwa peradilan yang dijalankan terhadapnya bertentangan dengan Konstitusi karena tidak merupakan suatu proses hukum yang wajar. Amandemen (ketentuan tambahan) ke-14 pada konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa, setiap negara bagian tidak diperkenankan untuk mengambil jiwa seseorang, kemerdekaan atau harta bendanya kecuali melalui proses hukum yang wajar (No state shall make or enforce any law which shall abridge the privilege of immunities of citizens of the united states nor shall any state deprive any person of life, liberty or property, without due process of law). Gideon merasa perlu untuk menentukan hal ini karena negara bagian telah merampas kemerdekaannya.

Dalam salah satu sidang peradilannya, pemohon telah meminta agar kepadanya diberikan bantuan seorang penasihat hukum pada mahkamah yang bersangkutan. Permohonannya tersebut ditolak. Pemohon menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan untuk memberikan bantuan hukum hanya bagi para terdakwa yang diancam dengan hukuman

berat. Tetapi mahkamah tersebut tak menghiraukan permintaannya.<sup>30</sup>

Jadi Gideon dalam permohonan tersebut menginginkan agar ia dibantu oleh seorang penasihat hukum ketika diadili. Ia mengharapkan agar penasihat hukum tersebut dapat membantu pembelaan terhadap tuduhan yang dijatuhkan kepadanya, karena ia tak mampu membayar seorang pengacara, semestinya negara bagian Florida menyediakan seorang pengacara baginya. Mengadili seorang tanpa bantuan seorang penasihat hukum, hal itu sama dengan mengadilinya tanpa suatu proses hukum yang wajar.

Dengan perkataan lain Gideon menunjukkan bahwa Konstitusi AS menjamin hak bagi seseorang yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila ia diancam dengan hukuman berat. Hal itu memang beralasan, tetapi Mahkamah Agung pernah menolak perkara yang serupa pada tahun 1942.

Dalam perkara Betts dan Brandy pada tahun 1942, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa dalam suatu "proses hukum yang wajar seorang terdakwa tidak diharuskan didampingi oleh seorang penasihat hukum dalam perkara pidana. Ia dapat melakukan pembelaannya tanpa bantuan seorang pengacara. Menurut Mahkamah Agung, Konstitusi hanya mengharuskan negara bagian menyediakan pengacara-

---

<sup>30</sup>Anthony Lewis, The Supreme Court And How it Works, Diterjemahkan oleh Ethy R Agoes. dan Robert N. Hornicle, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 1984. hal 13.

pengacara bagi orang-orang tak mampu dalam "keadaan-keadaan istimewa" yang tak memungkinkannya melakukan suatu pembelaan tanpa bantuan seorang penasihat hukum. Misalnya saja kalau ia sakit, belum cukup umur, mendapat gangguan jiwa, karena perkaranya itu cukup rumit, sehingga sukar untuk ditangani oleh orang biasa saja. Hanya dalam "keadaan-keadaan istimewa" seperti itu saja negara-negara bagian diwajibkan menyediakan penasihat-penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu.

Dalam kasus Gideon tersebut di atas, ternyata bahwa ia tidak pernah menunjukkan adanya keadaan-keadaan istimewa kecuali hanya selalu menekankan bahwa Konstitusi menjamin haknya untuk mendapatkan bantuan hukum karena ia seorang yang tidak mampu dan diancam dengan hukuman berat.

Apa yang kemudian terjadi adalah bahwa Mahkamah Agung AS pada tanggal 4 Juni 1962 memutuskan untuk menerima petisi yang diajukan oleh Gideon tersebut. Selanjutnya MA melakukan sidang sendiri dan mengambil keputusan yang berupa membatalkan putusan pengadilan Florida terhadap perkara Gideon dan mengembalikannya untuk diselesaikan sebagaimana mestinya. Ini berarti pengadilan Florida diperintahkan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan memberi kesempatan kepada Gideon untuk diadili kembali dengan bantuan seorang penasihat hukum.

Pada bulan April 1963, Mahkamah Agung mengirimkan sebuah surat dinas yang berisi keputusan terhadap perkara Gideon kepada Mahkamah Agung Florida, dan selanjutnya Mahkamah Agung Florida mengeluarkan perintah untuk peradilan baru bagi Gideon.

Demikian akhir dari perkara Gideon pada Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dengan suatu cara istimewa keputusan tersebut disebarluaskan ke seluruh negara kemudian diterbitkan oleh perusahaan percetakan negara sebagai brosur. Brosur ini kemudian dimasukkan dalam salah satu jilid dari Himpunan Keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang disebut "United States Reports". Sejak saat itu di antara para ahli hukum perkara ini terkenal sebagai "Gideon v. Wainwright, 372 U.S 355" yang berarti bahwa keputusan terhadap perkara ini dapat ditemukan pada halaman 355 dari jilid ke 372 dari himpunan tersebut.<sup>31</sup>

Demikian sebuah kasus yang kemudian mempunyai dampak besar bagi perkembangan hukum acara pidana di AS. Hikmah dari kasus tersebut adalah bahwa hak atas bantuan hukum bagi seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu hal yang asasi, sehingga merupakan suatu keharusan bagi terlaksananya proses hukum yang wajar.

---

<sup>31</sup>Ibid.

Di Amerika Serikat, hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari peradilan oleh juri bagi mereka yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dijamin oleh Konstitusi yaitu melalui Amandemen keenam seperti dikehendaki oleh P. Marcus bahwa ;

" Under the sixth Amendment the accused shall enjoy the right... to have the assistance of counsel for his defence ".<sup>32</sup>

Di Amerika Serikat, hak untuk mendapatkan bantuan hukum lebih cenderung diartikan sebagai hak setiap orang untuk didampingi oleh penasihat hukum, tanpa melihat apakah ia mampu atau tidak. Hukum pidana makin rumit dan hal ini menyebabkan makin sukarnya orang melakukan pembelaan tanpa bantuan seorang penasihat hukum. Tidak ada satu alasanpun yang dapat membuktikan bahwa orang-orang yang miskin tidak begitu memerlukan bantuan hukum seperti mereka yang mampu.

Perkara Gideon v Wainwright pada garis besarnya merupakan suatu penghormatan kepada seorang manusia. Tanpa menghiraukan kenyataan-kenyataan yang ada Gideon berpegang teguh pada pendapatnya bahwa ia berhak atas bantuan hukum. Ia memegang teguh pendapatnya itu dan memperjuangkannya sampai ke Mahkamah Agung. Kemenangannya merupakan suatu bukti bahwa orang yang sangat miskin, lemah, tidak bertenangan, dapat membawa perkaranya sampai ke mahkamah tertinggi

---

<sup>32</sup>p. Marcus Criminal Justice Reforms In The United States dalam International Review Of Penal Law (Movement To Reform Criminal Procedure and to Protect Human Rights) Preparatory Colloquium Section III, Toledo (Spain) 1-4 April 1992. P. 1367.



di negara seperti Amerika Serikat, dan dapat menyebabkan suatu perubahan besar dalam dunia hukum. Perkaranya merupakan bagian dari sejarah dan akan tetap dianggap demikian oleh beribu-ribu ahli hukum serta para hakim yang mungkin mengenal Gideon sebagai orang yang dengan tegas berdiri di muka ruang sidang pengadilan Florida untuk menyatakan bahwa " Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa saya berhak untuk mendapatkan bantuan hukum." Ini merupakan suatu keajaiban hukum dimana hukum itu bergerak melalui suatu perkara ke perkara lain untuk mencari keadilan.

#### C. Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kotamadya Surakarta

Di bawah ini akan dilakukan suatu analisis mengenai pelaksanaan hak bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana yang didasarkan pada penelitian lapangan. Data yang disajikan diperoleh dari para pihak yang terkait dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang mencakup polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum, dan tersangka/terdakwa di wilayah hukum kotamadya Surakarta. Dengan demikian dalam penelitian lapangan ini terkait instansi criminal justice system yaitu Polresta Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, dan RUTAN Klas I Surakarta, serta IKADIN cabang Solo.

## 1. Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum Di Tingkat Kepolisian

Seperti telah dikemukakan pada bagian muka, bahwa akses penasihat hukum dalam proses peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP, masih bersifat terbatas. Artinya kewajiban menunjuk penasihat hukum untuk tersangka/terdakwa bagi pejabat pada semua tingkat pemeriksaan terbatas untuk tindak-tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu dimaksud adalah sebagaimana dikualifikasi oleh Pasal 56 KUHAP yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, lima belas tahun atau lebih, dan terhadap tindak-tindak pidana yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun. Dengan demikian terhadap tindak-tindak pidana semacam ini, terdapat konsekuensi bagi pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana untuk :

- a. Menunjuk dan sekaligus berusaha menghadirkan penasihat hukum bagi tersangka yang secara riil membutuhkan bantuan penasihat hukum;
- b. Kewajiban menunjuk penasihat hukum untuk tersangka/terdakwa bagi semua pejabat pada semua tingkat pemeriksaan tersebut merupakan kewajiban yuridis yang seharusnya mempunyai implikasi yuridis pula apabila ketentuan tersebut diabaikan. Namun mengenai hal ini Pasal 56 KUHAP tidak secara jelas memuat sanksi yang bila dikenakan pada pejabat

yang mengabaikan ketentuan tersebut, tetapi dalam praktek penegakkan hukum sebagaimana juga sudah dikutip dimuka, Pasal 56 KUHAP tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 510 K/Pid./1988 yang menegaskan bahwa penunjukan penasihat hukum tersebut bersifat imperatif, meskipun tersangka/terdakwa masih mempunyai hak untuk menolak penasihat hukum yang ditunjuk tersebut. Mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut menurut hasil penelitian di Polresta Surakarta diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a. Terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana berat, artinya termasuk kualifikasi Pasal 56 KUHAP biasanya tersangka yang bersangkutan sudah tersedia penasihat hukum yang sanggup mendampingi tersangka. Menurut penjelasan dari Ketua IKADIN Cabang Solo, pihak IKADIN memang telah menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian berkaitan dengan kebutuhan akan penasihat hukum untuk perkara-perkara yang berat. Bentuk kerjasama tersebut berupa suatu konsensus dan pengertian bersama. Setiap kali terjadi tindak pidana berat, maka pihak kepolisian akan segera menghubungi pihak IKADIN, untuk selanjutnya IKADIN mengirim suatu team yang biasanya terdiri dari tiga orang penasihat hukum, dua orang

penasihat hukum yunior, dan satu orang penasihat hukum senior. Adapun yang dimaksud dengan penasihat hukum yunior adalah penasihat hukum yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang dalam istilah praktek sering disebut dengan pengacara praktek. Sedangkan penasihat hukum senior adalah penasihat hukum yang telah mendapat pengangkatan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang dalam istilah praktek mereka ini menyebut dirinya sebagai Advokat.

- b. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang dikenakan penahanan, penasihat hukum ini harus memperlihatkan surat kuasa khusus dari tersangka, dan menunjukkan kartu tanda pengenal sebagai pengacara praktek atau Advokat. Surat kuasa khusus tersebut beserta kartu tanda pengenal sebagai pengacara praktek/Advokat harus ditunjukkan kepada penjaga tahanan (Sabhara) atas persetujuan perwira SAMAPTA. Perlu diketahui bahwa disamping ditahan di Polresta Surakarta, tersangka yang ditahan di tingkat kepolisian ini sebagian juga dititipkan di Rutan Klas I Surakarta. Terhadap tersangka yang ditahan dan dititipkan di Rutan Klas I Surakarta diberi kode A1 artinya tersangka yang bersangkutan adalah titipan dari kepolisian. Biasanya tersangka yang dititipkan

di RUTAN adalah tersangka yang sudah selesai menjalani pemeriksaan di kepolisian. Apabila penasihat hukum akan berhubungan dengan pihak tersangka yang ditahan di RUTAN, maka penasihat hukum yang bersangkutan harus membawa izin dari Kasatserse Polresta. Waktu jam berkunjung bagi penasihat hukum dibatasi hanya pada waktu jam kerja kantor, tetapi lamanya penasihat hukum bertemu dengan tersangka tidak dibatasi, namun tetap dalam pengawasan yaitu dengan cara melihat dan tidak boleh mendengar pembicaraan antara keduanya. Sementara itu akses tersangka yang ditahan kepada keluarga dan handai taulannya diperbolehkan sepanjang mereka mampu menunjukkan surat keterangan dari RT, RW, atau dari kalurahan. Jumlah keluarga yang akan mengunjungi tersangka tidak dibatasi, tetapi dengan pengawasan yang berupa mendengar dan melihat pembicaraan antar mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti berkolusi untuk melarikan diri dan sebagainya. Bahkan seandainya ada keluarga yang akan mengirim makanan kepada tersangka, hal itu diperiksa secara ketat. Sebagai gambaran seandainya yang dikirim itu sepotong roti yang panjang, maka roti tersebut harus dipotong-potong terlebih dahulu, untuk mencegah jangan

sampai misalnya didalamnya diisi dengan gergaji besi dan sebagainya.

- c. Menurut penjelasan dari Ketua IKADIN Cabang Solo dan juga beberapa penasihat hukum yang penulis hubungi, dalam mendampingi tersangka yang sedang diperiksa oleh penyidik, pada umumnya penasihat hukum hanya boleh pasif, artinya hanya boleh mendengar serta melihat pemeriksaan. Keterlibatan penasihat hukum secara aktif dalam proses penyidikan seperti mengajukan keberatan atas pertanyaan penyidik pada tersangka, atau memberi nasihat-nasihat yang bersifat yuridis kepada tersangka hanya dimungkinkan sepanjang penyidik mengizinkan. Artinya sekiranya penasihat hukum ingin bersikap lebih aktif, hal itu memerlukan kerjasama dan pengertian bersama antara penasihat hukum dan penyidik.
- d. Terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana berat ini, apabila ia menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum, pihak kepolisian menyediakan surat pernyataan menolak didampingi penasihat hukum, dan dalam praktek hal itu dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. Ini merupakan perkembangan dalam praktek dan telah disepakati dalam forum komunikasi antara

aparatus penegak hukum sebagaimana tertuang dalam Keputusan bersama DILKEHJAPOL tanggal 31 Agustus 1994 point. 6. DILKEHJAPOL adalah forum komunikasi antar aparat penegak hukum yang terdiri dari Kanwil. Depkeh. Jawa Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kepala Kepolisian Jawa Tengah. Hasil pertemuan antar pejabat tersebut dituangkan dalam bentuk KEPUTUSAN BERSAMA. Forum tersebut diciptakan dalam rangka menjamin kesinambungan usaha-usaha keterpaduan antar aparat penegak hukum di daerah Propinsi Jawa Tengah, khususnya dalam pelaksanaan KUHAP.

- e. Dalam Keputusan Bersama DILKEHJAPOL Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1995 pada point 25 antara lain dikemukakan bahwa bilamana di suatu daerah tidak terdapat penasihat hukum, agar POLSEK meminta bantuan POLRES untuk menunjuk penasihat hukum. Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak bersedia juga didampingi penasihat hukum, meskipun sudah ditunjuk penasihat hukum, agar penyidik atau penuntut umum membuat Berita Acara Penolakan, yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik atau penuntut umum dan surat penunjukkan penasihat hukum serta Berita Acara Penolakan oleh tersangka atau terdakwa tersebut dilampirkan dalam berkas

perkara. Dengan adanya surat-surat tersebut, maka kewajiban untuk menyediakan penasihat hukum sudah selesai. Jadi Keputusan Bersama DILKEHJAPOL tanggal 19 Januari 1995 point. 25 ini tampaknya merupakan penyempurnaan dari apa yang sudah tertuang dalam Keputusan Bersama DILKEHJAPOL tanggal 31 Agustus 1994 point.6.

Itulah hal-hal yang bisa dikemukakan sehubungan dengan pelaksanaan bantuan hukum khususnya perkara-perkara pidana yang termasuk kualifikasi Pasal 56 KUHP dimana pejabat pada semua tingkat pemeriksaan diwajibkan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa. Selanjutnya bagaimanakah pelaksanaan hak bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana di luar kualifikasi yang ditentukan oleh Pasal 56 KUHP ?. Terhadap perkara-perkara yang demikian ini, bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa masih dalam taraf "hak". Konsekuensinya adalah tidak ada kewajiban hukum apalagi sanksi hukum bagi pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa.

Kewajiban pejabat penegak hukum hanyalah untuk memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa bahwa dirinya berhak atas bantuan hukum/didampingi oleh penasihat hukum. Selanjutnya bilamana tersangka/terdakwa tersebut menghendaki didampingi oleh penasihat hukum,



hal itu diserahkan sepenuhnya kepada tersangka/terdakwa yang bersangkutan. Terhadap tersangka/terdakwa yang tidak dikenakan penahanan, hal itu tentu tidak menjadi masalah, sebab mereka bisa leluasa untuk mencari dan memilih penasihat hukum sendiri yang ia kehendaki. Namun bagi tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan, maka hal itu merupakan masalah. Mengenai hal ini pihak kepolisian juga mengakui bahwa pihaknya mengalami kesulitan untuk mencarikan penasihat hukum, sebab anggaran untuk itu tidak ada. Jangankan terhadap perkara-perkara yang menurut undang-undang belum diwajibkan untuk mendapat bantuan hukum, terhadap perkara-perkara yang menurut undang-undang diwajibkan untuk ditunjuk seorang penasihat hukum bagi tersangka saja juga tidak tersedia dana untuk itu.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka tidak mengherankan jika dalam praktek penegakkan hukum, masih banyak perkara-perkara pidana yang tersangka/terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum baik sebelum sidang pengadilan maupun dalam sidang pengadilan. Sebagai gambaran, dari hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari para tersangka/terdakwa/terpidana yang ditempatkan di dalam rumah tahanan negara (RUTAN) KLAS I Surakarta sampai awal bulan Juni 1997 menunjukkan bahwa sebagian kecil saja dari mereka yang sempat menikmati haknya mendapatkan bantuan hukum. Dari sejumlah 40 orang yang dijadikan responden penelitian, hanya terda-

pat 4 orang saja yang dalam proses pemeriksaannya didampingi oleh penasihat hukum (10 %). Ini berarti selebihnya yaitu sebanyak 90 % sama sekali belum tersentuh oleh bantuan hukum.

## 2. Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum Di Tingkat Kejaksaan

Sejak berlakunya KUHP, Kejaksaan tidak lagi mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan lanjutan terutama untuk tindak pidana umum yaitu tindak-tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan bagi kejaksaan adalah dalam hal tindak pidana khusus seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, dan sebagainya. Jadi dalam hal tindak pidana umum pihak kejaksaan sama sekali tidak bersentuhan secara fisik dengan tersangka, artinya tidak pernah ada pemeriksaan secara fisik terhadap tersangka. Apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan hanyalah memeriksa berkas perkara yang telah disusun oleh pihak kepolisian. Dengan demikian pelaksanaan hak bantuan hukum bagi tersangka juga hanya terbatas pada hak-hak penasihat hukum dalam kaitannya dengan upaya pembelaan bagi tersangka. Menurut keterangan dari Ketua IKADIN Cabang Solo, pihak penasihat hukum di tingkat kejaksaan ini memang tidak lagi mendampingi tersangka. Kewajiban penasihat hukum di tingkat kejaksaan ini hanyalah berusaha untuk mendapatkan surat dakwaan atas diri tersangka guna mempersiapkan pembelaan, dalam sidang pengadilan

kelak, dan dalam praktek pihak penasihat hukum selalu sudah mendapat surat dakwaan tersebut pada waktu perkara sudah digelar di sidang pengadilan.

Menurut penjelasan dari pihak kejaksaan, usaha pihak kejaksaan agar komponen penasihat hukum selalu terkait dengan sistem peradilan pidana dilakukan dengan cara selalu mengembalikan berkas perkara khususnya untuk perkara yang wajib didampingi oleh penasihat hukum yaitu perkara yang dikualifikasikan oleh Pasal 56 KUHP, jika dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian, pihak kepolisian tidak menghadirkan penasihat hukum atau dalam berkas perkara yang dikirim tersebut tidak dilengkapi dengan berita acara penolakan didampingi oleh penasihat hukum yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik, dalam hal tersangka menolak didampingi oleh penasihat hukum.

Dengan demikian, tampak dalam praktek bahwa optimalisasi penggunaan hak bantuan hukum masih diprioritaskan untuk tindak-tindak pidana berat, sedangkan untuk tindak-tindak pidana yang dianggap tidak berat seperti pencurian, penggelapan dan sebagainya, bantuan hukum bagi tersangka belumlah mendapat perhatian seperti yang diharapkan. Artinya hal itu sepenuhnya tergantung pada usaha dari pihak tersangka/terdakwa sendiri.

Berbeda halnya dalam hal tindak pidana khusus dimana pihak kejaksaan dapat bertindak sebagai penyidik, dalam hal ini pihak kejaksaan akan selalu berpedoman

pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K/Pid./1991, khususnya mengenai perkara korupsi. Menurut putusan MARI tersebut pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib melaksanakan Pasal 56 KUHP secara sempurna, artinya harus menunjuk dan menghadirkan penasihat hukum bagi tersangka yang akan diperiksa. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka akan berakibat hukum semua hasil pemeriksaan tersebut akan dinyatakan tidak sah.

### 3. Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum Di Tingkat Pengadilan

Terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana berat yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, lima belas tahun atau lebih, telah disediakan dana bantuan hukum dari pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan dana bantuan hukum ini juga berlaku bagi terdakwa yang tidak mampu secara ekonomis dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun. Bahkan menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 1 Juni 1980 Nomor : M.02.Um.09.08. Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum jo Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 5 Nopember 1981 Nomor : M.01.Um.09.08 Tahun 1981 tentang Perubahan dan Perbaikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.Um.09.08 Tahun 1980 tentang petunjuk Pelaksanaan

Bantuan Hukum ditetapkan bahwa Ketua Majelis Hakim dalam hal suatu kejahatan itu menarik perhatian masyarakat luas, Ketua Majelis Hakim yang akan mengadili perkara itu setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri, menunjuk seorang atau lebih penasihat hukum yang mempunyai reputasi atau nama baik dan sanggup memberikan bantuan dan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.

Mengenai pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ini, diatur melalui Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada perkara-perkara pidana saja, tetapi juga perkara perdata, bahkan perkara tata usaha negara. Adapun Instruksi Menteri Kehakiman yang dimaksud adalah :

- a. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.08-UM.06.02. Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.24-UM.06.02. 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang kurang mampu;
- b. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 Tahun 1994, Tanggal 21 Juli 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum;
- c. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Program Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum.

Dalam ketiga Instruksi Menteri Kehakiman tersebut memang terdapat beberapa perbedaan, antara lain bahwa dalam Instruksi Menkeh. No.: M.08-UM.06.02. Tahun 1992, dimungkinkan menunjuk penasihat hukum secara perorangan maupun dari organisasi bantuan hukum. Sedangkan dalam Instruksi Menkeh No. M.01-Um.08.10 Tahun 1994 Tanggal 21 Juli 1994 dan juga dalam Instruksi Menkeh No.M.01-Um.08.10 Tahun 1996 tanggal 21 Nopember 1996, penunjukan penasihat hukum tersebut hanya diperuntukan bagi penasihat hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum. Dalam Instruksi Menkeh. tahun 1992 tersebut hanya terbatas untuk orang-orang tidak mampu yang akan berperkara di Pengadilan Negeri saja.

Sedangkan dalam Instruksi Menkeh. tahun 1994 dan Tahun 1996 tidak hanya berlaku bagi orang-orang tidak mampu yang akan berperkara di Pengadilan Negeri saja tetapi juga meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.08.10. Tahun 1996, Tanggal 21 Nopember 1996 antara lain dikemukakan bahwa Program Bantuan Hukum sebenarnya mempunyai tujuan ganda yaitu :

### 1. Tujuan Kemanusiaan

Program bantuan hukum diharapkan dapat mendidik dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

### 2. Tujuan Peningkatan Kesadaran Hukum

Program Bantuan Hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Program Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui Departemen Kehakiman bagi golongan masyarakat yang kurang mampu meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Penasihat Hukum yang tergabung dalam suatu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi golongan masyarakat yang kurang mampu untuk membela perkara mereka di pengadilan.
- b. Penyediaan sejumlah dana tertentu bagi lembaga bantuan hukum yang bersedia membela perkara golongan masyarakat yang kurang mampu di pengadilan.

Menurut Instruksi Menteri Kehakiman tersebut, mereka yang termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu adalah orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap, atau orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk membiayai pembelaan perkaranya di pengadilan. Keadaan kurang mampu ini berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah, Surat Ketetapan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Surat Pernyataan kurang mampu yang bersangkutan di atas segel yang dilegalisasi oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan Program Bantuan Hukum ini antara lain ditetapkan bahwa setiap orang yang masuk golongan masyarakat yang kurang mampu dan akan berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum dari Pemerintah. Permohonan tersebut diajukan kepada Lembaga Bantuan Hukum setempat yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman disertai keterangan ketidakmampuannya dari Kepala Desa atau Lurah, atau Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri atau surat pernyataan kurang mampu yang bersangkutan di atas segel yang dilegalisasi oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setempat. Setelah itu kemudian Lembaga Bantuan Hukum meneliti



permohonan tersebut dan apabila berpendapat bahwa orang yang dimaksud patut diberi bantuan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum menunjuk Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Dana Bantuan Hukum diserahkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diserahkan lebih lanjut kepada Lembaga Bantuan Hukum setelah menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA dan dapat berlaku surut sepanjang masih dalam satu tahun anggaran. Demikian antara lain hal-hal yang diatur dalam Instruksi Menteri Kehakiman tersebut.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Kehakiman yang telah disebutkan di atas, maka untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta ditetapkan sebanyak 6 buah Lembaga Bantuan Hukum dengan perincian dana per LBH sebagai berikut.

TABEL II

## BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN MASYARAKAT YANG KURANG

## MAMPU YANG MELALUI LEMBAGA BANTUAN HUKUM

TAHUN ANGGARAN 1997/1998

No.	NAMA LBH	Jumlah Perkara	Jumlah Anggaran per LBH	Jumlah Seluruhnya
1	BKBH UNS	15	Rp.3.750.000,-	
2	LBPH Veteran RI	25	Rp.6.750.000,-	
3	BKBH UNISRI	10	Rp.2.500.000,-	
4	BKBH UMS	10	Rp.2.500.000,-	
5	YAYASAN PENGABDI HUKUM INDONESIA	10	Rp.2.500.000,-	
6	LBPH KOSGORO	30	Rp.7.500.000,-	
	JUMLAH	100		Rp.25.000.000,-

Sumber : Data di Pengadilan Negeri Surakarta

Perlu dikemukakan di sini bahwa besarnya anggaran setiap perkara adalah Rp.250.000,-. Jadi apabila disimak mengenai data anggaran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, secara umum bisa dikatakan bahwa dalam satu tahun anggaran ditetapkan jumlah perkara yang bisa mendapat bantuan hukum ada sebanyak 100 perkara dengan alokasi dana seperti tersebut dalam tabel di atas. Dalam hal ini bisa dipersoalkan seandainya dalam tahun anggaran yang bersangkutan ternyata ada sejumlah kasus yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan, hal ini berarti sisa kasus tersebut tidak lagi mendapat jaminan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Jadi kesimpulan yang bisa dikemukakan berdasarkan data di atas adalah bahwa alokasi dana bantuan hukum khususnya untuk perkara pidana masih diprioritaskan untuk perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman berat yaitu pidana mati, lima belas tahun atau lebih diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun dalama hal terdakwa tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri. Ini berarti bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana di luar kualifikasi seperti tersebut di atas, bisa atau tidaknya terdakwa didampingi oleh penasihat hukum sangat tergantung pada idealisme pihak lembaga bantuan hukum setempat atau penasihat hukum. Selama tidak ada uluran tangan dari penasihat hukum atau lembaga bantuan hukum yang berbudi luhur, selama itu juga rakyat kecil tidak akan pernah mampu memanfaatkan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis setuju dengan pendapat Yahya Harahap<sup>33</sup> yang mengemukakan bahwa supaya bantuan hukum akrab dengan rakyat kecil yang tidak mampu membayar imbalan jasa, haruslah terdapat suatu pasal ketentuan yang menegaskan adanya "kewajiban hukum" yang bersifat imperatif untuk memberi bantuan hukum kepada setiap anggota masyarakat tanpa kecuali. Bilamana selama ini khususnya untuk tindak pidana berat kewajiban hukum yang bersifat imperatif tersebut telah dibebankan kepada pejabat pada

---

33. Yahya Harahap, Op.cit. hal. 368.

semua tingkat pemeriksaan (Vide Pasal 56 KUHP), maka terhadap perkara lain di luar yang dikualifikasi oleh pasal 56 KUHP, kewajiban hukum tersebut dapat dibebankan kepada penasihat hukum baik perorangan maupun organisasi bantuan hukum agar terikat kepada kewajiban untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa yang benar-benar membutuhkan.

Pemikiran di atas, hemat penulis cukup rasional terlebih penasihat hukum adalah suatu profesi dimana dalam pengertian profesi tersebut antara lain terkandung suatu persyaratan yang salah satunya adalah mengabdikan kepada kepentingan umum, jadi dengan kata lain profesi penasihat hukum merupakan profesi panggilan. Arti pentingnya terdakwa didampingi oleh penasihat hukum secara teoretis didukung oleh beragam argumentasi, antara lain penasihat hukum tersebut akan sangat membantu dalam menemukan kebenaran materiil yang hendak dicapai dalam acara pidana.<sup>34</sup> Disamping itu kehadiran pembela untuk mendampingi terdakwa tersebut menurut R. Subekti<sup>35</sup> bisa menjamin terlaksananya prinsip "fair trial". Lebih jauh lagi menurut Soemarno P. Wirjanto<sup>36</sup>, dikatakan bahwa seorang yang menjadi tertuduh

---

34. Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

35. Dikutip dari Martiman Prodjohamidjojo, Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 15.

36. Soemarno P. Wirjanto, Profesi Advokat, Alumni, Bandung, 1979. hal. 108.

adalah "Emotionally involved" sehingga janganakan seorang yang buta hukum, mereka yang qualified di bidang hukumpun perlu didampingi oleh penasihat hukum. Terhadap terdakwa yang buta hukum dan tidak didampingi oleh penasihat hukum kesempatan untuk melakukan pembelaan diri jelas tidak bisa dilakukan secara optimal.

Dari segi praktis hal ini juga didukung oleh hasil pengamatan yang ditujukan terhadap persidangan pengadilan dimana terdakwa tersebut tidak didampingi oleh penasihat hukum. Hak tersangka yang berupa hak untuk mengajukan eksepsi jelas tidak bisa dimanfaatkan oleh terdakwa. Bahkan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidananya sering hanya bisa digunakan untuk menyatakan bahwa dirinya menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagainya. Jadi lebih tertuju pada hal-hal yang sifatnya dianggap bisa meringankan hukumannya. Bisakah diharapkan dari seorang terdakwa yang awam hukum untuk memahami istilah-istilah teknis yang dipergunakan dalam persidangan atas dirinya, seperti eksepsi, pledooi dan sebagainya ? Sungguh seorang terdakwa yang awam hukum dan seorang diri di persidangan pengadilan, praktis menjadi korban birokrasi peradilan pidana belaka yang mungkin tidak akan pernah dimengerti.

Seharusnya dengan kondisi sistem peradilan pidana yang menempatkan hakim dalam posisi aktif ini, hakim pemeriksa perkara harus lebih banyak memberikan penjelasan-penjelasan kepada terdakwa mengenai hak-haknya dalam proses

persidangan dan terhadap terdakwa yang tidak mau didampingi oleh penasihat hukum seyogyanya hakim harus bisa meyakinkan terdakwa bahwa dirinya tidak mungkin bisa memutus perkara secara obyektif jika terdakwa tidak mau didampingi oleh penasihat hukum.

Selanjutnya untuk melengkapi analisis mengenai pelaksanaan hak bantuan hukum ini, di bawah ini dikutipkan contoh kasus sebagai berikut.

**Putusan Nomor : 125/1923/Pid.B/PN SKA.**

**POSISI KASUS :**

Seorang bernama Joko Waluyo dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan telah disangka melakukan suatu tindak pidana penganiayaan sehingga mengakibatkan orang lain tenggelam ke dalam Sungai Bengawan Solo dan diketemukan dalam keadaan meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 3, 4 KUHP.

**KEJAKSAAN NEGERI :**

Terdakwa Joko Waluyo oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**- Dakwaan Primair :**

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

**- Dakwaan Subsidiar :**

Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

**PENGADILAN NEGERI :**

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan segi hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Joko Waluyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di depan umum yang berakibat matinya orang, sebagaimana diatur oleh Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Atas dasar hal tersebut kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena jaksa maupun terdakwa telah menerima keputusan tersebut pada tanggal 30 Nopember 1993.

**ANALISIS :**

Kasus di atas cukup menarik untuk disimak mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam berkas perkara di tingkat penyidikan yang penulis peroleh terungkap bahwa Joko Waluyo disangka melakukan tindak pidana penganiayaan seperti diatur dalam Pasal 351 ayat 3, 4 KUHP sebagaimana tercantum dalam hasil resume pemeriksaan terhadap tersangka Joko Waluyo oleh Penyidik Polisi.
2. Di tingkat kejaksaan tersangka Joko Waluyo didakwa melakukan tindak pidana :

Dakwaan Primer : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Dakwaan subsidair : Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55  
ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan dua hal yang dikemukakan di atas, maka terlihat bahwa di tingkat Kejaksaan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perubahan terhadap pasal yang dikenakan kepada tersangka. Mengenai hal ini KUHP sebenarnya tidak mengatur secara jelas apakah penuntut umum berhak berbuat demikian. Menurut Pasal 138 KUHP dikatakan bahwa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (ayat 1). Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (ayat 2).

Adapun yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 138 KUHP hanyalah mengenai arti "meneliti", yaitu tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Timbul persoalan apabila penuntut umum setelah meneliti hasil



pemeriksaan penyidik menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut dianggap cukup, namun penyidik menurut pandangan penuntut umum tidak tepat dalam mencantumkan pasal-pasal dari undang-undang pidana yang didakwakan, apakah dalam hal ini penuntut umum berwenang mengubah pasal tersebut dengan pasal yang lebih sesuai. Mengenai hal demikian penulis sependapat dengan Andi Hamzah yang menyatakan bahwa hal itu (merubah pasal-pasal dengan pasal yang sesuai, pen.) dapat dilakukan oleh penuntut umum secara langsung, karena dialah yang bertanggung jawab atas kebijakan penuntutan. Penuntut umum dominus litis dalam hal penuntutan. Ia bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak.<sup>37</sup>

Lebih dari itu menurut penulis, hal itu sebenarnya bisa diatasi seandainya dalam tahap penyidikan, setelah penyidik memberitahukan kepada penuntut umum bahwa telah dimulai suatu tindakan penyidikan terhadap suatu kasus (Pasal 109 ayat 1 KUHP), maka sejak saat itu penyidik selalu menjalin koordinasi dengan penuntut umum, khususnya apabila ia mengalami kesulitan-kesulitan yang bersifat yuridis misalnya saja kesulitan menerapkan pasal undang-undang pidana yang betul-betul sesuai. Demikian halnya terhadap suatu perkara yang menurut pendapat penuntut umum sebenarnya tidak dapat dilakukan penuntutan karena misalnya

---

<sup>37</sup>. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 161.

telah daluarsa (Pasal 78 KUHP), maka penuntut umum sebaiknya juga diperbolehkan untuk memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidikannya dihentikan.

Selanjutnya hal lain yang juga ditemukan dalam kasus di atas adalah mengenai dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan yang juga telah dinyatakan terbukti di persidangan sehingga dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa Joko Waluyo. Apabila diperhatikan rumusan dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tersebut maka di situ dicantumkan bahwa perbuatan yang di rumuskan dalam pasal tersebut diancam dengan pidana maksimal 12 tahun penjara. Ini berarti bahwa perkara tersebut termasuk kualifikasi "wajib" mendapat bantuan hukum /didampingi penasihat hukum apabila ia tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri (Vide Pasal 56 KUHP). Mengenai hal ini dari berkas perkara yang penulis teliti menunjukkan bahwa di tingkat penyidikan pihak penyidik telah menanyakan kepada tersangka apakah ia akan menggunakan penasihat hukum atau tidak. Atas pertanyaan penyidik tersebut kemudian tersangka Joko Waluyo menyatakan bahwa dirinya belum memerlukan penasihat hukum.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, ternyata terdakwa Joko Waluyo tersebut juga tidak didampingi oleh penasihat hukum, hal ini dapat disimpulkan dari apa yang seluruhnya tertuang dalam putusan hakim terhadap terdakwa Joko Waluyo. Dalam putusan tersebut hakim sama sekali tidak menyinggung mengenai adanya penasihat hukum yang mendam-

pingi tersangka, padahal sebenarnya kasus tersebut bisa dikatakan cukup berat karena diancam dengan pidana diatas lima tahun.

Dalam kondisi seperti diuraikan di atas yang seharusnya berperan adalah hakim yang memimpin persidangan perkara atas nama terdakwa Joko Waluyo tersebut. Peranan hakim dalam hal ini sangat menentukan khususnya dalam memberikan penjelasan-penjelasan pada terdakwa mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum. Apalagi kalau ternyata terdakwa tersebut termasuk orang yang tidak mampu bahkan buta hukum, maka pemberitahuan dan penjelasan dari hakim akan menjadi sangat menentukan karena dari sinilah akan dapat diketahui secara pasti bagaimana sikap terdakwa terhadap bantuan hukum tersebut. Bilamana terdakwa setelah mendapat penjelasan-penjelasan yang memadai dari hakim yang memeriksa perkara ia tetap tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, hal itu tidak menjadi masalah sebab pada dasarnya hak untuk didampingi atau menolak didampingi penasihat hukum merupakan hak subyektif dari tersangka/terdakwa itu sendiri.

Sebagai perbandingan berikut ini dibahas sebuah kasus dimana terdakwa dalam persidangan pengadilan didampingi oleh penasihat hukum.

Putusan No.: 173/Pid.B/1995/PN Ska.

**KASUS POSISI :**

Seorang bernama UMARDANI AGUNG SUMARWI Bin AMAT MUNADI pada tingkat penyidikan telah disangka melakukan suatu perbuatan dengan tanpa hak membuat atau menggunakan merek MERAK yang menyerupai pada keseluruhannya dengan merek MERAK yang telah terdaftar di Departemen Kehakikan RI Direktorat Merek dengan nomer 156285 tanggal 16 Oktober 1990 atas nama pemohon CHANDRA SANTOSA, lalu diperdagangkan atau di jual kepada pedagang antara lain di pasar Kartosuro dan pasar Jongke. Terhadap tersangka UMARDANI AGUNG SUMARWI Bin AMAT MUNADI tersebut dikenakan Pasal 81 Undang-Undang No.19 Tahun 1992 juncto Pasal 64 KUHP dan subsider, memperdagangkan atau menjual barang berupa bubuk coklat merek MERAK yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek MERAK yang terdaftar milik orang lain tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang No. 19 Tahun 1992 juncto Pasal 64 KUHP.

**KEJAKSAAN NEGERI :**

Terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI Bin AMAT MUNADI diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan pengadilan dengan dakwaan :

Primair : Pasal 81 UU No.19 Tahun 1992.

Subsidair : Pasal 84 (1) UU No.19 Tahun 1992.

Lebih subsidair : Pasal 382 bis KUHP

#### **PENGADILAN NEGERI :**

Pengadilan negeri yang menyidangkan kasus tersebut setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkan segi hukumnya kemudian mengambil putusan bahwa terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI Bin AMAT MUNADI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di uraikan dalam dakwaan primer yaitu "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merk orang lain". Atas dasar hal tersebut kemudian Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.

#### **ANALISIS :**

Berbeda dengan kasus yang telah dikemukakan di muka, dimana terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka kasus yang melibatkan terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI Bin AMAT MUNADI ini di persidangan pengadilan telah didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 1995. Dari berkas perkara yang penulis peroleh, di tingkat penyidikan terdakwa UMARDANI

AGUNG SUMARWI Bin Amat Munadi telah ditanya oleh penyidik yang memeriksa dirinya apakah dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut, ia memerlukan didampingi oleh penasihat hukum. Atas pertanyaan, penyidik tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan ini tidak menggunakan penasihat hukum. Kemudian dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap tersangka juga ditanyakan oleh penyidik, apakah ia mau dicarikan penasihat hukum oleh kepolisian, dan terdakwa menyatakan masih pikir-pikir terlebih dahulu. Namun yang menarik dari berkas perkara atas nama terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI Bin AMAT MUNADI ini adalah dilampirkannya surat pernyataan dari terdakwa yang isinya menyatakan bahwa ia dalam pemeriksaan perkara baik pemeriksaan di tingkat Kejaksaan Negeri Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Surakarta tidak akan menggunakan Penasihat Hukum. Selanjutnya di persidangan pengadilan terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI Bin AMAT MUNADI telah didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu :

1. HERRY SISWAYANTO, SH
2. TATIK RATNA DEWI INDRAWASIH, SH

Dalam perkara ini, pemeriksaan sidang pengadilan bisa dikatakan telah berimbang karena kondisi ideal suatu persidangan telah terpenuhi yaitu hadirnya Jaksa Penuntut Umum yang ahli hukum dan menjadi wakil masyarakat/pemerintah dan terdakwa yang dalam posisi lemah namun telah ditopang oleh kehadiran penasihat hukum yang diharapkan bisa

memperjuangkan kepentingannya, serta akan dinilai oleh hakim yang berdiri obyektif di atas keduanya. Dalam kondisi yang demikian inilah, proses mencari kebenaran materiil dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, sebab hanya dengan hadirnya semua pihak yang terkait dalam sistem peradilan pidana, maka dimungkinkan bagi hakim untuk bisa mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya sehingga sejauh mungkin bisa mengambil putusan yang seadil-adilnya.

Penasihat hukum dalam sidang pengadilan memiliki hak-hak antara lain adalah hak untuk mengajukan eksepsi yang berupa suatu keberatan atas dakwaan penuntut umum (Pasal 156 ayat 1 KUHAP). Eksepsi ini apabila diterima oleh hakim berarti akan menyudahi perkara, karena keberatan (eksepsi) ini diajukan dalam kesempatan sidang yang pertama dan ditujukan pada hal-hal yang belum menyangkut pokok perkara. Disamping itu penasihat hukum juga berhak mengajukan apa yang disebut sebagai "Pleedooi" (Nota Pembelaan) yang harus disampaikan setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan tuntutan Pidana. Selanjutnya terhadap nota pembelaan tersebut pihak penuntut umum boleh mengajukan jawaban yang dalam praktek dikenal sebagai replik, demikian seterusnya namun kesempatan terakhir tetap ada pada terdakwa/penasihat hukumnya untuk menyatakan pendapatnya. Dalam proses jawab-jinawab inilah dimungkinkan hakim bisa mengambil keputusan yang paling tidak mendekati kebenaran dan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri.

Demikian halnya dalam kasus ini, maka pihak penasi-  
hat hukum dalam memberikan tanggapan atas tuntutan pidana  
dari jaksa penuntut umum telah mengajukan suatu pledooi  
(nota pembelaan) sebagai berikut :

#### PEMBELAAN (PLEDOOI)

Ketua Majelis Hakim dan anggauta yang terhormat,  
Terlebih dahulu kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan  
Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya bahwa pemeriksaan  
perkara terdakwa :

Nama lengkap	: UMARDANI AGUNG SUMARWI al TIMBUL
Tempat lahir	: Surakarta
Umur/tgl. lahir	: 53 tahun / 31-12-1942
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan/warga negara	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sorogenen Rt.02 RW.02 Jagalan Jebres Kodya Surakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP
Telah ditahan oleh	: Kepolisian sejak tanggal 6 Sep- tember 1995 s/d tanggal 26 Sep- tember 1995 dan diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi Semarang sampai dengan 4 Oktober 1995. Penuntut Umum s/d tanggal 9 Nopember 1995. Pengadilan Negeri Surakarta s/d tanggal 11 Desember 1995.

Telah selesai dan telah dibacakan tuntutanannya oleh Saudari  
Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya pidana No. PDM-  
08/SRKRTA/EPL/1095 pada tanggal 1 Februari 1996 yang pada  
pokoknya :

#### MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Negeri Klas I Surakarta meme-  
riksa mengadili serta memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa : UMARDANI AGUNG SUMARWI al. TIMBUL,  
bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan  
tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya  
dengan merk terdaftar milik orang lain atau badan hukum,  
untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau  
diperdagangkan "sebagaimana diatur dalam pasal 81 UU No.  
19 Tahun 1992 dalam surat dakwaannya No. PDM-08  
SRKRTA/epl/1095 tanggal 30 Oktober 1995 pada dakwaan  
Primair.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI al TIMBUL dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 15 hari kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Foto copy surat pendaftaran merk MERAK
  2. Foto copy pendaftaran Hak Cipta.  
tetap dilampirkan dalam berkas  
Sedangkan :
    - 1 (satu) pak bubuk coklat cap merak asli
    - 1 (satu) pak bubuk coklat cap merak palsu
    - 5,5 (lima koma lima) zak bubuk coklat
    - 2 (dua) buah timbangan
    - 1 (satu) buah monel/screen
    - 16 (enam belas) pak coklat MERAK a.10 Bungkus.
    - 21 (dua puluh satu) pak coklat merk MERAK A 12 Bungkus.
    - 3 (tiga) ikat plastik merk MERAK a. 350 bungkus.
    - 1 (satu rol) plastik pembungkus merk TEKOS MAS.
    - 4 (empat) pak bubuk coklat cap merak palsu.
    - 5 (lima) pak bubuk coklat cap MERAK palsu.  
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).  
Majelis Hakim dan Saudari Jaksa penuntut Umum yng terhormat, sampailah kini saatnya terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaannya dan akan digunakan sebaik-baiknya oleh pembelanya yaitu :
  1. HERRY SISWAYANTO, SH berdasarkan surat keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.48/PA/1989 tertanggal 31 juli 1989 yang beralamat di Jl. Ledoksari Lor No.1 Kodya Surakarta dan
  2. TATIK RATNA DEWI INDRAMASIH, SH berdasarkan surat keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 18 Januari 1996 yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 67 Kerten Kodya Surakarta.

Yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Nopember 1995.

- Bahwa ia terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI al TIMBUL pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 1995 atau masih dalam tahun 1995 bertempat di Soregen Rt.02 Rw.02 Kalurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kodya Surakarta atau suatu tempat tertentu di Kodya Surakarta dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas I Surakarta dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merk yng sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa telah memproduksi coklat bubuk dengan merk merak padahal merk merak adalah merk orang lain yang telah terdaftar di direktorat Merk dengan No. 156285 tanggal 30 April 1981 dan diperpanjang/diperbaharui pada tanggal 16 Oktober 1990 dengan No. 263442 atas nama L. CHANDRA SANTOSA dengan alamat :

Jl. Imam Bonjol No. 38 Semarang.

Bahwa ia terdakwa pertama membeli coklat bubuk kalengan dari Toko AMANDA Surakarta, kemudian pergi ketempat SUKAMTO bin KARTONADI dengan membawa bungkus Coklat merk MERAK serta menyerahkan beberapa bal plastik dengan maksud untuk membuat sablon merk MERAK, setelah kantong plastik dengan maksud untuk membuat sablon merk MERAK, setelah kantong plastik ada cap dengan merk MERAK oleh terdakwa diisi bubuk coklat dengan ukuran 50 gram.

Bahwa bubuk coklat dengan merk MERAK yang diproduksi terdakwa kemudian diperdagangkan dipasaran dengan harga untuk ukuran berat 50 gram dijual dengan harga antara Rp 1.300,- s/d Rp 1.400,- dan untuk ukuran kecil dijual perpaknya Rp 750,- melanggar pasal 81 UU No. 19 Tahun 1992.

#### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUNG SUMARWI al TIMBUL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair telah memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut menggunakan merk terdaftar milik orang lain secara tanpa hak. Perbuatan tersebut diatas oleh terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa ia terdakwa telah memproduksi coklat bubuk dengan merk MERAK yang kemudian memperdagangkan atau menjual lagi dipasar kepada umum.

Bahwa terdakwa tidak berhak atas merk tersebut, karena bubuk coklat merk MERAK adalah merk yang sudah terdaftar di Direktorat merk dengan No. 156285 Tanggal 30 April 1981 dan telah diperbaharui dengan No. 263442 Tanggal 16 Oktober 1990 atas nama L. Chandra Santosa dengan alamat Jl. Imam Bonjol No. 38 Semarang. Melanggar Pasal 84 ayat 1 UU No. 19 Tahun 1992.

#### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUNG SUMARWI al TIMBUL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair telah melakukan tindak pidana : Untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu yakni : terdakwa telah memproduksi bubuk coklat dengan merk MERAK yang dipasarkan kepada umum, padahal merk MERAK tersebut adalah milik orang lain yang sudah

terdaftar di Direktorat Merk dengan No. 156285 tanggal 30 April 1981 dan telah diperbaharui dengan No. 263442 Tanggal 16 Oktober 1990 a.n. L. CHANDRA SANTOSA Jl. Imam Bonjol No. 38 Semarang.

Bahwa dengan dipasarkannya produk coklat bubuk merk MERAK yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan tandingan dari merk MERAK milik L. CHANDRA SANTOSA. Melanggar pasal 382 bis KUHP.

Ketua Majelis Hakim dan anggauta yang terhormat, Setelah dakwaan dibacakan oleh Saudari Jaksa Penuntut Umum selesai dan kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang dakwaan tersebut dijawab sudah mengerti kemudian diperiksa saksi-saksi :

**1. Saksi SUKAMTO Bin KARTO NARDI**

Atas pertanyaan Majelis Hakim setelah disumpah menerangkan :

Bahwa saksi mendapat pesanan sablon dari terdakwa berupa bungkus plastik cap MERAK.

Bahwa pesanan terdakwa kepada saksi sebanyak 8 (delapan rol) yang isinya tiap rol sebanyak 2300 bungkus terdiri dari 50 gram.

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 1992.

Bahwa tugas saksi menyablon pesanan terdakwa dengan ongkos setiap rol Rp 2000,- semuanya sebesar Rp 16.000,- bahwa pesannya 2 kali dalam 1 minggu.

Bahwa di atas gambar MERAK ada Nomor deponer warna putih.

Bahwa saksi tidak tahu bungkus tersebut untuk apa.

Atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menerangkan :

Bahwa 1 rol berisi 2300 bungkus.

Bahwa waktu pesan membawa contoh.

Bahwa terdakwa selain menyablon merk MERAK juga menyablon merk KAKAK TUA. Atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa membenarkan.

**2. Saksi L. CHANDRA SANTOSA al LO TJI CHO**

Atas pertanyaan Majelis Hakim setelah disumpah menerangkan :

Bahwa saksi adalah pemilik dan memproduksi coklat merk MERAK.

Bahwa lokasi pabriknya ada di Jl. Siliwangi dan kantornya ada di Jl. Imam Bonjol No. 38 Semarang, jumlah pekerjanya ada 25 orang.

Bahwa produksi setiap harinya sebanyak 70-80 kaleng.

Sejak tahun 1968 serta sudah terdaftar.

Bahwa pemasarannya di daerah Semarang, Ungaran, Salatiga dan Solo.

Bahwa saksi tahu kalau produknya ditiru atas dasar laporan dari sales yang isinya ada produk coklat merk MERAK yang harganya lebih murah.

Bahwa perbedaan antara yang asli dan palsu adalah yang palsu plastiknya lebih bureng sedangkan gambar dan tulisan persis sama.

Bahwa saksi menjual per pak seharga Rp 215,- . Saksi merasa ada yang meniru karena omzet penjualan menurun yaitu sejak Januari 1995.

Bahwa yang menjual merk palsu adalah di Kartasura.

Bahwa setiap kaleng seharga Rp 42.000,- menjadi 200 bungkus.

Bahwa kerugian saksi sebesar Rp 8.000.0000,- (turun 25 %) atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi HERMAWAN Bin BAMBANG

Saksi sebagai sales dari saksi L. CHANDRA mendengar keluhan dari para langganan kalau ada coklat merk MERAK yang harganya lebih murah.

Setelah saksi mengetahui kemudian saksi melapor kepada saksi L. CHANDRA dan saksi juga mengecek sendiri ke toko-toko dan akibatnya penghasilan saksi berkurang karena para pelanggan pindah.

Bahwa terdakwa tertangkap di Kartasura.

Bahwa sebagian barang juga ada pada terdakwa.

Bahwa perbedaannya yang palsu rasanya lain, plastik-nya buram tulisannya juga buram.

Bahwa setelah terdakwa tertangkap masih ada bubuk coklat palsu yang dijual dan masih ada juga yang meniru cap MERAK.

### 4. Saksi WASRI ISMAIL, SH (Saksi Ahli)

Atas pertanyaan Majelis Hakim setelah disumpah menerangkan :

Bahwa coklat merk MERAK benar-benar terdaftar dalam Direktorat Merk dengan nama L. CHANDRA SANTOSA sesuai dengan data yang ada.

Bahwa saksi tidak dapat membedakan antara yang asli dengan yang palsu.

Bahwa orang lain dapat memakai merk MERAK asal dapat ijin terlebih dahulu dari pemilik.

Bahwa merk MERAK sudah terdaftar sejak tahun 1981 diperbaharui pada tahun 1990 dan habis masanya pada tahun 2000.

Jika tidak diperpanjang masa berlakunya maka habis kekuatannya.

Atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum saksi menerangkan :

Jika sudah terdaftar merk tersebut bisa digunakan untuk diri sendiri, orang lain, bisa menyuruh atau memberi ijin orang lain, jadi berlawanan dengan Pasal 81 dan 84 UU No. 19 Tahun 1992.

### KETERANGAN TERDAKWA :

Bahwa terdakwa ikut membuat merk MERAK karena dari teman-teman yang sudah ada ijin kemudian beli contoh untuk disablon.

Bahwa terdakwa melakukan baru pada bulan Februari 1995. Terdakwa beli yang asli Rp 200,- per bungkus

sedangkan coklat yang terdakwa jual seharga Rp 150,-. Bahwa terdakwa baru menjual sebanyak 14 pak. Bahwa cara membuat setelah terdakwa membeli coklat kalengan dari toko AMANDA kemudian dimasukkan dalam plastik yang sudah disablon.

Atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menerangkan :

Terdakwa hanya pesan 2 rol cap MERAK sedangkan yang lain bukan cap MERAK.

Bahwa keuntungan terdakwa 1 kaleng sebesar Rp 2500,-

Atas pertanyaan penasihat hukum :

Bahwa keuntungan setiap kaleng bersih Rp 2000,-

Bahwa terdakwa berbuat demikian karena ikut-ikutan teman yang katanya sudah punya izin.

Majelis Hakim yang terhormat,

Sampailah saatnya kami menyampaikan bahasan dalam analisa fakta hukum di bawah ini :

Bahwa dalam perkara ini terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI al TIMBUL didakwa oleh saudara penuntut umum telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik orang lain atau badan hukum untuk barang atau sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 UU No. 19 Tahun 1992 dan menurut Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Selanjutnya dalam tuntutan pidananya yang dibacakan pada tanggal 1 Februari 1996 Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan menyimpulkan bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 UU No. 19 Tahun 1992 dan dituntut dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara dipotong selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Tentu saja secara tegas kami tidak sependapat dengan pendirian dan kesimpulan jaksa penuntut umum dimaksud.

Bahwa agar lebih tepat dan sempurna dalam menyimpulkan unsur-unsurnya yang dikandung dalam Pasal 81 UU No. 19 Tahun 1992 maka dalam tinjauan yuridis dakwaan jaksa penuntut umum perlu kiranya kami kutip pasal tersebut diatas yang selengkapanya berbunyi :

" Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jas sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,-. "

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja dan tanpa hak.
- Menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik orang lain.

- Untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.

**Ad. 1. Setiap orang.**

Dalam dakwaan ini yang dimaksud adalah terdakwa. Bahwa ternyata dalam persidangan sesuai dengan kesaksian dari saksi CHANDRA HERMAWAN al BAMBANG ternyata bukan hanya terdakwa saja yang melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa ternyata setelah terdakwa ditahan oleh penyidik, merk MERAK palsu juga masih beredar sesuai dengan keterangan saksi CHANDRA HERMAWAN. Dengan demikian maka dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti karena unsur setiap orang ternyata sangat kabur.

**Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak.**

Bahwa unsur dengan sengaja memang telah terbukti namun unsur tanpa hak tidak terbukti karena sesuai dengan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa membuat/menjual bubuk coklat cap MERAK dikarenakan ikut teman-temannya yang sudah lebih dahulu membuat yang katanya sudah mendapat ijin. Bahwa pengakuan terdakwa kalau sudah mendapat ijin dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi ahli yang menerangkan bahwa pemakaian merk dapat dilakukan oleh siapa saja asal dapat ijin baik lisan maupun tertulis, disuruh maupun menyuruh orang lain. Dengan demikian unsur tanpa hak juga tidak terbukti.

**Ad. 3. Menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya pada merk terdaftar milik orang lain.**

Dalam unsur ini memang telah terbukti sesuai dengan pengakuan terdakwa di persidangan.

**Ad. 4. Untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.**

Dalam unsur ini juga tidak terbukti karena terdakwa sama sekali tidak pernah memproduksi bubuk coklat melainkan hanya membeli bubuk coklat yang sudah jadi dalam kaleng di toko AMANDA.

Oleh karena dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum dan salah satu unsur dari Pasal 81 UU No. 19 Tahun 1992 juga tidak terbukti dan kenyataannya terdakwa tidak pernah memproduksi bubuk coklat (baik bukti saksi maupun pengakuan terdakwa) maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Surakarta memutus perkara ini dengan keputusan :

Menyatakan terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI al TIMBUL tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum (Pasal 81 UU No. 19 Tahun 1992).

Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum.

Membebaskan biaya pada negara.

Namun jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Surakarta berpendapat lain dan menyatakan terdakwa bersalah, maka kami mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Akhirnya kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kami tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam nota pembelaan ini di hati majelis hakim dan anggota yang terhormat.

Selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh para penasihat hukum dari terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI al TIMBUL, jaksa penuntut umum mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Tanggapan terhadap pledooi dari penasihat hukum atas nama terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI al TIMBUL

Majelis Hakim dan saudara penasihat hukum yang terhormat.

Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menanggapi pledooi dari penasihat hukum yang telah dibacakan di muka sidang pada tanggal 8 Februari 1996 yang lalu a.n. terdakwa : UMARDANI AGUNG SUMARWI al. TIMBUL tempat lahir : Surakarta, Umur : 53 Tahun/31-12-1942, jenis kelamin : laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, tempat tinggal : Sorogenen Rt.02 Rw.02 Jagalan Jebres Surakarta, agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, pendidikan : SMP.

Didalam pledooinya tersebut penasihat hukum menyatakan bahwa :

1. Unsur "setiap orang" sangat kabur, karena : dalam persidangan sesuai kesaksian saksi CHANDRA HERMAWAN al. BAMBANG ternyata bukan hanya terdakwa saja yang melakukan perbuatan tersebut dan ternyata setelah terdakwa ditahan oleh penyidik, bubuk coklat merk MERAK palsu masih beredar.

Menurut kami pendapat penasihat hukum tersebut sangat keliru karena "setiap orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Untuk perkara ini adalah saudara UMARDANI AGUNG SUMARWI al. TIMBUL selaku terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari awal

sampai akhir, hanya sendirian tanpa ada yang membantu atau ikut serta dari segi hukum. Apakah bubuk coklat merk MERAK tersebut masih beredar setelah terdakwa ditahan itu bukan suatu alasan untuk menyimpulkan bahwa terdakwa bukanlah pelakunya.

2. Unsur "tanpa hak" tidak terbukti walaupun unsur "dengan sengaja" memang telah terbukti karena sesuai pengakuan terdakwa bahwa :

a. Ia membuat/menjual bubuk coklat cap merak tersebut dikarenakan ikut teman-temannya yang sudah lebih dahulu membuat yang katanya sudah mendapat ijin.

b. Ia sudah mendapat ijin, dan penasihat hukum telah membuktikan dengan adanya keterangan saksi ahli yang menerangkan bahwa pemakaian merk dapat dilakukan oleh siapa saja asal dapat ijin baik lisan atau tertulis, disuruh ataupun menyuruh orang lain.

Kami jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut karena :

Alasan ikut dengan teman-temannya yang sudah lebih dahulu membuat sangat tidak relevan untuk dikemukakan sebagai alasan untuk menyatakan tidak terbuhtinya unsur "tanpa hak" apalagi dalam istilah "yang katanya" sudah mendapat ijin. Untuk itu : siapa yang mengizinkan terdakwa dan siapa pula yang mengizinkan orang tersebut (yang memberi ijin terdakwa) menggunakan merk MERAK tersebut.

Perlu diketahui sesuai dengan bunyi pasal 3 UU No. 19 Tahun 1992 tentang MERK dinyatakan bahwa :

" Hak atas merk adalah : hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merk yang terdaftar dalam Daftar Umum Merk untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merk tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya ".

Dan berdasarkan keterangan saksi ahli Wasri Ismail, SH serta dihubungkan/dikuatkan dengan bukti foto copy permohonan (pembaharuan) pendaftaran merk perusahaan dan merk perdagangan a.n. L. CHANDRA SANTOSA No. 263442 tanggal 16 Oktober 1990. hanya saudara L. CHANDRA SANTOSA alamat Jl. Imam Bonjol No. 38 Semarang, satu-satunya pemilik yang berhak menggunakan merk MERAK karena telah terdaftar pada Direktorat Merk dengan No. 156205 Tanggal 30 April 1981 dan telah diperbaharui dengan No. 263442 tanggal 16 Oktober 1990. Lainnya tidak ada.

Dalam kasus ini telah terbukti bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah mendapat ijin dari Saudara L. CHANDRA SANTOSA sebagai pemilik merk MERAK yang terdaftar untuk menggunakan merk MERAK tersebut atau untuk memproduksi atau memperdagangkan bubuk coklat dengan merk MERAK miliknya tersebut.



3. Kemudian penasihat hukum menyatakan bahwa unsur "untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan" juga tidak terbukti karena terdakwa sama sekali tidak pernah memproduksi bubuk coklat melainkan hanya membeli bubuk coklat yang sudah jadi dalam kaleng dari toko AMANDA Solo.

Kami jaksa penuntut umum juga tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tersebut karena :

Dalam perkara tindak pidana merk yang harus dibuktikan adalah tentang : Penggunaan tanpa hak terhadap merk terdaftar milik orang lain, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya untuk barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Jadi apakah dalam penggunaan merk tersebut terdakwa memproduksi sendiri atau tidak sama saja atau tidak menjadi masalah.

Berdasarkan keterangan saksi ahli di bawah sumpah persidangan, bahwa pengertian "menggunakan" tersebut dapat berupa :

Memproduksi sendiri dan menempelkan merk tersebut pada barang tersebut atau memesan pada orang lain atau dibeli dan ditempel merk atau menyuruh membuat kemudian baru dibubuhi merknya (sesuai pula jawaban saksi ahli tersebut) (Wasri Ismail SH) dalam BAP nya tertanggal 22 Agustus 1995 pada No. 10 yang dibuat atas sumpah oleh penyidik pembantu Mat Ridho, Serma Nrp 60050709, pada kantor Polda Jateng Semarang.

Disamping itu bahwa dalam penjelasan atas UU RI No. 19 Tahun 1992 tentang Merk pada hal. 33-34 dikatakan a.l. bahwa : secara bertahap telah diatur kembali ketentuan-ketentuan di bidang hak cipta dan hak paten. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, merk juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang perdagangan barang dan jasa untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain yang sejenis dalam satu klas. Kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena itu dalam UU ini pengertian perdagangan mencakup pula pengertian produksi.

Sebenarnya pengaturan mengenai merk bukanlah hal yang baru. Selama ini telah ada UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merk Perusahaan dan Merk Perniagaan. Dalam hal tertentu UU baru ini lebih merupakan penyempurnaan.

Dalam kasus ini tidak menjadi masalah apakah bubuk coklat tersebut dibeli atau diproduksi sendiri, yang jelas terdakwa telah mencetak/menyuruh mencetak plastik pembungkus bubuk coklat tersebut persis/sama secara keseluruhannya dengan merk MERAK milik orang lain yang telah terdaftar dan selanjutnya memasukkan bubuk coklat tersebut kedalam bungkus plastik yang telah ada merk MERAK tersebut dan kemudian menjualnya kepada umum tanpa hak. Dengan perkataan lain diperdagangkan dengan menggunakan merk yang sama secara keseluruhan dengan merk

orang lain yang telah terdaftar, tanpa izin pemiliknya. Bahkan akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang besar bagi pemilik bubuk coklat merk MERAK asli, dalam hal ini adalah saudara L. CHANDRA SANTOSA dimana sejak beredarnya (kira-kira mulai bulan Januari 1995) bubuk coklat merk MERAK palsu yang diproduksi atau diperdagangkan terdakwa tersebut omzet penjualannya menurun sekitar 25-50 %.

Penasihat hukum sendiri dalam pledoonya telah mengakui bahwa unsur "menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik orang lain", telah terbukti. Lebih memberatkan lagi dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa bukan hanya bubuk coklat merk MERAK palsu saja yang dijual atau yang diperdagangkannya, tetapi juga bubuk coklat merk KAKAK TUA, RAJAWALI, dan TOKO MAS, yakni merk orang lain yang telah terdaftar tanpa izin pemiliknya dengan cara yang sama.

( Dalam kasus ini dapat dibuktikan dengan adanya surat permohonan pembaharuan pendaftaran merk perusahaan dan merk perniagaan No. 2117718 Tanggal 03 Desember 1988 atas nama Nico Giok Goen, Jl. Beteng No. 144 Semarang untuk merk TOK MAS, dan sesuai pula dengan BAP saksi Soesmanto Bin Tjoa Kim San tertanggal 13 September 1995 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Desember 1995 yang lalu ).

Demikian tanggapan-tanggapan kami terhadap pledooi dari penasihat hukum atas nama terdakwa UMARDANI AGUNG SUMARWI al. TIMBUL. Namun demikian pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memimpin dan memeriksa perkara ini.

Demikian telah dikutipkan pledooi atau nota pembelaan dari penasihat hukum maupun tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya setelah memeriksa tanggapan-tanggapan dari kedua belah pihak tibalah saatnya bagi hakim untuk menilai manakah diantara keduanya yang memiliki argumentasi yuridis yang lebih kuat. Dalam keadaan yang demikian inilah bisa dinilai obyektifitas hakim dalam menangani suatu perkara.

Sikap obyektif hakim ini sangat ditekankan sebab sistem peradilan pidana di Indonesia telah menempatkan posisi hakim dalam keadaan aktif. Ini artinya ia boleh

misalnya membatasi pertanyaan-pertanyaan dari jaksa penuntut umum pada saksi-saksi maupun terdakwa demikian juga sebaliknya ia bisa membatasi pertanyaan-pertanyaan penasihat hukum kepada saksi-saksi maupun terdakwa. Hakim yang bersikap obyektif adalah hakim yang mampu memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan segala sesuatunya demi tercapainya apa yang disebut sebagai kebenaran materiil. Terhadap kasus yang dikemukakan di atas penulis menilai bahwa hakim dalam putusannya ternyata telah mempertimbangkan baik yang dikemukakan oleh penuntuu umum maupun oleh pihak penasihat hukum, sehingga apapun yang diputuskan oleh hakim apakah itu berupa pemidanaan atau bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah menjadi masalah. Pertimbangan hakim mengenai kasus di atas secara keseluruhan dilampirkan dalam penelitian ini.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Umum

Eksistensi bantuan hukum dewasa ini telah diakui secara internasional, hal ini tercermin baik di dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) maupun dalam instrumen internasional yang berupa Basic Principles on The Role of Lawyers yang telah diadopsi oleh Konggres Kejahatan Kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai 7 September 1990.

Dalam UDHR tersebut pertama kali dunia internasional mengakui adanya access to legal counsel sebagai bagian dari hak asasi manusia dimana setiap orang yang dituntut di hadapan hukum berhak didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum. Sedangkan dalam ICCPR jaminan hak atas bantuan hukum tersebut antara lain tercantum dalam artikel 14 butir 3 huruf d yang menyebutkan bahwa : To be tried in his presence, and to defend him self in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so

require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it. Selanjutnya dalam Basic Principles on The Role of Lawyers antara lain diatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan akses tersangka kepada penasihat hukum, kualifikasi seorang penasihat hukum, kewajiban dan tanggung jawab terhadap klien, kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat dan sebagainya.

Bagi Indonesia bantuan hukum dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap insan Indonesia. Hak ini dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga program bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya adalah program penegakan hak asasi manusia.

Pemikiran di atas secara konstitusional mendapat landasan yang mantap di dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam pasal ini terkandung suatu asas persamaan di muka hukum (equality before the law) yang juga telah diakui sebagai asas hukum universal, sebab asas tersebut tercantum pula dalam Pasal 6 UDHR, bahwa everyone has the right to recognition every where as a person before the law.

Penjabaran lebih lanjut dari asas persamaan di muka hukum tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman baik dalam pasal-pasalnya (Pasal 35, 36, 37, 38) maupun dalam penjelasan umumnya. Secara lebih terperinci hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu pada Bab VII tentang Bantuan Hukum, Pasal 69-74. Bahkan lebih jauh ketentuan yang berkaitan dengan bantuan hukum ini juga terdapat dalam Bab V tentang Tersangka dan Terdakwa Pasal 54-57; Pasal 60-62 serta dalam Bab XIV tentang Penyidik yaitu Pasal 114 dan 115.

Secara umum bisa dikatakan bahwa ketentuan mengenai bantuan hukum dan yang terkait dengannya yang diatur dalam KUHP sudah lebih maju dibanding dengan yang ada dalam peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu dalam HIR. Hak atas bantuan hukum yang diatur dalam KUHP sudah menjamin seseorang yang tersangkut suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum sejak tahap pra-ajudikasi sampai dengan tahap adjudikasi. Sedangkan dalam HIR hal tersebut baru diberikan ketika seseorang dihadapkan ke muka persidangan pengadilan.

Namun disayangkan jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka /terdakwa melalui pengaturan hak atas bantuan hukum tersebut ternyata masih bersifat terbatas dan belum mampu

menjamin bahwa hak atas bantuan hukum tersebut bisa dinikmati secara riil oleh para pencari keadilan.

Ketentuan mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP telah menempatkan kedudukan pencari keadilan benar-benar tergantung pada aparat penegak hukum, karena pemenuhan hak atas bantuan hukum tersebut bersifat fakultatif dan tidak mengandung resiko yuridis apapun bagi petugas penegak hukum yang mengabaikan ketentuan tersebut. Akibat lebih jauh dari keadaan ini adalah bahwa dalam praktek peradilan pidana penegakan hak atas bantuan hukum tersebut juga masih jauh dari yang diharapkan sehingga yang terjadi adalah masih banyak perkara-perkara yang tersangka/terdakwa tidak menikmati haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Program bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Kehakiman bagi golongan masyarakat yang kurang mampu tidak bisa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan seluruh pencari keadilan karena adanya kendala yang berupa target anggaran yang disediakan. Akibatnya, keadaan tersebut berpotensi mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hak atas bantuan hukum ini secara selektif.

## 2. Khusus

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab III maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

2.1. Pengaturan hak bantuan hukum dalam KUHP, sebenarnya telah mencerminkan suatu keinginan untuk menempatkan komponen penasihat hukum sebagai pihak yang harus mendapat perhatian yang memadai. Secara sistematis ketentuan bantuan hukum dalam KUHP bisa dibedakan menjadi dua kategori yaitu :

- a. Kategori "hak" dan sekaligus "wajib" mendapat bantuan hukum, hal ini berlaku untuk tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana yang dikualifikasi oleh Pasal 56 KUHP. Tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, 15 tahun atau lebih, dan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun dalam hal tersangka/terdakwa tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri.
- b. Kategori "hak" untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu untuk tindak pidana di luar kualifikasi yang ditentukan oleh Pasal 56 KUHP.



Dalam praktek penegakkan hukum ketentuan Pasal 56 KUHPA tersebut telah diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. : 501 K/Pid./1988 yang menegaskan bahwa pelaksanaan Pasal 56 KUHPA bersifat "imperatif" tertuju pada semua pejabat, pada semua tingkat pemeriksaan. Ketentuan ini tidak tertuju kepada terdakwa yang masih mempunyai hak untuk "menolak" untuk didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk. Disamping itu khusus untuk tindak pidana korupsi terdapat yurisprudensi MARI No. 1565 K/Pid./1991 yang menegaskan bahwa pejabat pada semua tingkat pemeriksaan harus menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka sejak di awal penyidikan. Kelalaian atau pengabaian terhadap ketentuan ini akan berakibat semua hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa dinyatakan tidak sah. Dengan demikian disini tampak adanya sanksi proses yang dikembangkan melalui praktek peradilan pidana.

2.2. Pelaksanaan hak atas bantuan hukum dalam praktek peradilan pidana berdasarkan studi yang dilakukan di kotamadya Surakarta menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

a. Di tingkat kepolisian

Terhadap tindak pidana yang dikualifikasi oleh Pasal 56 KUHPA yang dalam praktek disebut sebagai tindak pidana berat, pihak kepolisian telah menja-

lin kerja sama dengan pihak IKADIN cabang Solo, meskipun tidak secara tertulis, tetapi dalam bentuk konsensus dan pengertian bersama. Oleh karena itu setiap kali terjadi tindak pidana berat dan menjadi perhatian masyarakat, maka tersangka/terdakwa selalu sudah tersedia penasihat hukum yang sanggup memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Sedangkan untuk tindak pidana yang tidak termasuk kualifikasi pasal 56 KUHP, artinya pejabat pada semua tingkat pemeriksaan oleh UU tidak diwajibkan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa, kerja sama antara kepolisian dan penasihat hukum masih dalam taraf antar personal yang didasarkan pada hubungan baik diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk menghadirkan penasihat hukum di tingkat kepolisian tidak tersedia. Akibat lebih jauh dari hal ini adalah pihak kepolisian seringkali mengalami kesulitan untuk menghadirkan penasihat hukum bagi tersangka.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka di tingkat kepolisian pihak penasihat hukum tidak merasa kesulitan karena ada pengertian bersama antara keduanya, namun kehadirannya dalam mengikuti jalannya pemeriksaan tetap dibatasi hanya dalam bentuk melihat dan mendengar pemeriksaan. Dalam berhubungan dengan tersangka yang ditahan, penasihat hukum hanya diijinkan pada

setiap jam kantor dan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut tetap dalam pengawasan. Di sini menjadi masalah dalam hal tersangka yang ditahan tersebut misalnya diperiksa pada malam hari, artinya di luar jam kerja kantor yang disediakan untuk penasihat hukum dalam mendampingi tersangka.

**b. Di tingkat kejaksaan**

Di tingkat kejaksaan penasihat hukum sudah tidak mendampingi tersangka secara fisik, sebab sejak berlakunya KUHAP untuk tindak pidana umum yaitu tindak pidana yang diatur dalam KUHP, pihak kejaksaan tidak lagi melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap tersangka. Peranan penasihat hukum di tingkat kejaksaan ini adalah dalam hal mendapatkan surat dakwaan terhadap tersangka/terdakwa guna kepentingan pembelaan setelah perkaranya diperiksa di sidang pengadilan.

**c. Di tingkat pengadilan**

Di tingkat pengadilan ini, untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, kerja sama secara kelembagaan dilakukan dengan unsur Lembaga Bantuan Hukum setempat ( 6 LBH), tetapi hal inipun masih terbatas untuk golongan masyarakat yang kurang mampu juga dengan anggaran yang terbatas.

## B. Saran-Saran

Dalam rangka menjamin ditegakkannya hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana yang berarti juga terjaminnya akses penasihat hukum kepada tersangka/terdakwa tersebut dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 56 KUHP yang mengharuskan setiap pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa sebaiknya dilengkapi dengan ketentuan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk tersebut wajib memberikan bantuan hukum yang diminta. Jadi di sini ada keseimbangan kewajiban yang harus dilakukan oleh segenap unsur sistem peradilan pidana termasuk di dalamnya adalah unsur penasihat hukum untuk merealisasikan hak atas bantuan hukum yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Apabila sudah demikian selanjutnya bisa diikuti dengan pemberian suatu sanksi bagi pejabat maupun penasihat hukum yang mengabaikan ketentuan tersebut. Kelalaian yang dilakukan oleh pejabat dapat diberikan sanksi , berupa sanksi disiplin bagi pejabat yang bersangkutan, atau dihentikannya proses yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan. Sedangkan terhadap penasihat hukum yang mengabaikan kewajibannya untuk mendampingi tersangka maka pihak kepolisian atau kejaksaan diberi hak untuk melaporkan penasihat hukum tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat selaku peja-

bat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penasihat hukum.

2. Terhadap tindak pidana yang di luar kualifikasi Pasal 56 KUHP mekanisme sanksi seperti diuraikan dalam angka 1 di atas bisa juga diterapkan kepada penasihat hukum khususnya yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum. Hanya dengan cara demikian inilah bisa tetap dibina idealisme dari lembaga bantuan hukum, untuk selalu konsisten pada usaha menegakkan keadilan dan kebenaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia, Alumni, Bandung. 1980.
- Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta. 1981.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Arikha Media Cipta, Jakarta. 1996.
- , Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar Grafika, Jakarta. 1990.
- , Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Perbandingan KUHAP, HIR, dan Komentar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Ansorie Hasibuan, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung. 1990.
- Anthony Lewis, The Supreme Curt and How It Works, diterjemahkan oleh Ethy R. Agoes dan Robert N. Hornicle, Pradnya Paramita, Jakarta. 1984.
- A. Tambunan, KUHAP Beserta Penjelasan, Latar Belakang dan Proses Pembentukannya, Bina Cipta, Bandung, 1982
- Bambang Widjojanto, Perlunya Revisi Atas Hak Bantuan Hukum Dalam KUHAP (Telaah Kritis Masalah Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana), Makalah Pada Seminar Nasional, UMS, Surakarta. 1997.
- Black's Law Dictionary, Fifth Edition, 1979.
- Compilation of International Instrumen, Vol. I (First Part), United Nation, New York. 1993.
- Djoko Prakosa, Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia (Citra, Idealisme, dan Keprihatinan), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995.

Harian Republika, 3 Agustus 1994.

Herbert L. Packer, The Limit of Criminal Sanction, California, Stanfords University Press, 1968

H. Hamrad Hamid dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Ifdhal Kasim, Perdebatan di Sekitar Pembaharuan KUHAP, Harian Bernas, 11 April 1994.

Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.08-Um.06.02 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.24-Um.06.02. Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu.

Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-Um.08.10 Tahun 1994 Tanggal 21 Juli 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.

Instruksi Menteri Kehakiman RI No.M.01-Um.08.10. Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum, Tanggal 21 Nopember 1996.

International Review of Penal Law (Movement to Reform Criminal Procedure And To Protect Human Rights, Preparatory Colloquium Section III, AIDP, Toledo (Spain). 1992.

Keputusan Bersama DILKEHJAPOL Propinsi Jawa Tengah Tanggal 31 Agustus 1994

Keputusan Bersama DILKEHJAPOL Propinsi Jawa Tengah Tanggal 19 Januari 1995

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.Um.09.08. Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, Tanggal 1 Juni 1980.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.Um.08.10. Tahun 1981 tentang Perubahan dan perbaikan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.Um.09.08. Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, Tanggal 5 Nopember 1981.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : KMA/005/SKB/VII/1987, Nomor : M. 03-PR.08.05. Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum.

Kunarto (Penyadur), Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum, Cipta Manunggal, Jakarta. 1996.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. 1988.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Exsepsi, dan Putusan Peradilan), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court (Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi), Djambatan, Jakarta. 1996.

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta. 1994.

Majalah Varia Peradilan, No. 36, September Tahun 1988

Majalah Varia Peradilan, No. 103, April Tahun 1994.

Martiman Prodjohamidjojo, Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.

M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta. 1991.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Sinar Kartini, Jakarta. 1985.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Pustaka Sinar Kartini, Jakarta. 1985.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP. UNDIP, Semarang. 1995.



Oemar Senoadji, Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta. 1991.

-----, Profesi Dokter, Erlangga, Jakarta, 1991.

-----, KUHAP Sekarang, Erlangga, Jakarta. 1989.

-----, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta. 1985.

-----, Hukum-Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta. 1980.

P. Marcus, Criminal Justice Reformed In The United States, dalam International Review of Penal Law (Movement to Reform Criminal Procedure And To Protect Human Rights, Preparatory Colloquium Section III, AIDP, Toledo (Spain). 1992.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 1982

Rancangan Undang-Undang tentang Pemberi Bantuan Hukum, Tahun 1979.

RM. Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya), Sinar Grafika, Jakarta. 1994.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksisistensialisme dan Abolisio-nisme), Bina Cipta, Bandung. 1996.

-----, Perbandingan Hukum Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung. 1996.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1988.

Saafroedin Bahar, Hak Asasi Manusia (Analisis Komnas HAM dan jajaran HANKAM/ABRI), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1996.

Satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung. 1976.

-----, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982.

Soehardjo Ss, RUU Kepolisian Republik Indonesia  
Terutama Ditinjau Dari Aspek Ketatanegaraan,  
Makalah, UNDIP, Semarang, 1997

Soemarno P. Wurjanto, Profesi Advokat, Alumni  
Bandung, 1989

S. Tanusubroto, Peranan Pra-Peradilan Dalam Hukum  
Acara Pidana, Alumni Bandung, 1982

Sukardjo Adidjojo, Profesi Advokat, dalam Bulle-  
tin Informasi BAHANA No. 3 Tahun 1985

TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar  
Haluan Negara.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP .

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan  
Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah  
Agung.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan  
Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Umum.